



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TERJEMAHAN BERANOTASI DARI BAHASA INGGRIS KE BAHASA  
INDONESIA:  
“TURNING WORK AND LIFELONG LEARNING INSIDE OUT: A  
MARXIST—FEMINIST ATTEMPT” KARYA SHAHRZAD MOJAB DAN  
“WHAT WILL WE EAT: RESEARCH QUESTIONS AND PRIORITIES FOR  
WORK AND LEARNING” KARYA ASTRID VON KOTZE**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Humaniora pada Program Studi Linguistik**

**DANAR SRI WIJAYANTI  
NPM : 1006741652**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU LINGUISTIK  
DEPOK  
DESEMBER 2012**

**Universitas Indonesia**

Terjemahan beranotasi..., Danar Sri Wijayanti, FIBUI, 2012

## ABSTRAK

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi.

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta

upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan.

Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan in

Depok, 18 Desember 2012

*probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan stuktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekwensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

Danar Sri Wijayanti

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Danar Sri Wijayanti**

**NPM : 1006741652**

**Tanda Tangan:**

**Tanggal : Desember 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh

Nama : Danar Sri Wijayanti  
NPM : 1006741652  
Program Studi : Linguistik  
Judul : Terjemahan Beranotasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia: "Turning Work and Lifelong Learning inside out: a Marxist—Feminist Attempt" karya Shahrzad Mojab dan "But What Will we Eat: Research Questions and Priorities for Work and Learning" karya Astrid Von Kotze

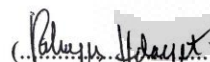
ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Grace Wiradisastira



Penguji : Prof. Rahayu S. Hidayat



Penguji : Dr. F. X. Rahyono

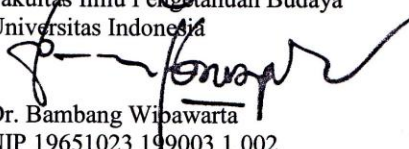


Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Desember 2012

oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wipawarta  
NIP 19651023 199003 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan yang Maha Esa, YHWH Elohim Adonai, dan firman yang menjadi manusia, sang juru selamat dahsyat yang saya kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus/Yahushua HaMaschiah, serta RohNya yaitu Ruach HaKodesh. Dialah yang membuat segala sesuatu yang nampaknya mustahil menjadi sesuatu yang indah pada waktuNya. Proses penyelesaian karya tulis ini pun tak lepas dari kasih setiaNya, yang selalu baru dari hari ke hari. PertolonganNya tak pernah terlambat sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan karya tulis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Humaniora di Universitas Indonesia.

Saya juga sungguh berterima kasih kepada Ibu Dr. Grace Wiradisatra sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu selesainya tugas akhir ini, dan dengan sabar dan sangat teliti memperhatikan setiap detail penerjemahan sehingga, dan membimbing saya dalam tiap langkah penulisan tugas akhir ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Cornelius Sembiring, M.A selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan dukungan moril untuk selesainya tugas akhir ini. Saya juga berterima kasih kepada Prof. Rahayu Surtiati Hidayat yang telah menolong saya sejak tahap awal mempersiapkan karya tulis ini.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada Bapak Berend Veddeler dan kakak Irene Girsang yang senantiasa mendorong dan mendoakan saya untuk menyelesaikan studi. Demikian juga Bapak Petrus Sugito, M.Th yang senantiasa memfasilitasi

kebutuhan studi saya. Saya pun berterima kasih atas dukungan kasih yang besar dari kedua orang tua saya, Suwarno Mertodihardjo dan Yasmi Mertodiharjo, dan bude Tjiptaningtyas Sardju yang senantiasa memberikan emphati yang luar biasa dalam mendampingi saya mengerjakan tugas akhir ini.

Tak lupa saya berterima kasih kepada seluruh nara sumber: Yvonne Evans, Bernadette Mason, Kolya Schweppe, Helaine Costello, Indra Rinaldi, Debora Suparni, dan Elly Kudubun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbang saran bagi dunia penerjemahan karya ilmiah populer di Indonesia. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua.

Depok, Desember 2012

Peneliti,

Danar Sri Wijayanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danar Sri Wijayanti

NPM : 1006741652

Program Studi : Linguistik

Departemen : Linguistik

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis Karya : Terjemahan Beranotasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Terjemahan Beranotasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia: “Turning Work and Lifelong Learning inside out: a Marxist—Feminist Attempt”**

**karya Shahrzad Mojab dan “But What Will we Eat: Research Questions and Priorities for Work and Learning” karya Astrid Von Kotze**

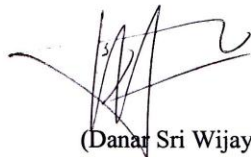
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Desember 2012

Yang menyatakan



(Danar Sri Wijayanti)

## ABSTRAK

Nama : Danar Sri Wijayanti  
Program Studi : Linguistik  
Judul : Terjemahan Beranotasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia: “Turning Work and Lifelong Learning inside out: a Marxist—Feminist Attempt” karya Shahrzad Mojab dan “But What Will we Eat: Research Questions and Priorities for Work and Learning” karya Astrid Von Kotze

Terjemahan beranotasi adalah hasil penerjemahan yang dilengkapi dengan catatan penerjemah sebagai pertanggungjawaban atas padanan yang dipilih. Tujuan penerjemahan beranotasi dua artikel berjudul “Turning Work and Lifelong Learning inside out: a Marxist—feminist Attempt” karya Shahrzad Mojab dan “But What Will we Eat: Research Questions and Priorities for Work and Learning” karya Astrid Von Kotze adalah untuk menjelaskan metode dan prosedur penerjemahan yang sesuai untuk menerjemahkan teks argumentasi dan dengan publik pembaca terjemahan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana mencapai kesepadanan dalam penerjemahan ini, dan bagaimana menghasilkan terjemahan yang berterima bagi pembaca bahasa sasaran. Terjemahan beranotasi teks ini menyangkut tinjauan kritis terhadap pendidikan orang dewasa, dengan berbagai istilah khusus dari berbagai bidang ilmu lain. Selain itu, terdapat tantangan untuk menyederhanakan gagasan dalam kalimat panjang dan kompleks sehingga dapat dipahami pembaca sasaran. Untuk menghasilkan terjemahan yang berterima bagi pembaca bahasa sasaran, saya menerapkan metode penerjemahan komunikatif dan metode penerjemahan idiomatis. Adapun prosedur yang saya terapkan antara lain padanan deskriptif, parafrasa, naturalisasi, penerjemahan resmi, modulasi, padanan budaya, transferensi, couplet, dan penerjemahan metafora. Selain itu, saya juga menerapkan strategi penggunaan kata yang lebih netral dan penghilangan kata. Untuk menerjemahkan teks ini, seorang penerjemah tidak cukup berbekal pengetahuan di bidang pendidikan orang dewasa saja, melainkan juga membutuhkan wawasan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan terjemahan yang berterima.

Kata kunci: anotasi, penerjemahan, teks, argumentasi, metode, prosedur



## ABSTRACT

Name : Danar Sri Wijayanti  
Study Program : Linguistics  
Title : An Annotated Translation from English to Indonesia: “Turning Work and Lifelong Learning inside out: a Marxist—Feminist Attempt” written by Shahrzad Mojab and “But What Will we Eat: Research Questions and Priorities for Work and Learning” written by Astrid Von Kotze

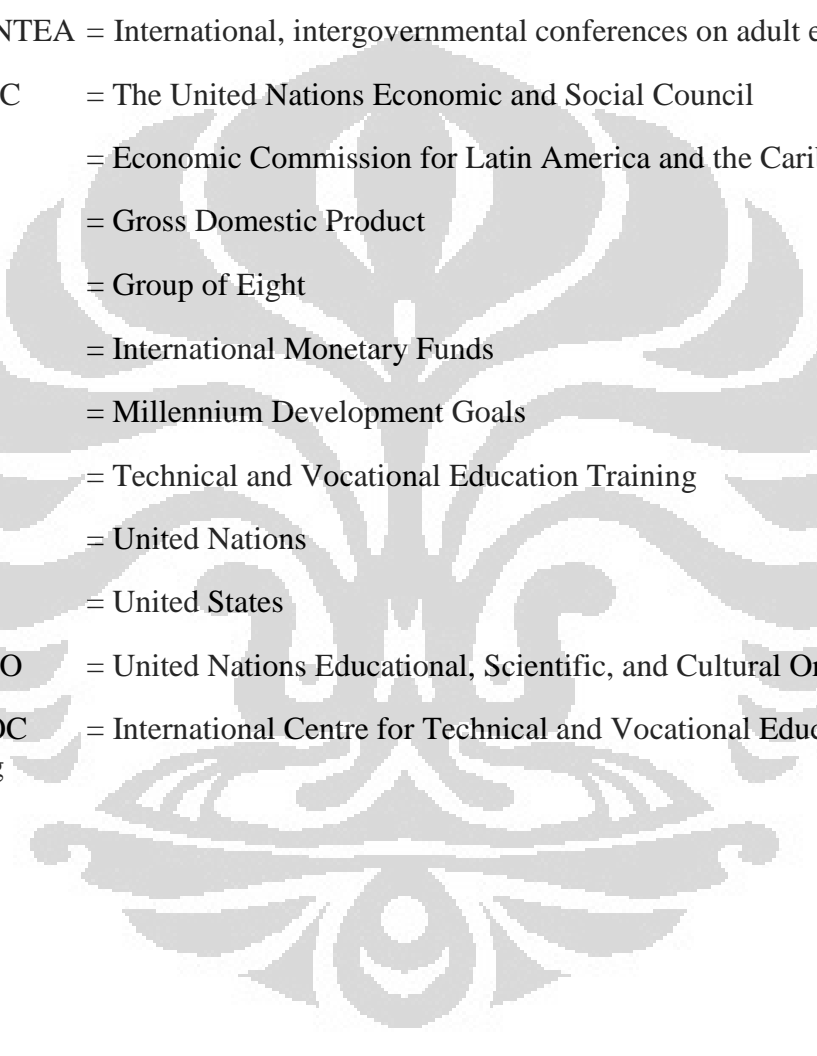
An annotated translation is a translation completed with the translator’s note showing the translation’s responsibility in choosing the equivalent words. The aim of translating the two articles such as “Turning Work and Lifelong Learning inside out: a Marxist—feminist Attempt” written by Shahrzad Mojab and “But What Will we Eat: Research Questions and Priorities for Work and Learning” written by Astrid Von Kotze is to explain appropriate translation methods and procedures for translating argumentatif texts that meets the readers’s needs. The research questions are how to achieve translation equivalents and how to make natural translation for the target readers. The annotated text deals with critical review toward adult learning in which there are some terminology from other fields. Besides, there are challenges to transfer some ideas wrapped in difficult wordings and complex sentences in the source text into simpler sentences in the target text. To make natural translation for the target readers, I apply communicative and idiomatic methods. In addition, I apply various procedures such as descriptive equivalent, paraphrase, naturalization, recognized translation, modulation, cultural equivalent, transference, couplet, and translating metaphors. Besides, I use strategy of using a more neutral word and translation by omission. A translator does not only need to equip him/herself with knowledge in adult learning but also widen his/her perspective in various knowledge in order to make natural translation.

Keyword: annotation, translation, text, argumentative, method, procedure

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Alasan Pemilihan Teks.....	1
1.3 Deskripsi Teks Sumber dan Penulis.....	3
1.4 Metodologi Penerjemahan Beranotasi .....	7
1.4.1 Langkah Penerjemahan .....	7
1.4.2 Langkah Anotasi .....	10
<b>BAB 2. KERANGKA TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penerjemahan .....	12
2.2 Penerjemahan Teks Argumentasi .....	14
2.3 Metode Penerjemahan.....	15
2.4 Prosedur Penerjemahan.....	18
2.5 Etik Penerjemahan .....	26
<b>BAB 3. TEKS SASARAN.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 4. TEKS SUMBER.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB 5. ANOTASI .....</b>	<b>103</b>
5.1 Kata .....	103
1.5.1 Kata yang tidak memiliki padanan leksikal .....	104
1.4.2 Tiadanya kata khusus dalam bahasa sasaran.....	111
2.2 Frasa .....	115
2.3 Istilah.....	121
2.4 Idiom .....	131
2.5 Akronim .....	143
<b>BAB 6 KESIMPULAN .....</b>	<b>155</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>157</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>162</b>

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM



BSa	= Bahasa Sasaran
BSu	= Bahasa Sumber
CONFINTEA	= International, intergovernmental conferences on adult education
ESOCOC	= The United Nations Economic and Social Council
ECLAC	= Economic Commission for Latin America and the Caribbean
GDP	= Gross Domestic Product
G8	= Group of Eight
IMF	= International Monetary Funds
MDG	= Millennium Development Goals
TVET	= Technical and Vocational Education Training
UN	= United Nations
US	= United States
UNESCO	= United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNEVOC Training	= International Centre for Technical and Vocational Education and Training

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menyusun tugas akhir terjemahan beranotasi, saya tertarik pada sebuah kumpulan karya ilmiah dari disiplin ilmu pendidikan orang dewasa dan perubahan global, khususnya di bidang pekerjaan dan pembelajaran yang berjudul *Learning/Work: Turning Work and Lifelong Learning inside out*. Buku yang disunting oleh Linda Cooper dan Shierly Walters itu diterbitkan oleh Human Sciences Research Council (HSRC) Afrika Selatan pada 2009. Dalam penyusunan tugas akhir ini, akan diterjemahkan dua artikel dari buku di atas dan diberikan catatan mengenai masalah penerjemahannya: “Turning Work and Lifelong Learning inside out: a Marxist—feminist Attempt” karya Shahrzad Mojab dan “But What Will we Eat: Research Questions and Priorities for Work and Learning” karya Astrid Von Kotze.

#### 1.2 Alasan Pemilihan Teks

Dua teks di atas menarik untuk diterjemahkan karena memiliki tingkat kesulitan yang layak diperhitungkan. Tingkat kesulitan terletak pada kosa kata yang sukar dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, idiom, akronim, serta kalimat yang panjang dan kompleks. Selain itu, substansi kedua teks itu saling terkait satu sama lain. Teks karya Mojab mendiskusikan beragam kontroversi di seputar pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam era globalisasi. Selanjutnya, teks karya Kotze membuat kerangka pertanyaan dan prioritas penelitian di seputar pekerjaan dalam sektor ekonomi informal. Keduanya adalah karya baru dan belum ada terjemahan beranotasi di bidang tersebut di atas. Alasan lain adalah teks itu belum pernah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, tulisan itu terlalu berharga untuk dilewatkan karena menambah wawasan mengenai sisi lain dampak globalisasi pada negara berkembang ditinjau dari sudut pandang disiplin ilmu pendidikan orang dewasa dan perubahan global. Daya tarik buku itu terletak pada tantangan yang dikemukakan para cendekiawan untuk mengubah cara pandang umum terhadap pekerjaan, yaitu dari yang hanya menghargai pekerjaan di sektor ekonomi formal, menjadi penghargaan pada pekerjaan di sektor ekonomi formal dan informal. Tulisan itu juga berguna untuk bagi pembaca di Indonesia mengingat kesamaan permasalahan yang diangkat dengan realitas kehidupan sosial di Indonesia masa kini. Pengetahuan yang diuraikan di dalamnya sangat membantu pembaca untuk belajar mengatasi permasalahan itu dalam konteks Indonesia.

Terjemahan beranotasi adalah hasil penerjemahan mandiri yang dilengkapi dengan catatan penerjemah sebagai pertanggungjawaban atas padanan yang dipilihnya. Sebelumnya, telah ada terjemahan beranotasi sebagai tugas akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Linguistik FIB UI yang mengangkat karya sastra, artikel populer, dan teks teknis. Salah satu terjemahan beranotasi sebagai tugas akhir adalah *Nasty Bosses* karya Zusmeidar pada 2007. Masalah dalam penelitian itu adalah mengidentifikasi idiom dan menemukan padanan yang tepat. Ada empat metode yang diterapkan dalam penerjemahan *Nasty Bosses*, yaitu metode penerjemahan semantis, penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatis, dan penerjemahan komunikatif. Kesimpulan penerjemahan beranotasi karya Zusmeidar adalah proses penerjemahan tidak hanya berdasarkan metode, prosedur, dan teknik melainkan juga wawasan penerjemah yang luas.

Masalah dalam penelitian ini adalah pengalihan makna yang terungkap dalam teks sumber ke dalam teks sasaran. Pertanyaan yang diturunkan dari masalah itu adalah yang berikut.

1. Bagaimana mencapai kesepadanan dalam penerjemahan ini?

2. Bagaimana menghasilkan terjemahan yang berterima bagi pembaca bahasa sasaran?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode dan prosedur penerjemahan yang sesuai untuk menerjemahkan teks argumentasi dan dengan publik pembaca terjemahan. Terjemahan beranotasi ini merupakan sumbang saran bagi dunia penerjemahan tentang proses mencapai kesepadanan dalam penerjemahan teks argumentasi.

Adapun sasaran penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan proses mencapai kesepadanan dalam penerjemahan.
2. Menjelaskan cara menghasilkan terjemahan yang berterima bagi pembaca bahasa sasaran

### **1.3 Deskripsi Teks Sumber dan Penulis**

Penyusunan buku ini berawal dari agenda konferensi UNESCO di bidang pendidikan orang dewasa (dikenal dengan nama KONFINTEA) yang diselenggarakan dua belas tahun sekali. KONFINTEA 2009 difokuskan untuk menyikapi permasalahan di era global yang berhubungan dengan laju angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antarnegara. Buku itu merupakan bunga rampai yang ditulis oleh 34 ahli dari 10 negara, yang merupakan kumpulan gagasan mereka tentang pendidikan sepanjang hayat dan dunia kerja. Gagasan itu mengemuka dalam the Fifth International Researching Work and Learning Conference yang memunculkan kritik radikal terhadap dunia kerja di berbagai belahan dunia dewasa ini. Para cendekiawan penyusun buku itu mengemukakan pandangan yang berlawanan dengan perspektif dominan serta memberikan ilustrasi tentang tindakan dalam berbagai konteks global yang meliputi belahan dunia Selatan-Utara, ataupun Timur-Barat.

Buku yang terdiri dari tiga bagian itu menawarkan alternatif kemungkinan dalam dunia kerja sehingga tercapai keadilan sosial. Bagian I “Challenging Perspective”

menuntun pembaca menuju pemahaman tentang berbagai isu krusial yang membuka mata pembaca akan ketidakadilan yang terjadi di berbagai negara serta perlunya mengungkap pandangan yang berlawanan dengan kerangka hegemoni yang dominan dalam hal pembagian dan analisis bidang pembelajaran/pekerjaan.

Bagian pertama dibagi menjadi dua subbagian, yaitu “Challenging dominant discourse” dan “Critiquing structural inequalities” yang terdiri dari sebelas artikel, dua di antaranya adalah artikel yang akan diterjemahkan.

Artikel Mojab mengkaji hubungan antara pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat. Globalisasi yang erat hubungannya dengan kapitalisme, dalam pandangan Mojab, telah bertanggung jawab atas penyimpangan tujuan pembelajaran sepanjang hayat. Menurut Mojab, tujuan pembelajaran sepanjang hayat ternyata bukan untuk pengembangan sumber daya manusia sebagai tujuan mulia, namun hanya sekedar upaya untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam hal ini, Mojab menyampaikan keprihatinan akan gencarnya kampanye untuk menghentikan perdagangan manusia di negara berkembang yang secara ironis berbanding terbalik dengan suburnya perbudakan terselubung di negara maju, sebagai akibat dari kapitalisme. Adapun pendekatan feminisme aliran marxis digunakan untuk mengamati fenomena maraknya diskriminasi berdasarkan warna kulit dan jenis kelamin terhadap imigran perempuan dari negara berkembang yang mencari nafkah di negara maju. Tujuan penulisan artikel itu adalah untuk mendiskusikan beragam kontroversi di seputar pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam era globalisasi.

Shahrazad Mojab adalah seorang pengajar di University of Toronto, tepatnya pada Department of Adult Education and Counselling Psychology dan the Ontario Institute for Studies in Education pada bidang Kajian Pendidikan. Selain aktif dalam gerakan perempuan dan terlibat langsung dalam pergerakan sosial di Kurdistan, Shahrazad Mojab dikenal di dunia internasional berkat peranannya dalam menyuarakan advokasi yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di bidang pembelajaran dan pendidikan.

Buku yang pernah ditulis oleh Mojab adalah yang berikut.

1. *Women, War, Violence and Learning*
2. *Violence in the Name of Honour: Theoretical and Political Challenges*
3. *Women of a Non-State Nation: The Kurds*
4. *Property and Propriety: The Role of Gender and Class in Imperialism and Nationalism*
5. *Women of Iran: A Subject bibliography.*
6. *Two Decades of Iranian Women's Studies in Exiles: A Subject Bibliography [in Farsi]*

Senada dengan Mojab, artikel Von Kotze menyuguhkan kritik terhadap pemikiran pembangunan yang telah mengakar kuat tentang cara pandang terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kotze mendiskusikan dampak negatif globalisasi yang mengakibatkan diskriminasi terhadap pekerja di bidang sektor ekonomi informal, dengan berfokus pada konteks Afrika Selatan. Para pekerja di sektor ekonomi informal cenderung tidak dianggap sebagai orang yang bekerja. Oleh karena itu, mereka dipandang sebagai penganggur yang tak lebih dari sampah masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan berbagai macam pelatihan supaya dapat bekerja di sektor ekonomi formal. Mengingat hal itu, Kotze menyarankan "perspektif mata pencaharian" sebagai pendekatan alternatif terhadap pekerjaan, pembelajaran, dan pendidikan. Dalam artikel itu, Kotze juga membuat kerangka pertanyaan dan prioritas penelitian di seputar pekerjaan dalam sektor ekonomi informal.

Sama halnya dengan Mojab, Astrid Van Kotze juga pengajar di University of the Western Cape Afrika Selatan dan anggota Division of Lifelong Learning. Dia juga peneliti independen di bidang Pendidikan Orang Dewasa dan Perubahan Global, khususnya mengenai tema pembelajaran sepanjang hayat. Karya Von Kotze telah menjadi acuan untuk mata kuliah di seputar pendidikan orang dewasa dan perubahan global, khususnya mata kuliah Pekerjaan dan Pembelajaran dan Pembelajaran Global/Lokal di berbagai universitas di berbagai belahan dunia, seperti di University



of Cape Town Afrika Selatan, Monash University di Australia, University of British Columbia di Kanada, dan Linkoping University di Swedia.

Buku yang ditulis oleh Astrid Von Kotze adalah yang berikut.

1. *Living with Drought*
2. *Living with Drought: Drought Mitigation for Sustainable Livelihoods*
3. *Reducing risk: Participatory Learning Activities for Disaster Mitigation in Southern Africa*
4. *Organize & Act: The Natal Workers Theatre Movement, 1983-1987*

Adapun bagian 2 berjudul “Recognizing knowledges” terdiri dari enam artikel yang mempertanyakan apa dan milik siapa pengetahuan. Masing-masing artikel mempertajam kritik terhadap asumsi tentang pekerjaan yang umum diterima di berbagai belahan dunia, khususnya bahwa pekerjaan yang diakui adalah pekerjaan di sektor ekonomi informal. Bagian 3 yang “Exploring possibilities, creating change” berisi berbagai artikel yang berfokus pada aksi tindak lanjut. Artikel itu dikelompokkan dalam dua subbagian, yaitu “workers organizing/learning” dan “pedagogical innovations in higher education”. Bagian itu menggarisbawahi berbagai alternatif aksi tindak lanjut yang memprioritaskan keadilan sosial bagi mayoritas penduduk dunia.

Pembaca sasaran TSu adalah ilmuwan di dunia di bidang pendidikan orang dewasa dan perubahan global yang umumnya penutur asli bahasa Inggris dan pembaca sasaran TSa adalah ilmuwan Indonesia yang tertarik pada topik di seputar pendidikan bagi orang dewasa dan globalisasi.

Hasil penerjemahan TSu ke dalam TSa memiliki peluang untuk diterbitkan oleh Vereinte Evangelische Mission (VEM), sebuah lembaga dari Jerman yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat di tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Lembaga ini menerbitkan berbagai jenis buku untuk pembaca di negara yang tercakup dalam ketiga benua itu.

## 1.4 Metodologi Penerjemahan Beranotasi

Dalam penerjemahan beranotasi, terdapat langkah penerjemahan dan langkah anotasi. Adapun langkah penerjemahan dan langkah anotasi saya uraikan satu per satu sebagai berikut

### 1.4.1 Langkah Penerjemahan

Nida dan Taber (1974) mengemukakan tiga langkah penerjemahan yaitu analisis, pengalihan, dan rekonstruksi. Dalam penerjemahan beranotasi, penerjemah melakukan tiga langkah penerjemahan itu. Sebelum melakukan tiga langkah penerjemahan itu, saya melakukan persiapan, Dalam persiapan, saya mencari referensi berupa dokumen pendukung dan narasumber. Dokumen pendukung dalam penerjemahan teks ini adalah beberapa artikel dasar tentang pendidikan orang dewasa dan kamus, baik itu kamus bahasa Inggris—Inggris, Inggris—Indonesia, Indonesia—Inggris, dan kamus bahasa Indonesia. Disamping itu, saya menggunakan glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia untuk menemukan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.

Kamus yang saya gunakan berupa cetakan dan digital, yaitu *The American Heritage® Dictionary of the English Language*, *McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs*, *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged*, *Miriam-Webster Dictionary*, *MacMillan Dictionary*, *Cambridge Dictionary of American Idioms*, *Cambridge Idioms Dictionary*, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *Kernerman English Multilingual Dictionary*, *-Ologies & -Isms Dictionary*, *Dictionary.com Unabridged*, *English Collins Dictionary - English synonyms & Thesaurus*, *Longman Dictionary of Contemporary English*, *The American Heritage® Science Dictionary*, Kamus lengkap Indonesia—Inggris, Kamus Inggris—Indonesia, dan KBBI. Selain itu, untuk kosa kata bidang tertentu, saya menelusuri terjemahan resmi dari Glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia (2008).

Adapun semua kamus digital eka bahasa Inggris di atas saya unduh dari <http://www.thefreedictionary.com> pada tanggal 6 Desember 2011. Sedangkan KBBI saya unduh dari <http://ebsoft.web.id/2010/09/03/kbbi-kamus-besar-bahasa-indonesia-offline-gratis/> pada tanggal 8 Desember 2011. Glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia saya unduh dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/glosarium/> pada tanggal 26 Februari 2012. Sedangkan bahan bacaan dasar di bidang pendidikan orang dewasa dan perubahan global saya unduh dari <https://www.itslearning.com/Main.aspx?CourseID=3444>

Narasumber dalam penelitian ini adalah praktisi LSM yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa, ahli di bidang pendidikan orang dewasa, praktisi ekonomi, dan ahli di bidang penerjemahan Inggris-Indonesia.

a. Yvonne Evans

Selain penutur asli, Evans merupakan penggiat pelatihan profesi di Australia, yang sedang menempuh pendidikan lanjutan bidang pendidikan orang dewasa dan perubahan global di *Monash University*.

b. Slamet Haryono

Seorang praktisi ilmu biologi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang sedang bertugas sebagai peneliti di Kalimantan.

c. Bernadette Mason

Penutur asli yang juga seorang pengajar sekolah tinggi di Australia. Saat ini sedang menempuh pendidikan lanjutan bidang orang dewasa dan perubahan global di *Monash University*.

d. Indra Rinaldi

Indra Rinaldi adalah dosen pendidikan di Universitas Kristen Cipta Wacana Malang. Saat ini Indra Rinaldi sedang memperdalam bidang pendidikan orang dewasa dan perubahan global dengan

mengambil S2 bidang pendidikan orang dewasa dan perubahan global di Linkoping University, Swedia.

e. Hellaine Costello

Seorang penutur asli berkebangsaan Australia yang mengambil studi lanjut di bidang pendidikan orang dewasa dan perubahan global, khususnya kajian wanita.

f. Kolya Schweppe

Seorang penutur asli berkebangsaan Kanada yang mengajar bahasa Inggris di EF Qingdao, Shandong, China

g. Elly Kudubun

Ahli sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

h. Rahayu Surtiati Hidayat

Dosen pengampu mata kuliah Teori dan Masalah Penejemahan serta Metodologi Penelitian Penerjemahan pada program magister ilmu linguistik Universitas Indonesia.

i. Grace Wiradisastra

Dosen pengampu mata kuliah Penerjemahan Inggris-Indonesia pada program magister ilmu linguistik Universitas Indonesia.

Setelah melakukan persiapan, saya melakukan tiga langkah penerjemahan menurut Nida & Taber (1974) sebagai berikut.

- Analisis

Pada langkah ini, saya membaca keseluruhan TSu dan mencoba memahami isi pesannya. Saya juga memberi tanda bagian yang saya anggap penting. Ketika menemukan berbagai masalah pemahaman yang jawabannya tidak dapat ditemukan di dalam teks, saya mencari di berbagai sumber seperti kamus eka bahasa, narasumber, dan bahan bacaan dasar di bidang pendidikan orang dewasa dan perubahan global. Analisis saya lakukan supaya saya dapat memahami dengan baik pesan yang dibawa

Tsu serta cara pengungkapannya secara kebahasaan. Dalam langkah ini, saya mulai mencari metode dan prosedur yang sesuai.

- **Pengalihan**

Dalam langkah ini, saya mulai melakukan penerjemahan di dalam pikiran disertai dengan membuat catatan-catatan. Setelah itu, saya kembali mencermati catatan saya untuk mengalihbahasakan satuan terjemahan itu ke dalam bahasa sasaran.

- **Restrukturisasi**

Dalam langkah ini, saya melakukan penerjemahan yang sebenarnya. Saya mulai mengatur susunan kalimat secara teliti. Dalam langkah ini, saya mempertimbangan pembaca sasaran untuk melihat apakah teks terjemahan yang saya buat sudah memenuhi syarat keterbacaan dan apakah sudah menggunakan bahasa yang wajar. Jadi pada tahap ini, saya membandingkan TSa dan TSu, memeriksa pemahaman, menguji kewajaran, menguji keterbacaan, dan melakukan penyempurnaan teks terjemahan.

#### **1.4.2 Langkah Anotasi**

William dan Chesterman (2007) mengemukakan definisi terjemahan beranotasi sebagai “suatu bentuk penelitian introspektif dan retrospektif yang dilakukan penerjemah dengan menerjemahkan teks dan menuliskan catatan proses penerjemahannya”.

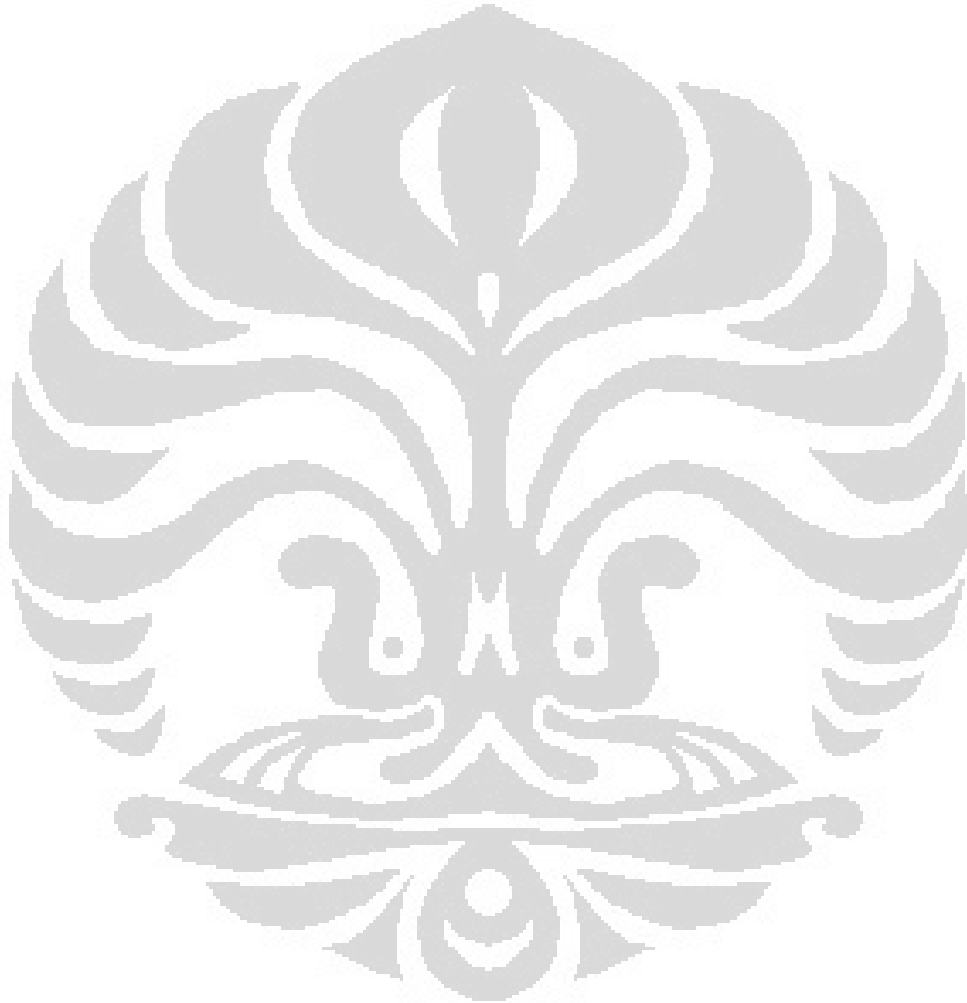
Adapun langkah anotasi adalah yang berikut.

1. Membandingkan TSu dengan TSa
2. Mengidentifikasi masalah penerjemahan
3. Mengelompokkan masalah penerjemahan dengan mencuplik unsur teks yang bermasalah

4. Menggolongkan unsur teks berdasarkan kategori masalah penerjemahan

5. Menjelaskan permasalahan dan solusi

Bab pendahuluan ini dilanjutkan dengan Bab 2 yang berisi kerangka teori, Bab 3 yang berisi teks sasaran, Bab 4 yang berisi teks sumber, Bab 5 yang berisi anotasi, dan Bab 6 yang berisi kesimpulan.



## BAB 2

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Penerjemahan

Nida dan Taber (1974) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penerjemahan adalah pengungkapan kembali pesan yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan menggunakan padanan yang wajar dan terdekat. Senada dengan Nida dan Taber, Larson (1984) mendefinisikan penerjemahan sebagai pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Senada dengan Larson, ahli penerjemahan lain adalah Newmark (1988) yang mengungkapkan bahwa penerjemahan adalah pengalihan maksud penulis yang terungkap dalam teks sumber ke dalam bahasa sasaran.

Dari ketiga definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa para ahli itu sepakat bahwa penerjemahan adalah kegiatan mengalihkan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Perbedaan pendapat ketiga ahli itu terletak pada Nida dan Taber, yang memasukkan unsur penggunaan padanan yang wajar dan terdekat untuk menghasilkan terjemahan yang berterima, sedangkan Newmark tidak menekankan hal itu. Lain halnya Larson (1984) yang menekankan bahwa pengalihan makna lebih penting daripada perubahan bentuk. Jadi, berbeda dengan Nida dan Taber (1974) yang menekankan kemiripan struktur bahasa, Larson memperbolehkan perubahan bentuk sepanjang makna teralihkan dengan baik.

Dalam hal ini, saya mendukung pendapat Larson bahwa dalam penerjemahan, maknalah yang penting untuk dipertahankan tanpa kesetiaan pada struktur yang sama. Dalam pengalihan makna, mencapai kesepadanan adalah hal yang penting. Kesepadanan terjemahan (*translation equivalence*) merupakan gejala empiris yang

ditemukan ketika teks sumber dibandingkan teks sasaran. Nida & Taber (1974) mengemukakan dua macam kesepadanan, yaitu kesepadanan formal dan kesepadanan dinamis. Kesepadanan formal adalah penerjemahan yang mempertahankan kesejajaran bentuk, yaitu BSu dan BSa menduduki kategori yang sama. Sebaliknya, kesepadanan dinamis bertujuan memperoleh kesepadanan sedekat-dekatnya dan paling wajar. Pada tahun 1974, Nida & Taber mengemukakan bahwa kesepadanan dinamis tercapai ketika ada keserupaan pemahaman pada pembaca BSu dan pembaca BSa.

Lebih dari itu, Larson (1984) menyatakan bahwa selain menyampaikan informasi yang sama dengan teks sumber, penerjemah juga harus berupaya untuk menimbulkan respon emosional pembaca teks sasaran yang sama dengan respon pembaca teks sumber. Jadi, penerjemahan sebagai komunikasi menuntut kesamaan tanggapan antara pembaca teks sumber dan teks sasaran. Teks terjemahan dapat memenuhi syarat kesepadanan penerjemahan ketika unsur teks sumber dan teks sasaran jarang mempunyai “makna sama” dalam pengertian linguistik, tetapi dapat berfungsi dalam situasi yang sama. Dalam mencapai kesepadanan itulah, penerjemah memikul tanggung jawab sebagai orang yang menjembatani perbedaan kebahasaan TSu dan TSa.

Selain menyingkapi perbedaan kebahasaan, Hatim & Mason (1997) mengungkapkan bahwa penerjemah juga harus mendalami makna wacana. Dia memberi contoh pada kasus tertentu, penerjemah yang memiliki kompetensi kebahasaan yang tinggi sekalipun, ternyata tetap melakukan kesalahan pengalihan makna karena gagal mendalami makna wacana. Jadi, penerjemah yang baik tidak hanya dituntut untuk memahami aspek kebahasaan. Penerjemah harus mampu menguak nilai wacana yang terkandung di dalam teks sumber. Selain itu, intuisi penerjemah untuk menangkap tujuan penulisan teks sangat diperlukan agar reaksi pembaca teks sasaran setelah membaca teks itu akan sama dengan reaksi pembaca teks sumber. Jika penerjemah gagal menangkap tujuan teks, maka keseluruhan genre teks tidak akan teralihkan dengan utuh. Sungguh tepat apa yang diungkapkan



Newmark (1988) bahwa penerjemah membutuhkan tidak hanya keterampilan melainkan intuisi yang terasah dalam mencapai kesepadanan

## 2.2 Penerjemahan Teks Argumentasi

Hatim dan Mason (1997) mengemukakan pentingnya klasifikasi teks sebelum melakukan penerjemahan. Hal tersebut merupakan fondasi yang perlu dibangun penerjemah dalam upaya memahami teks sehingga makna teks nantinya dapat teralihkan sepenuhnya. Dengan memperhatikan klasifikasi teks, penerjemah akan mengikuti tujuan penulis teks sumber. Memperhatikan tujuan penulisan teks sangat diperlukan agar reaksi pembaca teks sasaran setelah membaca teks tersebut akan sama dengan reaksi pembaca teks sumber. Jika penerjemah gagal menangkap tujuan teks, maka keseluruhan genre teks tidak akan teralihkan dengan utuh.

Teks argumentasi adalah teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk menerima gagasan penulis teks, yang disertai dengan berbagai argumen yang menguatkan pendapat penulis teks. Menurut Hatim dan Mason (1997), tuntutan yang dihadapi penerjemah berbeda-beda sesuai dengan jenis teksnya. Dalam hal ini, Hatim dan Mason (1997) mengemukakan bahwa penerjemahan teks dengan skala kebermarkahan yang tinggi seperti teks argumentasi bersifat jauh lebih sulit karena struktur teks lebih kompleks dan lebih sulit untuk dinegosiasikan. Selain ini *teksture* dalam teks argumentasi cenderung *opaque* (terselubung), dan terdapat manipulasi untuk menghasilkan efek retorik. Dengan demikian, terlihat bahwa struktur teks yang lebih kompleks dan sulit untuk dinegosiasikan merupakan tantangan dalam teks argumentasi. Semakin tinggi tingkat kebermarkahan, maka semakin tinggi tingkat kesulitan yang dihadapi penerjemah dalam mengalihkan makna secara utuh, karena semakin tinggi kebermarkahannya maka akan semakin kompleks struktur teksnya dan semakin sukar dinegosiasikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa menerjemahkan teks argumentasi bukanlah hal yang mudah karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.

Untuk mempertahankan genre teks argumentasi, pembaca teks sasaran harus mendapatkan efek yang sama (reaksi yang sama) seperti yang dirasakan oleh pembaca teks sumber. Oleh karena itu, penerjemah harus memperhatikan efek persuasi yang ada dalam teks sumber untuk dialihkan sepenuhnya ke dalam teks sasaran. Untuk mendapatkan efek persuasi yang sama, Hatim dan Mason (1997:192) menyarankan bahwa struktur teks memerlukan kreatifitas format yang lebih bervariasi. Dengan demikian, teks tidak boleh diterjemahkan dengan menggunakan metode penerjemahan yang kaku. Dalam penerjemahan teks argumentasi, Hatim&Mason (1997) menekankan bahwa metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran lebih dibutuhkan untuk menghasilkan penerjemahan yang efektif.

### 2.3 Metode Penerjemahan

Newmark (1988) mengemukakan 8 (delapan) jenis metode penerjemahan yang dituangkan ke dalam diagram V. Empat metode pertama lebih menekankan kepada teks sumber sedangkan empat metode berikutnya lebih menekankan teks sasaran.

Berikut ini adalah metode penerjemahan yang digambarkan dalam diagram V

#### **Orientasi pada Bsu**

Penerjemahan kata per kata  
 Penerjemahan Literal  
 Penerjemahan Setia  
 Penerjemahan Semantis

#### **Orientasi pada Bsa**

Adaptasi/Saduran  
 Penerjemahan bebas  
 Penerjemahan Idiomatis  
 Penerjemahan Komunikatif

Sumber: Newmark (1988)

Metode penerjemahan yang paling dekat dengan BSu adalah metode penerjemahan kata per kata. Metode itu umumnya digunakan untuk memahami

mekanisme teks sumber atau sebagai tahap prapenerjemahan untuk memahami teks yang sulit (Newmark, 1988). Penggunaan metode ini jarang dilakukan karena umumnya hanya dapat diterapkan dalam bahasa serumpun.

Selanjutnya, metode penerjemahan yang hampir mirip dengan penerjemahan kata per kata adalah penerjemahan literal atau penerjemahan harafiah. Bedanya, penerjemahan harafiah lebih menekankan pada struktur. Karena menekankan pada kesepadanan struktur, terjemahan yang dihasilkan akan terasa tidak wajar. Ketidakwajaran hasil terjemahan menunjukkan bahwa teks sasaran merupakan hasil penerjemahan dari teks sumber. Menurut Newmark (1988), metode ini umumnya digunakan dalam proses prapenerjemahan untuk mengidentifikasi permasalahan penerjemahan sehingga dapat dicari pendekatan yang tepat untuk mencapai kesepadanan.

Selain itu, terdapat metode penerjemahan setia. Metode itu digunakan untuk menghasilkan teks sasaran yang berpola bahasa sumber. Makna kontekstual dalam teks sumber dialihkan ke dalam teks sasaran dengan tetap mempertahankan struktur asli teks sumber. Oleh karena itu, penerjemahan setia terkadang tidak berterima dalam struktur gramatikal teks sasaran, dikarenakan struktur teks sumber tetap dipertahankan dalam teks sasaran. Selain itu, makna kata budaya tertentu dalam teks sumber kurang dapat mencapai kesepadanan dalam teks sasaran apabila penerjemahan teks masih menggunakan metode penerjemahan setia. Penerjemahan setia umumnya dilakukan untuk menerjemahkan teks hukum.

Berbeda dengan penerjemahan setia, penerjemahan semantis lebih memperhatikan nilai estetis yang terkandung dalam teks sumber untuk dialihkan ke dalam teks sasaran dengan memperhatikan kewajaran dan keindahan teks itu dalam teks sasaran. Penerjemahan semantis lebih fleksibel daripada penerjemahan setia. Lain halnya dengan penerjemahan setia yang bersifat dogmatik dan kaku, penerjemahan semantis memberikan ruang bagi penerjemah untuk menerjemahkan secara kreatif (Newmark, 1988). Selain itu, penerjemahan semantis membebaskan

penerjemah untuk memiliki empati yang diperoleh secara intuitif dari teks sumber untuk dialihkan ke dalam teks sasaran. Penerjemahan semantis umumnya dilakukan untuk menerjemahkan karya sastra. Penerjemahan ini memiliki orientasi bahasa pada teks sumber.

Selain metode di atas, terdapat penerjemahan komunikatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada keberterimaan teks sasaran bagi pembaca. Berbeda dengan penerjemahan semantis, terdapat perubahan orientasi bahasa dalam penerjemahan komunikatif. Penerjemahan ini memiliki orientasi bahasa pada pembaca bahasa sasaran. Dalam penerjemahan komunikatif, makna dalam teks sumber teralihkan dengan baik ke dalam teks sasaran sehingga makna yang terkandung dalam teks sumber akan mudah dipahami pembaca teks sasaran (Newmark, 1988). Dalam menggunakan metode ini, teks sasaran melepaskan diri dari bahasa sumber sehingga teks sasaran berbeda dengan teks sumber. Metode ini cenderung digunakan dalam penerjemahan teks informatif misalnya penerjemahan karya ilmiah.

Selain metode komunikatif, ada pula metode penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan ungkapan idiomatis dalam teks sumber ke dalam idiom dalam teks sasaran. Metode ini disebut metode penerjemahan idiomatis. Metode penerjemahan ini dapat pula diterapkan jika pesan dalam teks sumber dapat diungkapkan ke dalam idiom yang bermakna sama dalam teks sasaran. Selanjutnya, ada metode penerjemahan bebas, yaitu metode yang mengalihkan isi teks sumber ke dalam teks sasaran tanpa mempertahankan bentuk asli teks sumber (Newmark, 1988). Penerjemahan ini mengutamakan isi teks namun tidak mengutamakan bentuk teks sumber.

Dibandingkan semua metode di atas, terdapat metode penerjemahan yang paling bebas. Metode ini disebut saduran. Metode penerjemahan ini biasanya digunakan untuk drama, puisi, dan lain-lain. Dalam penerjemahan ini, budaya yang terkandung di dalam teks sumber diadaptasikan ke dalam budaya teks sasaran sehingga teks sumber ditulis kembali (disadur) ke dalam teks sasaran. Biasanya teks

sumber akan diterjemahkan literal terlebih dahulu, baru kemudian ditulis ulang dengan berbagai penyesuaian yang membuat teks sasaran terasa lebih hidup bagi pembacanya.

Dalam penerjemahan karya ilmiah ini, akan digunakan metode komunikatif. Metode ini sesuai untuk menerjemahkan teks yang mempunyai struktur yang kompleks seperti teks argumentasi ini, karena lebih menekankan pada keberterimaan teks sasaran bagi pembaca. Dalam penerjemahan komunikatif, makna dalam teks sumber teralihkan dengan baik ke dalam teks sasaran sehingga makna yang terkandung dalam teks sumber akan mudah dipahami pembaca teks sasaran. Saya memilih metode komunikatif untuk menerjemahkan sebagian besar isi teks ini. Akan tetapi, terdapat beberapa bagian yang membutuhkan metode penerjemahan idiomatis untuk menghasilkan terjemahan yang berterima. Penerjemahan ini menggunakan metode gabungan komunikatif dan idiomatis.

#### **2.4 Prosedur Penerjemahan**

Newmark (1988) menjelaskan perbedaan metode dan prosedur penerjemahan. Metode penerjemahan yang telah diuraikan di atas berhubungan dengan keseluruhan teks, sedangkan prosedur penerjemahan yang akan diuraikan di bawah ini digunakan untuk penerjemahan pada tataran kalimat atau unit bahasa yang lebih kecil. Berbeda dari Newmark, Baker (2011) menyebut prosedur sebagai strategi penerjemahan. Sedangkan Hoed (2008) menyebutnya sebagai teknik penerjemahan. Dalam penerjemahan teks ini, saya menggabungkan prosedur penerjemahan dari Newmark, strategi penerjemahan dari Baker, dan teknik penerjemahan dari Hoed, yaitu

##### **1. Transferensi**

Prosedur yang dikemukakan Newmark (1988) ini mempertahankan kata dalam TSu ke dalam TSa. Meskipun sebagian ahli penerjemahan tidak mengakui prosedur ini, Newmark menyamakan prosedur ini dengan prosedur transferensi yang sebelumnya pernah dikemukakan Catford. Vinay dan Darbelnet dalam Munday

(2001) menyebut prosedur ini dengan istilah *borrowing*. Sama halnya dengan Newmark yang menyebut kata yang dipertahankan sebagai kata pinjaman.

Contoh:

*Millenium Development Goal (MDGs) :: Millenium Development Goal (MDGs)*

## 2. Naturalisasi

Newmark (1988) menjelaskan bahwa prosedur penerjemahan naturalisasi dilakukan dengan cara mengadaptasikan kata bahasa sumber ke dalam pengucapan dalam bahasa sasaran. Penerjemah membuat kata baru yang diambil dari bunyi kata itu dalam bahasa sumber. Newmark menyebut prosedur penerjemahan ini sebagai naturalisasi sedangkan Hoed (2008) menyebutnya sebagai teknik penerjemahan fonologis. Hoed (2008) menjelaskan bahwa penerjemahan fonologis diterapkan dengan menyesuaikan bunyi kata dalam bahasa sumber ke dalam sistem bunyi dan ejaan bahasa sasaran.

Contoh:

*professionalisation :: profesionalisasi*

## 3. Penerjemahan kata demi kata (*through-translation/literal translation*)

Meskipun terdapat istilah *calque* ataupun *loan translation*, Newmark lebih memilih menggunakan istilah *through-translation* untuk mengacu pada penerjemahan kata demi kata. Menurut Newmark (1988), penerjemahan ini digunakan hanya untuk istilah yang sudah dikenal secara umum.

Contoh:

*a more democratic and engaged citizenry :: masyarakat yang lebih terlibat dan demokratis*

## 4. Transposisi

Newmark (1988) mengungkapkan suatu prosedur penerjemahan yang disebut transposisi, yang merupakan prosedur penerjemahan dengan mengubah struktur kalimat supaya mendapatkan terjemahan yang berterima. Contoh:

Yet, later documents seem to have ignored the studies and recommendations of the committee rather than building on their insights in order to identify appropriate research priorities (Von Kotze 2008)

Meskipun demikian, alih-alih membangun pemahaman mereka untuk mengidentifikasi prioritas penelitian yang sesuai, dokumen terbaru tampaknya cenderung mengabaikan kajian dan rekomendasi dari komite UNESCO (Von Kotze 2008)

#### 5. Parafrasa

Newmark (1988) menjelaskan parafrasa sebagai penjelasan makna suatu bagian dalam teks. Baker (2011) juga mengemukakan strategi parafrasa antara lain parafrasa menggunakan kata yang berhubungan dan parafrasa menggunakan kata yang tidak berhubungan

Contoh parafrasa adalah sebagai berikut

The belief that investment in personal development will generate quantifiable returns is so persistent that donors are not deterred even by a lack of reliable (or credible) figures on how the names on enrolment forms tally with **'bums on seat'** and with newly employed or self-employed people

Keyakinan bahwa investasi dalam pengembangan diri akan mendatangkan hasil yang dapat dihitung sedemikian kuatnya sehingga donatur bahkan tidak tergoyahkan oleh tidak adanya bukti yang dapat dipercaya mengenai kecocokan antara nama yang tercantum dalam formulir pendaftaran dengan **jumlah orang yang akhirnya duduk dalam kelas itu**, dan dengan jumlah pegawai ataupun wiraswasta baru.

Idiom *bums on seats* menunjuk pada jumlah kursi yang terjual. Dengan pemahaman konteks itu, prosedur parafrasa digunakan untuk mengeksplisitkan makna idiom Inggris *bums on seat* sebagai *jumlah orang yang akhirnya duduk dalam kelas itu*.

#### 6. Padanan Budaya

Newmark (1988) mengemukakan bahwa prosedur ini digunakan untuk memberikan padanan berupa unsur kebudayaan yang ada dalam BSa. Contoh:

*Technical Vocational Education and Training (TVET)* :: pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

TVET merupakan singkatan dari Technical and Vocational Education and Training yaitu lembaga pendidikan kejuruan di negara uni Eropa dan Australia yang menyiapkan siswa dengan berbagai keterampilan sehingga siap terjun ke dunia kerja. TVET diterjemahkan menjadi *pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja* yang juga membekali siswa dengan berbagai keterampilan siap kerja dalam sistem pendidikan Indonesia. Dari contoh di atas terlihat bahwa kata dalam TSu dicari padanan budayanya yang terdapat dalam bahasa sasaran. Prosedur ini membantu pembaca dalam memahami secara cepat kata/istilah budaya dalam bahasa sasaran.

#### 7. Padanan Deskriptif

Prosedur yang dikemukakan Newmark (1988) itu menuntut penerjemah untuk melakukan uraian yang berisi makna kata yang bersangkutan. Contoh:

*make a living* :: usaha mencari mata pencaharian

Penerjemahan *make a living* akan kehilangan makna apabila diterjemahkan sebagai *membuat hidup*. Oleh karena itu, penerjemah perlu memadankan kosa kata TSu itu dengan deskripsi yang sesuai dalam Bsa. Dalam terjemahan di atas, penerjemah menerjemahkan *make a living* dengan padanan deskriptif yaitu *usaha mencari mata pencaharian*.

#### 8. Penerjemahan Resmi/Baku



Newmark (1988) menyatakan bahwa dalam penerjemahan, adakalanya sudah ada istilah resmi yang digunakan. Jadi, terdapat istilah, nama, dan ungkapan yang sudah resmi atau baku dalam bahasa sasaran sehingga penerjemah langsung menggunakannya sebagai padanan. Contoh:

..... *food shortages as crops are turned into **biofuels***.... :: ....kekurangan bahan pangan menyusul hasil panen yang diubah menjadi **bahan bakar hayati** ...

*Biofuels* diterjemahkan menjadi *bahan bakar hayati* berdasarkan istilah resmi yang telah digunakan oleh praktisi biologi. Salah satu narasumber, Slamet Haryono, seorang praktisi biologi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga menegaskan bahwa penggunaan istilah *bahan bakar hayati* sebagai istilah resmi disiplin ilmu biologi berasal dari penerjemahan kata *bio* menjadi *hayati* (komunikasi pribadi, 6 Maret 2012). Selain itu, berdasarkan glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia (2008), *biofuels* diterjemahkan secara resmi menjadi *bahan bakar hayati*.

#### 9. Penjelasan tambahan

Nida & Taber (1974) menjelaskan bahwa supaya suatu kata dipahami oleh pembaca teks sasaran, maka terkadang penerjemah perlu memberikan kata khusus untuk menjelaskannya. Hoed (1988) memberikan contoh penggunaan prosedur ini untuk nama makanan atau minuman yang masih asing bagi pembaca sasaran, misalnya

She prefers **the Black Label** rather than the ordinary Johnny Walker :: Ia lebih suka **wiski Johnny Walker Black Label** daripada yang biasa.

Dari contoh di atas, terlihat bahwa penerjemah memberikan penjelasan tambahan dengan kata khusus (*wiski*) supaya pembaca teks sasaran memahami makna secara utuh.

## 10. Penerjemahan Metafora

Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language*, (2000), metafora atau *metaphor* adalah *a figure of speech in which a word or phrase that ordinarily designates one thing is used to designate another, thus making an implicit comparison*. Senada dengan definisi itu, menurut *Collins English Dictionary-Completed and Unabridged* (2003), *metaphor* adalah *a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action that it does not literally denote in order to imply a resemblance*. Sama halnya dengan Newmark (1988) yang mendefinisikan *metaphor* sebagai segala ekspresi figuratif. Ini meliputi personifikasi, idiom, peribahasa, dan lain sebagainya. Dalam penerjemahan metafora, penerjemah menggunakan penggambaran metaforis yang sepadan dalam bahasa Indonesia.

Dalam teks sumber, terdapat beberapa *metaphor* dalam bentuk idiom. Menurut Baker (2011), permasalahan yang dihadapi dalam penerjemahan idiom yaitu (1) idiom itu tidak memiliki idiom yang sama dalam bahasa sasaran, (2) idiom itu memiliki idiom yang serupa dalam bahasa sasaran namun berbeda konteks penggunaan dan konotasinya (3) idiom dalam teks sumber memiliki baik makna literal maupun makna idiomatis (4) perbedaan konvensi penggunaan idiom dalam wacana tertulis antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran dalam hal konteks dan frekuensi penggunaannya. Baker (2011) mengemukakan beberapa strategi penerjemahan idiom antara lain menggunakan idiom yang sama bentuk dan maknanya, menggunakan idiom yang sama makna namun berbeda bentuk, meminjam idiom bahasa sumber, menerjemahkan dengan parafrasa, dan menghilangkan sebagian atau keseluruhan idiom. Salah satu contoh penggunaan strategi dengan jalan menggunakan idiom yang sama makna namun berbeda bentuk yaitu:

*eating wild food with sticks* :: mengais pagi makan pagi, mengais siang makan siang

## 11. Modulasi

Newmark (1988) mengemukakan prosedur modulasi yang diambil dari Vinay dan Darbelnet. Newmark (1988) menjelaskan bahwa Vinay dan Darbelnet memunculkan istilah modulasi untuk menjelaskan prosedur penerjemahan yang melibatkan perubahan sudut pandang. Vinay & Darbelnet dalam Munday (1988) menyatakan modulasi sebagai prosedur penerjemahan yang memberikan pesan atau maksud yang sama tetapi secara semantis berbeda sudut pandang maknanya. Hoed (2008) menjelaskan bahwa modulasi adalah ketika penerjemah memberikan padanan yang secara semantik berbeda sudut pandang artinya atau cakupan maknanya, tetapi dalam konteks yang bersangkutan memberikan pesan/maksud yang sama.

Contoh:

*disadvantaged population* :: masyarakat pra sejahtera

## 12. Penghilangan Kata

Baker (2011) menjelaskan salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan ketidaksepadanan dalam tataran kata adalah dengan menggunakan strategi penghilangan kata. Baker (2011) mengemukakan bahwa meskipun strategi ini terdengar ekstrim, akan tetapi tidak masalah menghilangkan kata selama makna yang terkandung dalam kata itu bukanlah makna yang penting.

## 13. Penggunaan Kata yang Lebih Netral

Baker (2011) menjelaskan bahwa salah satu strategi dalam mengatasi ketidaksepadanan dalam tataran kata adalah dengan menerapkan strategi penerjemahan dengan kata yang lebih netral. Strategi ini diterapkan ketika kata dalam bahasa sumber tidak memiliki padanan kata yang sama dalam bahasa sasaran. Ada kemungkinan tidak ada kata khusus dalam kosa kata bahasa sasaran. Sebelumnya, Newmark (1988) mengemukakan prosedur penerjemahan dengan kata yang lebih netral sebagai prosedur padanan fungsional. Prosedur ini untuk diterapkan pada kata

budaya bahasa sumber yang memerlukan penggunaan kata yang netral atau umum dalam bahasa sasaran. Newmark menyatakan bahwa prosedur ini adalah prosedur yang paling akurat untuk menetralkan kata budaya meskipun terkadang menghilangkan komponen makna kata tertentu. Prosedur ini juga dapat digunakan ketika kata dalam bahasa sumber tidak memiliki padanan dalam bahasa sasaran. Prosedur ini terletak di area universal, yaitu area antara bahasa atau budaya dalam bahasa sumber dan bahasa atau budaya dalam bahasa sasaran.

Contoh di bawah ini adalah penggabungan strategi penghilangan kata yang dijelaskan di atas dengan strategi menggunakan kata yang lebih netral.

*serfdom and slavery* :: perbudakan

#### 14. Catatan kaki

Ada kalanya penerjemah perlu memberikan catatan kaki untuk memperjelas makna kata atau istilah dalam bahasa sasaran. Newmark (1988) mengemukakan bahwa penerjemah dapat memperjelas makna kata melalui informasi tambahan dalam bentuk catatan kaki. Informasi tambahan yang ditulis penerjemah ini berfungsi untuk melengkapi teks pada bagian yang dirasa kurang jelas. Contoh penggunaan prosedur catatan kaki dapat disimak dalam prosedur couplet di bawah ini.

#### 15. Couplet

Newmark (1988) menjelaskan couplet, triplet, dan quadruplets sebagai prosedur yang menggabungkan dua, tiga, atau empat prosedur penerjemahan untuk mencari sebuah padanan yang tepat.

Contoh:

*deskilling* :: peniadaan keterampilan (*catatan kaki: istilah “peniadaan keterampilan” dimungkinkan dengan memecah pekerjaan sedemikian rupa sehingga keterampilan yang dimiliki oleh pekerja itu menjadi sangat sempit dan dangkal sehingga jika pekerja itu dipindahkan ke konteks yang lain, keterampilan itu tidak*

*ada gunanya. Hal ini diperjelas dengan contoh dari About.com (2012), peniadaan keterampilan bermakna tiap pekerja berfokus pada tugas yang sangat sempit yang tidak membutuhkan pelatihan. Akibatnya, para pekerja dewasa ini sangat mudah digantikan).*

Contoh di atas mendemonstrasikan penggunaan prosedur couplet dengan menggabungkan penerjemahan resmi yaitu penerjemahan *deskilling* sebagai *peniadaan keterampilan*, dengan catatan kaki untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah peniadaan keterampilan dalam konteks itu.

## **2.5 Etik Penerjemahan**

Penerjemah haruslah seseorang yang memiliki etik. Baker (2011) menyatakan perlunya penerjemah mengembangkan keterampilan kritis untuk membuat suatu keputusan etis. Keputusan etis dalam penerjemahan berhubungan dengan dampak penerjemahan itu bagi pembacanya. Penerjemah harus berusaha memperhatikan layak tidaknya suatu informasi dalam TSu diterjemahkan sepenuhnya ke dalam TSa. Hal ini penting supaya terjemahan tidak berdampak buruk pada pembaca sasaran. Dalam hal ini, penerjemah harus menyadari bahwa terdapat nilai dalam budaya TSu yang mungkin saja berbeda dengan nilai yang dianut oleh pembaca TsA. Oleh karena itu, penerjemah harus beretik dalam menerjemahkan segala macam informasi. Penerjemah harus mempertimbangkan dampak terjemahan pada pembaca sasaran supaya mengambil keputusan etis dalam penerjemahan.

Bab tentang kerangka teori ini dilanjutkan dengan Bab 3 yang berisi teks sasaran, Bab 4 yang berisi teks sumber, Bab 5 yang berisi anotasi, dan Bab 6 yang berisi kesimpulan. Bab selanjutnya yang berisi teks sasaran, anotasi, dan kesimpulan secara tidak langsung menunjukkan hasil penerapan teori yang dijabarkan dalam bab ini.

## BAB 3

### TEKS SASARAN

#### 1. Bedah pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat: Sebuah Pendekatan Feminisme aliran marxis Shahrzad Mojab

##### Pendahuluan

[1] Bukan suatu tugas yang mudah untuk memikirkan dua konsep yaitu “pekerjaan” dan “pembelajaran sepanjang hayat”, dan cara dan metode yang merupakan titik temu, titik pertentangan, atau titik yang selaras antara kedua hal tersebut. Bahkan lebih mengecilkkan hati untuk mencoba pendekatan feminisme aliran marxis, yang memiliki minat khusus baik pada pekerjaan maupun pembelajaran. Setidaknya, terdapat dua kendala. Pertama adalah proliferasi kepustakaan tentang pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat, yang beragam baik secara teoretis maupun metodologis, dengan banyak meminjam dari pengetahuan berdasarkan disiplin ilmu seperti sosiologi dan psikologi, dan terlebih lagi dari pengetahuan berbasis ilmu interdisipliner, seperti kajian wanita dan pendidikan orang dewasa. Tidak mungkin membahas secara kritis keseluruhan pengetahuan itu dalam bab ini. Oleh karena itu, saya akan memposisikan sikap kritis sebagai titik tolak teoretis. Hambatan kedua adalah permusuhan intelektual sengit dengan analisis marxis, khususnya feminisme aliran marxis, dan pernyataan bahwa cara analisis itu tidak relevan dan ketinggalan zaman. Dua situasi itu terkait secara erat dalam arti bahwa pengesampingan perspektif radikal, kritis dan revolusioner disamarkan dalam keragaman pendekatan disiplin ilmu dan wilayah kajian untuk bidang pekerjaan dan

pemelajaran. Dalam konteks yang rumit inilah saya bertolak dalam perjalanan pencarian diri mengenai relasi intelektual saya dengan topik ini, yang tidak mudah dan tidak konsisten, dan bahkan ada saatnya hal ini ambivalen dan menimbulkan kekhawatiran.

[2] Dalam bab ini saya meletakkan analisis hubungan antara pekerjaan dan pemelajaran sepanjang hayat dalam pemahaman tatanan dunia saat ini dari sudut pandang historis dan materialis. Dari perspektif ini, kapitalisme yang berkembang secara tidak merata di seluruh dunia adalah logika yang berdasarkan kebendaan dalam kehidupan sosial dan membentuk cara orang hidup, belajar, bekerja, berhubungan dan berpikir. Tenaga kerja dan modal, bagian inti dalam tatanan dunia saat ini, hidup berdampingan dalam kesatuan dan konflik. Namun, ada kontradiksi antara keduanya, yang telah membentuk persaingan politis dan ideologis dalam bidang pendidikan orang dewasa.

[3] Tidak sulit untuk melihat dalam berita harian bahwa transformasi struktural yang sedang berlangsung dalam kapitalisme, misalnya, putaran arus globalisasi dewasa ini – telah memperburuk alih-alih mengubah sifat kontradiksi antara tenaga kerja dan modal. Observasi ini menantang pernyataan bahwa dengan kemunculan teknologi komunikasi atau tenaga kerja berorientasi layanan yang fleksibel dan mudah bergerak, praktik produksi dan hubungan kapitalis telah berubah secara fundamental dan bertransformasi secara radikal. Namun, kekhasan kapitalisme dewasa ini, yaitu globalisasi sebagai imperialisme, tidak dapat diabaikan. Pada tatanan imperialis tingkat tinggi, kapitalisme dewasa ini, sama halnya dengan di masa lalu, menggabungkan kebutuhan untuk melintasi perbatasan nasional (dengan tujuan “perdagangan bebas”) dengan desakan untuk mempertahankan ranah pengaruh dan bahkan bentuk baru kolonisasi melalui perang dan pendudukan. Selain dilonggarkan untuk memperlancar aliran komoditas, perbatasan juga diperketat untuk menyaring pekerja imigran dan pengungsi yang tidak dikehendaki. Perbatasan dalam Uni Eropa memang telah runtuh dengan cara yang belum pernah terjadi, tetapi benua itu telah muncul sebagai “Benteng Eropa”. Benua itu menutup pintu bagi pendatang yang

mencari penghidupan lebih layak (pencari kerja) dan pengungsi dari berbagai negara Afrika dan Asia. Demikian pula, Australia, Kanada, AS dan negara Barat lain telah memperketat perbatasan mereka. Sementara itu, pengawasan terhadap warga negara yang ditingkatkan dengan teknologi baru. Teknologi itu hadir dalam dimensi yang belum pernah terjadi. Negara kapitalis yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai negara “demokrasi liberal” telah berubah menjadi negara “keamanan nasional”. Kesenjangan antara kaya dan miskin telah berkembang di seluruh dunia, dan bentuk baru perbudakan telah muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Bales 2005). Perdagangan perempuan dan anak, perang, kemiskinan, perusakan lingkungan, dan pemanasan global menjadi ancaman nyata bagi kesejahteraan manusia dan semua spesies lain. Di tengah kekacauan tatanan sistem dunia, AS, sebagai kekuatan ekonomi terbesar, mampu mempersiapkan dan menggerakkan perang (di Afghanistan dan Irak) dan membentuk kebijakan dalam badan internasional utama seperti G8, Bank Dunia, IMF, dan UNESCO dan badan PBB lain. Sementara AS dapat dilihat sebagai kekuatan imperialis yang mengalami penurunan, seperti yang dialami Inggris dan Prancis dengan Perang Dunia II, hegemoninya juga dapat tertantang oleh kemunculan saingan imperialis seperti India, Cina dan Rusia.

[4] Tujuan saya dalam bab ini adalah untuk terlibat dalam perdebatan skala luas mengenai pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam momen sejarah spesifik ini. Pengetahuan ini terletak di dalam apa yang dikenal sebagai “demokrasi negara Barat” meskipun pemikiran kritis yang sama ditemukan di seluruh dunia. Untuk menyusun pemikiran, saya menyetengahkan “tiga observasi” dan kemudian mengusulkan “tiga konsep” sebagai cara untuk mendorong pemikiran kita ke depan. Saya berharap bahwa melalui proses interogasi dan pencarian diri dengan pendekatan feminisme aliran marxis ini, saya akan mampu memprakarsai pembaharuan pemikiran radikal/kritis pada hubungan/pemutusan hubungan atau resonansi/disonansi antara pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat.



### **Tiga observasi**

[5] *Observasi 1: Pemelajaran sepanjang hayat adalah konsep yang masih diperdebatkan.* Berdasarkan kepustakaan yang saya baca, pemelajaran sepanjang hayat digunakan dalam dua cara. Pertama, pemelajaran sepanjang hayat adalah sebuah konsep sentral dalam klaim hegemonik bahwa tiadanya keterampilan menyebabkan pengangguran. Hal ini mengandaikan bahwa pelatihan kembali yang terus-menerus mempersiapkan pekerja untuk mampu beradaptasi dan selalu siap untuk memperoleh keterampilan baru sebagaimana ditentukan oleh kebutuhan kapital. Kedua, pemelajaran sepanjang hayat telah tertata sebagai konsep ideologis dalam dua cara: pertama, yang secara intrinsik terkait dengan pokok sebelumnya, bahwa konsep itu telah menjadi distraksi ideologis yang menggeser beban peningkatan kemampuan beradaptasi pada pekerja. Kedua, pada saat yang sama ada secercah harapan untuk menuju masyarakat yang lebih terlibat dan demokratis. Individu mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan diri mereka warga negara yang lebih baik dengan berpartisipasi penuh dalam demokrasi. Konsepsi ideologi pemelajaran sepanjang hayat ini merupakan inti dari artikulasi neo-liberal mengenai hubungan antara pendidikan/pemelajaran/pelatihan/pengasahan keterampilan dan upaya mencapai demokrasi liberal.

[6] Meskipun terdapat ledakan pengetahuan tentang pemelajaran sepanjang hayat, saya masih menganggap bahwa kritik itu adalah kritik yang paling komprehensif terhadap konsep itu dalam artikel penting karya Frank Coffield “Breaking the consensus: Lifelong learning as social control” (Coffield 1999). Coffield menyatakan bahwa lepas dari segala perdebatan, terdapat konsensus yang telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun terakhir ini. Konsensus ini menyatakan bahwa pemelajaran sepanjang hayat secara mandiri akan dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, sosial dan politik. Dia menyatakan bahwa konsensus ini naif, terbatas, tidak lengkap, berbahaya dan merupakan pengalih perhatian. Coffield bertanya: “Jika konsep itu begitu lemah, mengapa menjadi begitu populer?” (1999:479). Dia memberi jawaban dengan argumentasi bahwa konsep itu “melegitimasi peningkatan

pengeluaran untuk pendidikan”, “menyediakan dalih pembenaran tindakan para politisi”, “mengalihkan perhatian dari perlunya reformasi ekonomi dan sosial”, dan “menawarkan ilusi yang menenteramkan bahwa dalam setiap masalah yang kompleks, ada satu solusi sederhana” (1999:486). Dia menyebut ini sebagai respon kebijakan atas permintaan pasar terhadap “emansipasi wajib” melalui pemelajaran sepanjang hayat (1999:489). Meskipun demikian, usulan alternatif Coffield dibingkai dalam gagasan demokrasi liberal yang menghindari analisis yang lebih dalam mengenai hubungan kekuasaan kapitalis. Penting untuk dicatat bahwa kritik yang sama telah dikemukakan oleh Ivar Berg dua dekade sebelumnya (Breg 1970).

[7] Adanya perdebatan ini, dalam pandangan saya, tidak menghilangkan relevansi “pemelajaran sepanjang hayat” sebagai suatu kebijakan dan praktik. Ini adalah sifat argumen yang konsepnya masih belum jelas, yang tidak cukup muncul dalam keputakaan. Ini terkait dengan observasi saya yang ke dua:

[8] *Observasi 2: Kepustakaan yang ada menyediakan sebuah “kritik”, tanpa “bersikap kritis” terhadap kebijakan dan praktik pemelajaran sepanjang hayat dan implikasinya terhadap pekerjaan, pelatihan dan pendidikan orang dewasa. Saya meminjam istilah Teresa Ebert (1996) mengenai perbedaan antara “kritik” sebagai proses deskriptif dan bersikap “kritis” sebagai sebuah analisis untuk mengadakan perubahan. Ada cukup banyak keputakaan mengenai pemelajaran sepanjang hayat yang menyediakan sebuah “kritik” terhadap kapitalisme. Meskipun keputakaan itu tidak menyediakan alat “kritis” untuk melakukan analisis yang teliti terhadap tautan ideologis antara pemelajaran sepanjang hayat dan cara kapitalis dalam eksploitasi tenaga kerja, keputakaan itu penting dalam memahami hubungan antara pendidikan orang dewasa dan hubungan sosial kapitalis. Pendidik orang dewasa telah mempertanyakan proses produksi pengetahuan dan konsepsi pengetahuan sebagai suatu objek yang memiliki proposisi yang sama dengan yang digunakan dalam penjelasan komoditas. Keterlibatan ini termanifestasikan dengan baik dalam kritik terhadap teori modal manusia. Argumen utama dari teori modal manusia berkisar pada hubungan positif dan langsung antara pencapaian pengetahuan dan*

keterampilan, serta status sosial, dan mobilitas. Teori ini mengasumsikan bahwa semakin lama pendidikan dan pelatihan pasti mendapatkan pekerjaan dengan status yang lebih tinggi dan semakin banyak gajinya. Oleh karena itu, ekonomi pasar yang semakin luas tidak hanya membutuhkan ketersediaan modal ekonomi tetapi juga modal manusia dalam bentuk tenaga kerja yang terdidik dan terlatih dengan baik, fleksibel dan terampil. Dalam teori modal manusia, pengetahuan adalah obyek yang tidak berubah, tidak bermasalah, tidak berhubungan dengan manusia, yang dimiliki oleh sebagian orang dan diberikan kepada orang lain.

[9] “Kritik” terhadap teori modal manusia mengarahkan kita pada wacana oposisi mengenai pendidikan orang dewasa dan pemelajaran, tetapi posisi teoretis ini mengaburkan hubungan antara modal dan tenaga kerja. Ebert berpendapat bahwa jenis analisis ini akan memperlihatkan efek fenomena sosial (pelatihan/pemelajaran) dan akan “menghilangkan makna materialis kelas sebagai hubungan kepemilikan dan eksploitasi” (Ebert & Zavarzadeh 2008: xiv). Perspektif yang beragam yang ditemukan dalam teori modal manusia menyatu dalam pandangan mereka bahwa ada sebuah desakan atas perbaikan di dalam sistem kapitalisme untuk mereformasinya.

[10] Pendekatan reformis menghendaki reorganisasi pendidikan orang dewasa menjadi pelatihan dan peningkatan keterampilan bisnis yang sepenuhnya responsif terhadap ketentuan pasar. Meskipun visi tentang tujuan dan arah pendidikan orang dewasa bersifat beragam dan sulit untuk disintesis, saya akan memfokuskan pada perbedaan pandangan yang signifikan antar para pendidik orang dewasa. Perbedaan pandangan ini tampaknya lebih pada hubungan antara pendidikan dan ekonomi atau pekerjaan dan pemelajaran. Akan tetapi, pada dasarnya perbedaan pandangan teoretis dan praktis tersebut menyangkut posisi manusia dalam ekonomi yang bergeser dan berubah secara cepat ini. Dengan kata lain, perbedaan pendapat ini menyangkut posisi dan perjuangan kelas. Dalam perekonomian ini, tenaga kerja diharapkan untuk mudah beradaptasi, fleksibel dan mampu menyediakan keterampilan yang dituntut oleh pasar yang senantiasa bergerak mengikuti modal yang selalu mencari peluang yang lebih menguntungkan. Tenaga kerja, yaitu sebagian besar orang, terutama di belahan bumi

Selatan, menjadi bagian yang sewaktu-waktu dapat disingkirkan. Tidak sulit untuk menyadari bahwa pemilik modal selalu menemukan tenaga kerja murah yang dibutuhkan. Akan tetapi, hanya ketika pemilik modal membutuhkan keterampilan kerja dan tingkat pendidikan tertentu, maka baru terjadi usaha untuk berinvestasi pada peningkatan mutu, pengasahan keterampilan, dan pelatihan kembali bagi pekerja.

[11] *Observasi 3: Salah satu hasil dari kabut konseptual dan teoretis dalam meneliti pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat adalah normalisasi kapitalisme.* Sejauh ini, saya berargumentasi bahwa “kritik” deskriptif terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan pekerjaan menyembunyikan hubungan kapitalis dalam pembelajaran sepanjang hayat dan pekerjaan. Pembelajaran sepanjang hayat dalam analisis “kritis” akan diinterpretasikan sebagai logika modal. Dengan kata lain, eksploitasi kapitalis terhadap tenaga kerja menghasilkan kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Kebijakan yang memperhatikan tenaga kerja terampil dan kebutuhan akan pelatihan/pelatihan kembali merupakan respon kapitalis terhadap logikanya sendiri. Mengubah pekerja menjadi “orang atau warga negara yang selalu belajar” konsisten dengan politik kewarganegaraan dalam demokrasi liberal.

[12] Di Kanada, terdapat sebuah situs akademik penting mengenai pembelajaran sepanjang hayat yang berfokus pada perempuan imigran. Saya akan menggunakan karya itu untuk menggambarkan konsep “normalisasi” hubungan kapitalis dalam kepustakaan tentang pembelajaran sepanjang hayat dan pekerjaan. Penelitian mengenai perempuan imigran dan pekerjaan telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dapat dipercaya, yang melintasi batas-batas disiplin ilmu dan merangkul persaingan perspektif teoretis dan metodologis. Kumpulan kepustakaan itu dikonsolidasikan di seputar tema-tema berikut: akses/fasilitas, pelatihan/pengasahan keterampilan dan penggolongan pekerjaan, yaitu: prevalensi perempuan imigran dalam pekerjaan pelayanan, pekerjaan tidak tetap, dan bekerja dari rumah. Saya berargumentasi bahwa topik ini sudah terlalu banyak dibahas dalam spektrum perspektif teoretis yang berbeda. Saya juga berargumentasi bahwa mempelajari berbagai latar pekerjaan, komunitas imigran yang beragam atau berbagai wilayah di dunia tidak akan secara

signifikan menambah pengetahuan kita dalam memahami apa yang membentuk kontradiksi mendasar dalam pengesampingan, diskriminasi, atau marjinalisasi perempuan imigran dalam ekonomi pasar. Wacana dominan itu tidak lebih daripada suatu interpretasi liberal–kapitalis terhadap eksploitasi tenaga kerja dalam teori marxis yang sengaja dibuat membingungkan dan sukar dipahami. Memang, konsep seperti “akses”, “fasilitas”, “marjinalisasi”, “diskriminasi” atau “pengesampingan” hanyalah pengkerangkaan ulang eksploitasi ke dalam preferensi hukum, administratif, manajerial, moral atau budaya, dan membatasi pemahaman kita tentang dinamika eksploitasi dalam formasi ekonomi dan sosial kapitalis. Bagaimana dengan penggolongan tenaga kerja berdasarkan ras, jenis kelamin, dan negara, yang meningkatkan kemungkinan eksploitasi sektor tenaga kerja yang rentan? Apakah ini hanyalah keadaan yang sengaja dibuat membingungkan dan sukar dipahami, atau modalitas yang dipakai untuk mencapai eksploitasi?

[13] Dalam konteks Kanada, dua dekade terakhir merupakan saat penting dalam menciptakan kumpulan pengetahuan yang dapat dipercaya, yang melintasi batas disiplin ilmu dalam menjelaskan, menganalisis, dan mengusulkan perubahan dalam rangka meningkatkan akses, fasilitas, inklusi, kondisi kerja dan status kerja perempuan kulit berwarna dan imigran perempuan di tempat kerja dan pasar tenaga kerja. Pekerjaan perempuan imigran telah menjadi fokus bidang ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pesat ini. Dalam dekade terakhir ini, di institusi saya (*University of Toronto*) saja, sekitar 50 tesis magister dan disertasi doktoral telah mengangkat tema seputar perempuan imigran yang datang ke Kanada, bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan dan proses yang menentukan pekerjaan yang mereka dapatkan. Kami telah meneliti pengalaman sebelumnya dan kompetensi pembelajaran para perempuan itu. Kami juga menilai jenis keterampilan yang mereka peroleh. Kami juga telah memeriksa proses budaya yang menahan mereka dalam sektor tertentu di pasar tenaga kerja, dan mempelajari kebutuhan pembelajaran yang ditentukan oleh penempatan sosial.

[14] Kepustakaan akademik di atas juga telah mengembangkan serangkaian istilah yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi berbagai kecenderungan, struktur dan hubungan sosial. Misalnya, marjinalisasi, akses/fasilitas, diskriminasi dan pengesampingan, rasisme dan seksisme memungkinkan kita untuk meneliti secara kritis kondisi ketika tenaga kerja tipe tertentu *tetap bertahan sebagai* tenaga kerja tipe tertentu. Beberapa tulisan ilmiah itu telah menggunakan kerangka kerja yang menilai perempuan imigran, para profesional, dan menentukan kebutuhan perempuan imigran dengan mengusulkan bagaimana kita dapat membuat mereka lebih menyerupai kelompok profesional. Saya berargumentasi bahwa isu seputar “profesionalisasi” dan “akreditasi”, telah merebut imajinasi pengambil kebijakan, politisi, dan mereka yang mengadvokasi dan mewakili konstituen imigran, lebih daripada masalah lain yang muncul dari kepustakaan ini. Respon mereka berupa pendanaan organisasi, terkadang khusus untuk etnis tertentu, atau lembaga yang berorientasi pada pelayanan khusus profesi tertentu.

[15] Menelusuri lintasan intelektual dan epistemologis saya sendiri dalam memahami fenomena sosial ini, saya telah memperhatikan bahwa sejauh ini saya hanya mampu memberikan penjelasan parsial dan mengungkapkan munculnya sebuah fenomena sosial yang kompleks. Akan tetapi, tetapi saya belum mampu mengungkapkan esensinya. Dalam beberapa dekade dewasa ini, dengan percepatan agenda neo liberal global, yang mencakup perang, militerisasi, pendesakan, peningkatan pergerakan penduduk dan kebijakan imigrasi baru, serangkaian perubahan penting telah terjadi pada ketenagakerjaan. Salah satu perubahan itu adalah hierarki ketenagakerjaan yang lebih lanjut. Proses yang kompleks ini terjadi, pertama, melalui penciptaan tenaga kerja yang sangat berspesialisasi untuk melayani tuntutan “ekonomi pengetahuan”. Kedua, melalui penataan tenaga kerja tidak tetap, fleksibel, dikorbankan, menjadi bagian yang sewaktu-waktu dapat disingkirkan, dan dapat tergantikan, dalam rangka terlibat dalam pergeseran dan bentuk hubungan produksi yang mudah bergerak, tersebar, dan lebih rawan, yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi dan kecepatan aliran modal elektronik. Untuk menjelaskan posisi perempuan imigran

dalam hierarki ini, saya memberikan kontribusi pada perdebatan tentang “pengasahan keterampilan”, “peniadaan keterampilan<sup>1</sup>” dan “pelatihan ulang keterampilan” bagi perempuan imigran. Saya juga melihat bagaimana “pemelajaran” sepanjang hayat yang terkait dengan perempuan kulit berwarna, menjadi “pelatihan” sepanjang hayat dalam perumusan kebijakan dan praktik (Mojab 2000). Saya menyimpulkan berdasarkan penelitian lapangan terhadap lebih dari 80 perempuan imigran, bahwa mubazirnya tenaga kerja terampil bersifat endemik terhadap dinamika ekonomi kapitalis.

[16] Singkatnya, kepustakaan tentang pemelajaran sepanjang hayat dan pekerjaan sering menormalkan cara produksi dan reproduksi kapitalis. Oleh karena itu, kepustakaan ini gagal untuk menganalisis kontradiksi modal/tenaga kerja, terutama eksploitasi berdasarkan ras dan gender, sebagai sumber atau penyebab kapitalisme, daripada sekedar efeknya. Berdasarkan pengamatan ini, saya ingin mengusulkan tiga konsep berikut.

### **Tiga Konsep**

[17] *Konsep 1: Setiap teori yang memadai tentang pekerjaan, pemelajaran, dan pemelajaran sepanjang hayat harus memberikan perhatian yang setara terhadap hubungan produksi yang kompleks dalam lingkup kapitalisme.* Pemahaman kita tentang pekerjaan, terutama pekerjaan perempuan, terus dikaburkan oleh kerangka kerja konseptual dan teoretis yang menampilkan pengorganisasian masyarakat kapitalis sebagai tatanan alamiah yang dapat disempurnakan tetapi tidak pernah tergantikan. Seperti yang telah dibahas di atas, kepustakaan yang agak luas mengenai topik itu diisi dengan konsep yang tampaknya memberikan wawasan radikal mengenai dinamika kerja. Misalnya, konsep marjinalisasi, diskriminasi atau

---

<sup>1</sup> istilah “peniadaan keterampilan” dimungkinkan dengan memecah pekerjaan sedemikian rupa sehingga keterampilan yang dimiliki oleh pekerja itu menjadi sangat sempit dan dangkal sehingga jika pekerja itu dipindahkan ke konteks yang lain, keterampilan itu tidak ada gunanya. Hal ini diperjelas dengan contoh dari About.com (2012), peniadaan keterampilan bermakna tiap pekerja berfokus pada tugas yang sangat sempit yang tidak membutuhkan pelatihan. Akibatnya, para pekerja dewasa ini sangat mudah digantikan.

pengesampingan memberikan arah kritis pada pemahaman kita. Namun, alih-alih mengungkapkan, konsep itu justru mengaburkan sebuah hubungan sosial yang sangat penting antara modal dan tenaga kerja, yaitu “eksploitasi”. Konsep seperti “akses”, “fasilitas” dan “inklusi” menyediakan obat mujarab bagi aspek hubungan modal dan tenaga kerja yang semakin tidak manusiawi. Akan tetapi, konsep itu gagal mencari alternatif yang sistemik untuk hal itu.

[18] Teori sosial, terutama sejak proklamasi “akhir sejarah”, menghindar dari konsep dan ide perubahan sistem. Sebagai contoh, sekarang ini orang dapat membuat konsep hubungan antara tenaga kerja dan modal dengan cara apapun yang bisa dibayangkan kecuali dalam hal eksploitasi, alienasi atau kerangka konseptual yang mengarahkan pikiran kita menuju ranah alternatif terhadap kapitalisme. Kita dituntun untuk percaya bahwa kemakmuran kapitalis diciptakan lepas dari tenaga kerja. Dorothy Smith meletakkan dasar untuk mempelajari kompleksitas ini secara teliti, yang penting untuk diungkapkan secara panjang lebar di sini yaitu

Penting untuk menjaga makna kapitalisme sebagai sebuah proses yang dinamis secara esensial, yang secara terus-menerus mentransformasi “ pijakan ” tempat kita berdiri sehingga kita mengalami proses perubahan sejarah secara terus-menerus. Salah satu masalah dalam strategi dunia intelektual adalah kategori dan konsep itu cenderung menampilkan aktualitas sebagai sesuatu yang tampaknya tidak berubah. Kita harus menghindar menganggap apa yang ditemukan itu sebagai sesuatu yang tetap. Kita harus mencoba menemukan bagaimana melihat masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak. Masyarakat, dalam momen apa pun, adalah produk proses sejarah, sebuah proses yang tidak pernah “selesai” pada saat tertentu. Berbagai “impuls” yang dihasilkan oleh proses kapitalisme yang dinamis secara esensial tidak mengandalkan penyelesaian mereka sendiri atau pun mengandalkan usaha menuju ke titik keseimbangan interaksi yang sistematis. Proses perubahan itu sendiri berlangsung secara terus-menerus dan kita hanya dapat menangkap sebuah penggalan sementara dari suatu proses yang terus bergerak. Untuk



memahami sifat, gerakan, “struktur” masa kini, kita harus mampu menguraikan alur pembangunan yang menentukan karakter dan hubungan masa kini dalam kapitalisme Barat. (Smith 1985:7– 8)

[19] Ini adalah pedoman kerangka analitis yang saya identifikasi sebagai feminisme aliran marxis. Sebuah kerangka kerja yang feminis, materialis–historis, dialektis dan kritis menuntun kita untuk mengajukan empat pertanyaan utama: Mengapa konsep pembelajaran sepanjang hayat justru muncul pada momen ini? Bagaimana pekerjaan dan pembelajaran berhubungan dengan cara produksi kapitalis? Apa saja kontradiksi dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat? Bagaimana kita dapat mengungkap hubungan sosial pekerjaan dan pembelajaran yang tidak terlihat di permukaan? Dengan kata lain, apa sebenarnya di dalam hubungan produksi dewasa ini yang menimbulkan kepedulian terhadap pelatihan dan pembelajaran sepanjang hayat?

[20] *Konsep 2: Konsepsi dialektika feminisme aliran marxis tentang pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat adalah mode analisis yang paling produktif untuk menganalisis pekerjaan perempuan imigran.* Dengan menggunakan konsepsi dialektika feminisme aliran marxis terhadap pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat, kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi memengaruhi perempuan kelas kulit berwarna, ras, seksualitas, atau gender, dan seluruh subjektivitas mereka. Perempuan imigran “terpinggirkan” oleh modal, dan kita sekarang dapat melihat bahwa “marjinalisasi” mereka bukan merupakan produk struktur tidak tetap, seperti misalnya *call center*. Marjinalisasi ini bersifat konstitutif dan diperlukan oleh hubungan kapitalis. Kami mempelajari perempuan dan memahami apa yang dialami kelompok perempuan kulit berwarna yang terpinggirkan, misalnya kurangnya pelatihan bagi mereka. Kami bahkan dapat mengembangkan metode dan program yang memfasilitasi pergerakan perempuan tertentu dari pekerjaan pinggiran ke pekerjaan profesional, tetapi kami tidak dapat membantu meningkatkan status pekerjaan mereka yang tidak tetap.

[21] Kepustakaan terkini tentang perempuan imigran dan pekerjaan menggambarkan posisi mereka dalam pasar tenaga kerja secara lebih terinci. Penelitian ini sangat berguna dalam menggambarkan hambatan yang mengunci mereka ke dalam pekerjaan yang terpinggirkan atau pekerjaan tidak tetap, seperti masalah bahasa, kurangnya akreditasi yang diakui dan kurangnya akses mendapatkan pekerjaan profesional. Selain itu, kepustakaan yang bersikap kritis ini menyangkut masalah globalisasi, termasuk produksi lepas pantai, pengolahan zona pasar bebas, dan tenaga kerja murah. Kepustakaan ini menggambarkan bagaimana kebijakan imigrasi saat ini merupakan hasil dari perencanaan tenaga kerja yang berakar pada ideologi kolonialis. Kami dapat menyatakan bahwa kepustakaan itu telah mengembangkan pemahaman yang cukup mendalam tentang bagaimana ras dan gender membangun posisi permasalahan yang menyangkut globalisasi maupun pasar tenaga kerja secara keseluruhan.

[22] Bagaimanapun juga, masih ada yang kurang yaitu upaya untuk mengintegrasikan analisis ras, gender, dan kelas dalam pemaknaan dialektis marxis dengan pemelajaran sepanjang hayat, pekerjaan, dan pendidikan orang dewasa. Kepustakaan mengenai kritik terhadap hubungan kapitalis telah tersedia. Akan tetapi, kepustakaan yang tersedia masih teramat dangkal karena melihat hubungan kapitalis sebagai sesuatu yang dapat dianalisis secara terpisah dan tidak melihatnya sebagai konteks yang menghasilkan jurang pemisah dan kebijakan yang sedang diteliti, subyek itu sendiri, dan penelitian kami terhadap hal itu. Dengan mengesampingkan hubungan modal, atau yang dengan memperlakukan mereka sebagai kekuatan di antara yang lain, kepustakaan ini tidak banyak memberi sumbangan kecuali menjelaskan munculnya kekuatan itu. Kami terlalu menyederhanakan masalah tersebut sehingga penelitian ini menyajikan gambaran yang menggambarkan perbaikan untuk memperbaiki posisi perempuan imigran itu diperlukan tidak lebih dari perubahan kebijakan mengenai tenaga kerja, pemelajaran dan pekerjaan, dan alokasi pendanaan. Akan tetapi, kehidupan perempuan imigran bukanlah hal abnormal yang dihasilkan oleh kebijakan yang tidak memadai. Akan tetapi, kebijakan

ini diadopsi untuk menghasilkan kondisi tempat modal dapat berkembang dengan mengorbankan tenaga kerja

[23] Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kumpulan kepustakaan akademis di bidang pendidikan orang dewasa tidak menghasilkan perubahan yang jelas baik dalam kebijakan negara maupun kebijakan perusahaan, atau dalam situasi perempuan imigran itu sendiri. Sebaliknya, apa yang telah kami ciptakan adalah serangkaian struktur, organisasi dan kebijakan yang berkisar pada masalah “akses” pada pekerjaan, pendidikan atau pelatihan, yang kesemuanya itu bertindak sebagai lapisan tambahan kontrol birokrasi, dan memungkinkan eksploitasi lebih lanjut terhadap perempuan imigran dalam bentuk beban biaya dan waktu, tanpa memberikan hasil yang jelas. Dengan jenis analisis yang saya usulkan, yang berfokus pada konsep eksploitasi gender dan ras, kita dapat melihat bahwa konsep ini sengaja dibangun untuk memerangi efek kekuatan yang lain. Sama halnya dengan kekuatan kapitalis yang menghasilkan dampak negatif itu. Dewasa ini, perempuan imigran tidak hanya terasing dari hasil kerja dan pengetahuan mereka sendiri, tetapi juga terasing dari kemungkinan (“akses”) yang disediakan oleh kekuatan tenaga kerja yang dan bersifat komersial dan dapat dipertukarkan.

[24] *Konsep 3: Jika kita merelokasi dan membaca ulang kepustakaan tentang pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks perang, pendudukan, militerisme, kemiskinan, dan budaya patriarki, serangkaian hubungan kontradiktif baru akan muncul antara pembelajaran seumur hidup dan pekerjaan. Saya mulai dengan menyatakan yang sudah jelas: pembelajaran sepanjang hayat adalah konsep yang masih sangat diperdebatkan. Sekarang saya mengusulkan untuk memperkeruh air yang sudah keruh ini dengan mendislokasikan kerangka pedagogis, teoretis dan politis ke situs perang, pendudukan, pendesakan, dan pencabutan hak milik. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa benang merah adalah temuan “hidup dalam transisi” universal sebagai cara berada dan belajar. Perempuan yang mengalami realitas kekerasan jatuh di luar jangkauan kebijakan pembelajaran sepanjang hayat, pedagogi, praktik, dan teorisasi. Mereka adalah perempuan yang sedang atau telah*

dikesampingkan secara historis sehingga tidak dapat menjadi pemelajar dewasa. Akan tetapi, di samping itu, pemelajaran yang terjadi lepas dari pengesampingan ini. Helen Colley yang menggunakan hasil penelitian saya dan analisis kehidupan dan perjuangan perempuan Kurdi, menyimpulkan bahwa “satu pelajaran yang harus kita ambil dari studi seperti ini tentang perempuan Kurdi adalah bahwa kita mungkin perlu mencurahkan perhatian lebih lanjut untuk pemelajaran yang berhubungan dengan kesadaran, perlawanan, dan perjuangan kolektif dan untuk transisi pelajaran kehidupan yang terkait dengan pemelajaran itu jika hubungan kekuasaan itu harus ditantang atau dibalik” (Colley 2007:440).

[25] Sejauh ini, pembahasan saya menghindari klasifikasi pemelajaran sesuai dengan konsep yang berasal dari praktik institusional dan studi pemelajaran sepanjang hayat. Seperti yang telah saya catat dalam penelitian yang lain:

Apa yang tidak ada ... merupakan upaya untuk mengintegrasikan analisis ras, gender, kelas, dan pemelajaran dalam pemaknaan dialektis marxis. Penyelidikan “pemelajaran” bukanlah dalam hal bentuknya, yaitu formal, non-formal, dan informal. Akan tetapi, pemelajaran sebagai kesadaran kelas memerlukan penggabungan metodologi marxis dan kerangka anti penindasan. Sementara kesadaran dapat dikaji dalam hal jarak antara kepentingan subjektif dan objektif, ini tidak berarti bahwa tujuannya adalah untuk memindahkan kelompok ke arah serangkaian kepentingan obyektif yang statis. (Mojab 2006: 167)

### **Ke mana harus melangkah dari titik tolak ini?**

[26] Dalam mencoba memahami apa yang telah saya lakukan sejauh ini, saya mengangkat dua pertanyaan sederhana. Pertama, untuk apa pemelajaran sepanjang hayat? Kedua, bagaimana kita memahami dan menjelaskan hubungan antara pekerjaan dan pemelajaran sepanjang hayat? Respon yang lebih mungkin atau lebih tulus untuk kedua pertanyaan itu adalah: “Pemelajaran sepanjang hayat bertujuan untuk melatih tenaga kerja terampil dan mengantarkannya ke pasar kapitalis”, sebuah

respon yang menurunkan pembelajaran sepanjang hayat setara dengan embel-embel dari pasar. Saya menyadari bahwa sebagian besar dari kita tidak bertujuan menurunkan nilai pembelajaran sepanjang hayat untuk mengikuti tuntutan pasar. Memang, kita telah lama mengejar cita-cita luhur dalam kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Pada tahun 1997, peserta CONFINTEA V di Hamburg menegaskan kembali bahwa hanya pengembangan yang berpusat pada manusia dan masyarakat yang partisipatif berdasarkan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, yang akan mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Bahkan, para peserta menegaskan bahwa

pendidikan orang dewasa menjadi lebih dari sekedar hak. Pendidikan orang dewasa merupakan kunci abad dua puluh satu. Kedua hal itu adalah konsekuensi kewarganegaraan aktif dan syarat untuk partisipasi penuh dalam masyarakat. Ini adalah konsep yang kuat untuk menegaskan pembangunan berkelanjutan secara ekologis, untuk mempromosikan demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, dan pengembangan ilmiah, sosial dan ekonomi, dan untuk membangun sebuah dunia yang mengganti konflik kekerasan dengan dialog dan budaya perdamaian berdasarkan keadilan. Pendidikan orang dewasa dapat membentuk identitas dan memberi makna pada kehidupan. Pembelajaran seumur hidup berarti memikirkan ulang isi untuk mencerminkan faktor seperti usia, kesetaraan gender, kecacatan, bahasa, budaya, dan kesenjangan ekonomi.

[27] Dua belas tahun setelah CONFINTEA V, saya percaya bahwa meskipun kita telah mengambil satu langkah maju, kita telah mengambil banyak langkah mundur. Gagasan tentang kewarganegaraan dan demokrasi ada dalam posisi yang rawan serangan. Dalam berbagai belahan dunia, pendidikan orang dewasa bukan merupakan hak. Bahkan, buta huruf masih menjadi hambatan besar bagi pembangunan. Sekitar seperlima populasi penduduk dewasa dunia masih buta huruf, dan 100 juta anak jalanan tidak mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar. Pada pertengahan tahun 1990 ada sekitar 100 juta anak jalanan. Perdagangan perempuan dan anak telah

mengambil dimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya (*Anti—slavery International* 2001; Departemen Luar Negeri AS 2008).

[28] Apakah ada jejak “pembangunan yang berpusat pada manusia atau masyarakat partisipatif”, yang selaras dengan panggilan Deklarasi Hamburg? Rezim neo-liberal yang muncul di Amerika Utara dan Eropa dalam dua dekade terakhir dan telah ditegakkan di seluruh dunia adalah berdasarkan pada supremasi pasar. Pasar adalah pihak ketiga dari hubungan tidak hanya antar manusia tetapi juga antar bangsa, budaya dan negara. Berdasarkan tatanan ekonomi ini, kemiskinan terus meningkat. Ironisnya, terdapat segelintir orang yang menjadi semakin kaya.

[29] Kapitalisme, baik liberal maupun neo-liberal, adalah sistem yang paling produktif sepanjang sejarah. Sistem ini menghasilkan lebih dari yang dapat dikonsumsi oleh populasi penduduk suatu negara. Namun sistem ini juga menghasilkan kemiskinan. Selanjutnya, sistem ini harus melakukan ekspansi untuk berkembang. Perluasan ini terjadi baik dalam batas negara tertentu maupun pada skala dunia dengan globalisasi tanpa henti. Modal tidak dapat bertahan tanpa dominasi kolonial. Perang tak dapat terhindarkan kaitannya dengan ekonomi itu. Kapitalisme telah menciptakan industri militer kompleks yang menghendaki perang bahkan ketika perang itu tidak dapat dibenarkan; pengeluaran militer tahunan sekarang lebih dari satu triliun dolar. Sejak 1990-an, 44 negara, atau 25 persen dari negara di dunia terlibat dalam perang. Hal itu menghasilkan kerusakan manusia dan ekologi yang sangat besar. Kemampuan kapitalis untuk menghasilkan, pada saat yang sama, adalah kemampuan untuk menghancurkan. Dewasa ini, terdapat argumentasi bahwa kapitalisme neo-liberal berkembang pesat dalam bencana (Klein 2007). Kita dapat melihat lagi dan mengatakan bahwa kapitalisme itu sendiri telah berubah menjadi bencana. Kapitalisme komersial yang awal dahulu berkembang pesat karena perbudakan dan kolonialisme, sementara rezim neo-liberal global pada kapitalisme masa kini juga membangkitkan kembali perbudakan. Ada perbudakan gaya lama di sebagian wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dewasa ini, kapitalisme Barat semakin berkembang dengan bertumpu pada tenaga kerja murah dari dua miliar orang

di Cina dan India, tempat pekerja dan petani menjadi sasaran bentuk baru perbudakan.

[30] Banyak dari kita dalam pendidikan orang dewasa memang telah menyadari tentang bencana yang terus berkembang ini. Teori feminis membantu kita memahami bagaimana tenaga kerja perempuan berkontribusi terhadap reproduksi baik kapitalisme maupun patriarki. Kemajuan dalam penelitian mengenai ras dan kolonialisme memungkinkan kita untuk memahami komponen rasial pembelajaran, pendidikan, pekerjaan dan kapitalisme. Sekarang ini, kita memiliki teorisasi pembelajaran yang agak maju. Sebagai contoh, Allman (1999, 2001 dan 2007), Colley (2004) dan Rikowski (1999, 2001 dan 2002) memperlakukan modal dan tenaga kerja bukan sebagai benda melainkan sebagai relasi sosial. Mereka melihat tenaga kerja dan modal sebagai suatu kesatuan dan konflik dari yang bertentangan membentuk formasi kapitalis sosio-ekonomi. Namun, bahkan ketika kita melihat tenaga kerja/modal sebagai hubungan sosial konstitutif dari sistem kapitalis, kita tidak berpikir tentang negasinya. Kita mengkritik dan sering berhasil dalam kritik kita terhadap kapitalisme tetapi kita tidak mengambil langkah berikutnya. Kita tidak memvisualkan masa depan. Kegagalan kita adalah bagian dari keberhasilan kapitalisme dalam melestarikan keberadaannya.

[31] Untuk memvisualkan suatu alternatif untuk menggantikan kapitalisme itu, kita harus mengerti proses memahami kapitalisme itu sendiri. Dengan kata lain, melihat hubungan sosial kapitalis secara filosofis memerlukan proses pemahaman kebutuhan dan bagaimana untuk meniadakannya. Tatanan dunia kapitalis, sebagaimana keberadaannya, telah ada baik dalam masyarakat masa lampau maupun masa kini. Secara filosofis, hal ini adalah realitas kebutuhan dan kita tunduk pada aturannya, meskipun ada kemungkinan untuk bebas dari kungkungan itu jika kita sadar akan hal itu, dan jika kita memvisualkan negasinya sebagai salah satu kondisi kebebasan. Saya menegaskan di sini bahwa kebebasan itu ada dalam kesatuan dan konflik dengan kebutuhan (kondisi yang ada, status quo).

[32] Kebebasan terdiri dari pemahaman dan transformasi kebutuhan. Ini adalah proses intervensi kesadaran dalam kepentingan kelas, rasa kepemilikan terhadap agama yang dianut, rasa etnisitas (KBBI), dan hierarki gender dan ras. Sebagai gagasan akhir, saya menyarankan kerangka kerja untuk memahami dialektika kebutuhan dan kebebasan yang berlaku bagi hubungan antara pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat. Untuk melakukannya, saya menggunakan konsepsi Davis Harvey tentang “akumulasi oleh pencabutan hak milik” (Harvey 2003). Saya menamakan proses ini sebagai “pembelajaran oleh pencabutan hak milik”. Adapun maksud saya adalah: dalam proses pembelajaran dan pekerjaan, ada sesuatu hal lain yang terjadi selain “pembelajaran” (yang dapat diukur, dievaluasi atau dinilai berdasarkan kategorisasi “formal”, “informal”, dan “non-formal”, atau “berbayar” dan “tak berbayar”). Sama seperti akumulasi modal primitif, pembelajaran juga memiliki karakteristik ganda, yaitu menghasilkan pembelajaran serta sesuatu “di luar dirinya” yang sangat mengakar secara mendalam pada diri / pikiran / kesadaran mengenai cara hubungan sosial kapitalis yang terus-menerus. Dengan kata lain, pembelajaran menghasilkan pengetahuan dan keterampilan baru serta keterasingan dan fragmentasi diri/masyarakat, dan mencampuradukkan “pekerja” dengan gagasan “kapitalisme”. Harvey mengusulkan agar kita mengambil dialektika hubungan kapitalisme “dalam luar” secara serius dan bahwa sebenarnya “ini membantu kita lebih memahami apa itu bentuk kapitalistik dari imperialisme” (2003:142). Saya juga ingin mengusulkan agar kita memperluas analisis teoretis dan metodologis tentang hubungan antara pekerjaan dan pembelajaran sepanjang hayat dengan analisis yang lebih canggih secara kualitatif mengenai materialitas hubungan sosial kapitalis, ketika hubungan itu dibedakan berdasarkan gender, ras, dan orientasi seksual.



## 2. Masalah Penghidupan: Beberapa Pertanyaan dan Prioritas Penelitian di bidang Pekerjaan dan Pemelajaran

**Astrid Von Kotze**

### **Pendahuluan**

[1] Perkenalkan saya mengawali tulisan ini dengan memperkenalkan tiga orang. Pertama adalah Siphon, seorang anak laki-laki berpakaian kotor dan compang-camping, yang tangan kirinya menggenggam sebuah botol plastik bekas minuman berisikan lem sepatu, sedangkan tangan kanannya menengadah untuk meminta-minta. Kedua, Thembeza, seorang ibu yang duduk berpayung dengan seorang bayi di pangkuan dan seorang anak balita di sampingnya. Di depannya tergelar beberapa ikat sayur dagangan. Ketiga, Khumalo, yang sedang mendorong gerobak berisikan tumpukan besi tua hasil dari memulung untuk dijual ke pengepul dengan harga yang sangat murah.

[2] Orang seperti di atas dapat dijumpai di mana saja di belahan bumi Selatan. Anak jalanan merupakan fenomena yang berkembang di negara miskin. Fenomena itu menunjukkan stratifikasi masyarakat yang mencolok baik secara sosial maupun secara ekonomis. Kaum perempuan, yang tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan formal dan tidak mempunyai modal usaha untuk mulai berwiraswasta umumnya menjual bahan kebutuhan pokok sebagai satu-satunya pilihan mereka untuk mencari sesuap nasi yang dapat dikerjakan sambil mengasuh anak dan cucu. “Pemburu-pengumpul” modern berusaha mengubah apa saja yang mereka temukan menjadi uang, dari sampah dan barang bekas yang dibuang oleh orang kaya. Dengan semakin menyebarnya penyakit HIV/AIDS, dampak dari bencana besar yang mengakibatkan orang kehilangan tempat tinggal dan harus berpindah, dan semakin banyaknya kelaparan di antara masyarakat miskin khususnya

di wilayah perkotaan, maka perjumpaan dengan orang seperti ketiga contoh yang disebutkan di atas telah dianggap normal, tidak membuat orang kaget.

[3] Siphon, Thembeisa, dan Khumalo termasuk dalam lebih dari 50 % penduduk dunia yang tidak bekerja dalam sektor ekonomi formal. Mereka dan para pekerja yang senasib bekerja keras demi sesuap nasi. Meskipun demikian, keberadaan mereka tetap tidak diperhitungkan dalam konferensi formal tentang pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Hasil CONFINTEA V pada tahun 1997 (Komite UNESCO 1998: 99100) berisi kesimpulan paripurna dan rekomendasi tentang pendidikan untuk dan dalam sektor ekonomi informal. Misalnya kebutuhan untuk merancang intervensi dengan metode partisipatoris, pengembangan kapasitas yang sudah ada, dan keterampilan di dalam sektor tertentu baik dalam hal isi maupun metodologi. Selain itu, penting menjembatani pendidikan non-formal dan pendidikan formal; kerja sama dengan jejaring dan organisasi yang ada, pengembangan praktik solidaritas ekonomi, dan kebutuhan untuk mempertimbangkan rumah tangga sebagai unit ekonomi.

[4] Meskipun demikian, alih-alih membangun pemahaman mereka untuk mengidentifikasi prioritas penelitian yang sesuai, dokumen terbaru tampaknya cenderung mengabaikan kajian dan rekomendasi dari komite UNESCO (Von Kotze 2008). Dokumen terkini UNESCO-UNICEF (2003, 2006) menggaribawahi pentingnya pekerjaan dalam sektor ekonomi informal, sedangkan perencanaan umumnya mengesampingkan perubahan struktur dan proses di lingkungan kerja secara radikal dalam dunia neoliberal yang semakin luas. Hal itu tidak mengherankan mengingat peran negara yang berkurang dalam mengintervensi pendidikan dan pelatihan, peningkatan komersialisasi pendidikan, dan mustahil merancang kurikulum yang sesuai dengan segala bidang untuk kondisi yang berbeda secara radikal. Namun, pengabaian itu sangatlah mengkhawatirkan, khususnya dalam konteks kenaikan harga kebutuhan pokok, kekurangan bahan pangan seiring dengan digunakannya tanaman

sebagai bahan bakar hayati, dan tenggat waktu yang hampir habis untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs)<sup>2</sup>.

[5] Dalam bab ini, saya akan mengemukakan dua hal. Pertama, mengkritik pemikiran pembangunan yang telah mengakar kuat sehubungan dengan cara pandang tentang agenda pendidikan dan pekerjaan, serta justru mengusulkan “perspektif penghidupan” sebagai pendekatan alternatif pada pekerjaan, pembelajaran, dan pendidikan khususnya dengan memperhatikan mayoritas penduduk dunia. Kedua, membuat kerangka pertanyaan dan prioritas penelitian yang diturunkan dari reorientasi itu.

### **Mentalitas Akuntan**

[6] Ada kecenderungan yang luar biasa dalam pemikiran pembangunan tentang apa yang dapat diukur dan dapat dihitung, jumlah yang dihasilkan, uang di pundi-pundi, jumlah orang yang dipekerjakan, dan sebagainya. Sejalan dengan mentalitas akuntan, terdapat sistem dan model produksi yang memudahkan kita untuk mendata, menghitung, dan memperkirakan “keluaran”. Daftar isian tanda centang memudahkan inventarisasi dan juga evaluasi atas jumlah jam kerja, perpindahan barel, wadah yang telah diisi, dan pegawai yang dilatih. Penilaian didasarkan pada pertumbuhan, peningkatan, dan akumulasi dari apa pun yang dapat dihitung. Bagaimanapun, orang seperti Sipho, Thembisa, dan Khumalo serta akal upaya mereka untuk hidup layak dan bermartabat menghilang begitu saja di balik data statistik, inventaris, dan segala sesuatu yang dapat diukur.

[7] Dalam pengkajian mendalam tentang pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan, sulit untuk memunculkan sektor ekonomi informal ke permukaan. Data statistik mengindikasikan bahwa sektor ekonomi informal sedang tumbuh. Terlebih di

---

<sup>2</sup> Millennium Development Goals (MDGs) merupakan delapan tujuan pembangunan internasional yang disetujui oleh 192 negara anggota PBB dan paling tidak 23 organisasi internasional untuk dicapai sebelum tahun 2015, antara lain memberantas kemiskinan, menurunkan angka kematian anak, dan membangun kemitraan global bagi pembangunan

negara berkembang, pekerjaan di sektor informal merupakan setengah sampai sepertiga pekerjaan di luar sektor pertanian. Kontribusi pendapatan dari sektor kerja informal terhadap pendapatan nasional mencapai 30 sampai 60 persen di berbagai negara (Chen et al. 200, Shier 2006). Meskipun demikian, bertentangan dengan persepsi umum, sektor ekonomi informal memberikan kontribusi antara 7 dan 12 persen dari produk domestik kotor (Shier 2006). Akan tetapi, secara normatif, yang dimaksud dengan pekerjaan tetaplah pekerjaan di sektor ekonomi formal. Sementara itu, pendidikan dan pelatihan diprioritaskan pada pengembangan kapasitas atau sumber daya manusia, yang hanya dapat diakses khususnya oleh mereka yang sudah “tahu” dan berada di dalam sistem. Tuntutan pasar berpihak pada ketentuan program pemelajaran, yang sarannya adalah individu yang ingin “investasi” ke diri sendiri dengan harapan mendapatkan pekerjaan, berkat partisipasi mereka dalam program pengembangan keterampilan hidup dan pelatihan kejuruan. Keyakinan bahwa investasi dalam pengembangan diri akan mendatangkan hasil yang besar sedemikian kuatnya sehingga donatur bahkan tidak tergoyahkan oleh tidak adanya bukti yang dapat dipercaya mengenai kecocokan antara nama yang tercantum dalam formulir pendaftaran dengan jumlah orang yang akhirnya duduk dalam kelas itu, dan dengan jumlah orang yang baru mendapatkan pekerjaan atau baru menciptakan pekerjaan sendiri.

### **Pengembangan Kapasitas atau Pengembangan Pribadi**

[8] Bahkan dalam dokumen UNESCO–UNEVOC, kerja umumnya masih didefinisikan sebagai lapangan pekerjaan formal. Implikasinya, mayoritas penduduk di belahan dunia Selatan (termasuk tiga orang yang sudah diperkenalkan di pendahuluan bab ini) tidak bekerja. Maka, jangan terkejut seandainya Saudara bertanya pada Khumalo mengenai pekerjaannya, ia akan menjawab “Saya tidak bekerja”. Memulung dan menjual potongan besi tua, berjualan kecil-kecilan, menjadi pembantu rumah tangga, dan melakukan pekerjaan perawatan— atau lebih tepat, pelayanan di segala bidang ekonomi — ternyata bukan “pekerjaan”. Meskipun pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh perempuan tua, muda, atau pun anggota

masyarakat yang belum menjadi pegawai ternyata dapat mendorong perputaran roda ekonomi kehidupan, pekerjaan mereka tidak dihargai dan dianggap tidak produktif. Keterampilan dan pengetahuan mereka yang bekerja di bidang itu tidak diakui dan tidak terakreditasi— dan sebagai “tenaga kerja tidak terlatih” mereka menjadi sasaran program pelatihan.

[9] Argumen yang paling sering muncul adalah orang menjadi pengangguran karena mereka kurang memiliki cukup (a) keterampilan dan (b) harga diri dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, mereka dihadapkan kepada tawaran “pengembangan keterampilan hidup” untuk mengubah perilaku mereka, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka untuk lebih berterima di dunia kerja. Paket materi sumber yang dihasilkan oleh UNEVOC atas nama UNESCO pada tahun 2006 adalah salah satu contoh-kecuali “masalah utama” tampaknya bahwa penduduk lokal tidak termotivasi (dan, implikasinya, malas). Paket berjudul “Belajar dan Bekerja: Memotivasi Pengembangan Keterampilan” ini dikemas dengan baik: terdiri dari buku kecil cerah dan berwarna-warni dengan gambar dan CD, dan paket materi itu menawarkan dengan tepat apa yang diperlukan semua orang — kegiatan pelatihan keterampilan yang dirancang untuk pemuda. Para penerbit menjelaskan bahwa paket ini berisi tentang:

Paket Kampanye “Belajar dan Bekerja: Memotivasi Pengembangan Keterampilan” adalah paket sumber yang memberikan informasi dan alat untuk persiapan dan pelaksanaan kampanye kesadaran dan motivasi untuk kelompok yang terpinggirkan di negara berkembang. Paket ini relevan untuk semua yang terlibat dalam penyediaan pengembangan kapasitas dan keterampilan untuk masyarakat pra sejahtera di aras lokal. Gagasan di baliknya adalah untuk mendorong orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan untuk meningkatkan perspektif sosial dan ekonomi mereka dengan mendaftarkan diri pada pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja dan/atau dengan membuka usaha mandiri.

[10] Catatan pengantar ini mengungkapkan sejumlah asumsi: pertama, bahwa “kelompok yang terpinggirkan” dikesampingkan karena mereka tidak memiliki kesadaran dan motivasi. Kedua, “masyarakat pra sejahtera” membutuhkan pengembangan kapasitas dan keterampilan. Ketiga, “orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan” akan meningkatkan perspektif sosial dan ekonomi mereka dengan meningkatkan keterampilan kerja, dengan mendaftar pada pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja. “Kelompok yang terpinggirkan”, “masyarakat pra sejahtera”, dan “orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan” perlu dibawa ke sektor ekonomi formal/dominan. Pelatihan pengembangan pribadi dan kepemimpinan yang mengarah pada “pemberdayaan” adalah cara membawa mereka ke dalam sektor ekonomi formal/dominan. Tentu saja cara itu tidak memengaruhi pergeseran kondisi atau perubahan kebijakan ekonomi yang melepaskan mereka dari kondisi ekonomi semula.

[11] Tidak ada keraguan bahwa sikap mental yang positif, visi, penetapan tujuan dan pengembangan rasa percaya diri adalah atribut penting menuju partisipasi dan pengambilan peran kepemimpinan. Namun, paket materi pengajaran yang memotivasi sering memperkuat persepsi bahwa kegagalan partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah hasil dari kelemahan pribadi dan bukan kendala struktural, dan bahwa partisipasi dan kepemimpinan yang kuat memerlukan transformasi individu daripada perubahan sosial yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan hubungan patriarkal yang berakar pada adat dan kepercayaan tradisional. Jika strategi pengajaran tidak seiring sejalan dengan, atau melengkapi strategi struktural, maka orang yang telah menyelesaikan pelatihan akan menjadi orang yang lebih percaya diri tetapi masih saja tertindas.

[12] Pada tahun 2000, Singh menerbitkan hasil penelitian yang telah mengungkapkan banyak kualitas dan kompetensi penting yang ditunjukkan sebagai hal yang diperlukan untuk berperan dalam ekonomi informal: watak, ciri-ciri dan orientasi kepribadian seperti mampu bekerjasama, sabar, toleransi terhadap perbedaan, dan berbagai kemampuan komunikatif sosial berdasarkan sejarah dalam

sebuah komunitas atau lokasi. Tak satu pun dari hal itu yang mungkin merupakan hasil pelatihan, meskipun program pengembangan kepribadian tipe tertentu mengklaim “mengajarkan” kompetensi ini, yang dikemas sebagai “kemampuan komunikasi”, “kerjasama dan pengembangan tim”, atau “kemampuan negosiasi”. Singh menunjukkan:

Seorang produser skala kecil sangat bergantung pada hubungan informalnya dengan pelanggan, promosi terjadi melalui rekomendasi dari teman dan kenalan, informasi mengenai perlengkapan baru ditularkan melalui kontak pribadi. (2000:601)

[13] Dengan demikian, umumnya kemampuan untuk melakukan usaha sebagai pedagang kaki lima seperti Thembisa, misalnya, didasarkan pada koneksi dan kepribadian: siapa yang Anda kenal dan bagaimana Anda dapat menggunakan pengetahuan itu, dan bagaimana untuk melibatkan orang dalam percakapan, membangun hubungan kepercayaan, dan meminta atau menaruh kepercayaan karena hubungan pertemanan atau kenalan.

[14] Penelitian Singh (2000) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan posisi ekonomi rakyat, menargetkan individu sebagai sasaran pengembangan pribadi tidak seefektif menghubungkan mereka dengan jejaring yang menyediakan sarana belajar tentang teknologi dan pasar yang baru, memperbesar basis klien mereka, mengumpulkan pengetahuan dan pengetahuan teknis, dan meningkatkan keamanan sosial mereka dengan membentuk dan memperkuat ikatan sosial.

[15] Dokumen UNESCO *Orienting Technical and Vocational Education and Training for Sustainable Development* (UNESCO-UNEVOC 2006:5) mengakui bahwa tidak mungkin ada tujuan pengembangan tunggal untuk belahan dunia Selatan, melainkan, “strategi yang tepat harus dikembangkan baik untuk negara kaya maupun miskin”. Bersikap kritis terhadap “ekonomi pasar global” dalam hal eksploitasinya terhadap lingkungan dan pengesampingan “kira-kira setengah dari penduduk dunia” (2006: 8), dokumen itu meletakkan tanggung jawab di pundak lulusan pendidikan

kejuruan dan pelatihan kerja di masa yang akan datang dengan tugas “bekerja pada bidang temu antara alam, teknologi, ekonomi, dan masyarakat” dan dengan demikian harus belajar tentang “konsep berkelanjutan, praktik dan contoh” (2006:9). Konsisten dengan hal itu, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai

pencarian yang terarah secara budaya untuk keseimbangan dinamis dalam hubungan antara sistem sosial, ekonomi dan alam, keseimbangan yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan antara masa sekarang dan masa yang akan datang, dan kesetaraan antar negara, ras, kelas sosial dan jenis kelamin. (2006: 5)

[16] Untuk mencapai “keseimbangan”, diperlukan sejumlah perubahan radikal. Pertama adalah cara pandang kita terhadap pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan.

#### **Pendekatan penghidupan untuk pekerjaan dan pembelajaran**

[17] Maria Mies (1986) mengingatkan kita bahwa “tujuan dari semua pekerjaan dan usaha manusia bukanlah ekspansi kekayaan dan komoditas yang tidak pernah berhenti, namun *kebahagiaan manusia* (sebagaimana pandangan kaum sosialis awal), atau *produksi kehidupan itu sendiri*” (1986:212 ; dicetak miring dalam teks asli). Demikian pula, Andre Gorz (1999) mengemukakan bahwa pekerjaannya saat ini hanya dipahami sebagai aktivitas berbayar yang dilakukan atas nama pihak ketiga, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh orang lain di luar diri kita sendiri dan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan oleh majikan. Jika pekerjaan dianggap sebagai “kegiatan penghidupan”, maka pekerjaan ini akan dilepaskan dari produksi komoditas murni, dan difokuskan kembali sehingga melingkupi produksi kehidupan. Dalam pengertian yang paling sederhana, penghidupan berarti cara untuk mencapai suatu kehidupan (Chambers & Conway 1991). Sebuah perspektif penghidupan memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, politik, sejarah, geografis dan demografis yang memengaruhi pilihan orang mencari nafkah dalam konteks itu. Perspektif itu mempertimbangkan sumber daya dan aset yang tersedia, dan akses



pada hal tersebut yang dimiliki masing-masing orang dan institusi yang mendukung upaya tersebut. Perspektif itu juga mempertimbangkan faktor risiko tertentu dan strategi yang digunakan orang untuk menangani dan mengatasi hal tersebut.

[18] Dengan demikian, perspektif penghidupan memperhatikan secara serius tidak hanya semua tindakan yang dilakukan untuk mencari nafkah, tetapi juga mencakup kegiatan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan reproduksi kehidupan (Mies 1986; Mies & Bennholdt-Thomsen 1999). Dengan demikian, perspektif ini memberikan landasan bagi jenis pekerjaan yang lain, termasuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, pemeliharaan kebun di rumah, dan pengumpulan bahan bakar, seperti juga pengorganisasian masyarakat dan tindakan timbal balik, dan solidaritas yang sering terjadi, yang bersifat membangun dan berkontribusi terhadap perlindungan sosial.

[19] Melihat pekerjaan sebagai kegiatan penghidupan, dan bukan sekedar pekerjaan di sektor ekonomi formal, bukanlah perubahan yang sederhana. Sebaliknya, hal ini berarti kita harus berpikir secara lebih holistik tentang kegiatan yang dilakukan orang untuk dapat hidup layak dan bermartabat, daripada sekedar bertahan hidup secara fisik. Pemikiran yang lebih holistik diperlukan jika kita ingin mempertimbangkan keberlanjutan, dan secara khusus membangun hubungan dengan lingkungan dan sumber daya alam yang kurang eksploitatif, juga dengan orang lain sebagai mitra kita dalam sistem keakraban. Jika tindakan bertujuan untuk memberikan dampak positif pada konteks kemiskinan dan kekayaan diferensial, maka “kajian penghidupan” dan bukan “kajian pembelajaran di tempat kerja” yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perjuangan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang sangat terkait dengan pekerjaan perawatan, pengasuhan anak, dan pengembangan komunitas. Juga, kita mendapatkan pengertian mengenai jenis pendidikan dan strategi pelatihan yang dapat memberi dukungan terbaik dalam perjuangan itu,

[20] Mengambil perspektif penghidupan yang berkelanjutan memaksa kita untuk mempertimbangkan kehidupan orang dan peluang hidup dalam kaitannya dengan lingkungan berisiko tinggi. Dampak keadaan berbahaya seperti penyakit/epidemi dan fenomena cuaca pada kondisi dan manusia yang memang sudah dalam keadaan rentan, membuat mereka tidak mampu bertahan. Sebagai pekerja informal mereka menghadapi ancaman tambahan: pertama, dalam hal kondisi tempat mereka hidup dan bekerja, dan kedua, karena mereka memiliki tingkat penghasilan yang rendah maka kecil kemungkinan mereka dapat menabung untuk keadaan darurat atau peristiwa khusus (Chen et al 2005;. Lund & Nicholson 2003). Akibatnya, para pekerja ini jauh lebih terpapar pada musibah seperti penyakit, kehilangan barang yang dimiliki, dan kematian, tanpa mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Selain itu, karena mereka menghadapi pengucilan dari negara, lembaga politik, dan pasar, yaitu semua orang dan institusi yang membuat keputusan yang memengaruhi mereka secara langsung, mereka memiliki lebih sedikit hak atau pengetahuan mengenai hak mereka, dan akses yang lebih sedikit terhadap informasi, infrastruktur dan jasa.

[21] Untuk bertahan dan menjaga keberlanjutan penghidupan mereka, perlu pembentukan dan pemeliharaan sistem dukungan dan landasan kekuasaan yang memungkinkan perubahan kebijakan. Karena negara semakin mengurangi tanggung jawabnya terhadap jaminan sosial, maka masyarakat harus mengupayakan perlindungan sosial mereka sendiri. Menghadapi kurangnya perlindungan sosial dari pemerintah, orang yang kaya akan membeli asuransi dan perlindungan sejenis. Untuk orang kebanyakan, ini berarti masyarakat akan melakukan tindakan untuk mengemangkan kemampuan mereka untuk bertahan dan menciptakan jaring pengaman untuk menghadapi keadaan darurat, dan bukan hanya menunggu datangnya komoditas dan layanan (Lund & Nicholson, 2003). Pada dasarnya, hal ini melibatkan pembentukan hubungan kebersamaan, solidaritas, dan tindakan kolektif. Di daerah pedesaan, baik di antara mereka yang bertani untuk kebutuhannya sendiri maupun mereka yang menjual produksinya untuk mendapatkan uang, orang saling bantu-membantu karena mereka beranggapan bahwa aktivitas ekonomi bukanlah

aktivitas individualistis melainkan aktivitas yang melibatkan orang lain. Tenaga kerja di sektor ekonomi informal mengorganisir diri mereka ke dalam berbagai bentuk, tergantung pada keadaan geografi, budaya, alam dan kondisi spasial/temporal dari pekerjaan mereka, dan berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan.

[22] Perspektif penghidupan akan mengarahkan fokus kita pada sektor ekonomi informal (dan saling ketergantungan antara sektor ekonomi formal dan informal), yang membuat yang tak terlihat menjadi terlihat, dan memperlihatkan kondisi kerja yang buruk dan tempat tinggal yang miskin dan tidak adanya perlindungan sosial (formal). Akibatnya, perlu diciptakan akses terhadap aset produktif dan sumber daya lain, tanah, kredit, pemasaran, dan bantuan teknologi. Diharapkan bahwa dengan terciptanya kondisi tersebut, akan ada akses pada pendidikan dan pelatihan.

[23] Oleh karena itu, perspektif penghidupan sebagai titik awal pemikiran mengenai pekerjaan, pemelajaran dan pendidikan akan membutuhkan definisi baru untuk pekerjaan yang mencakup pekerjaan perawatan dan semua pekerjaan tak dibayar, yang biasanya dilakukan perempuan. Ini akan memerlukan orientasi terhadap usaha untuk mendukung dan mempertahankan hidup daripada sekedar mengumpulkan komoditas dengan harapan sia-sia bahwa yang “lebih banyak” dan “lebih besar” akan menghasilkan kehidupan yang “lebih baik”; suatu pemahaman mengenai diversifikasi kegiatan penghidupan, dan bukan “satu pekerjaan”, dalam suatu lingkungan dengan risiko yang sangat bermacam-macam; suatu fokus pada sektor ekonomi informal sebagai tempat utama bagi orang miskin untuk mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya, sebuah penolakan terhadap pandangan bahwa masyarakat miskin itu bersifat lambat dan pasif, dan membutuhkan motivasi.

### **Prioritas penelitian**

[24] Pertanyaan dan prioritas penelitian seperti apa yang akan timbul dari pendekatan penghidupan? Pada bagian berikut saya menguraikan lima hal.

## Desain kurikulum partisipatoris

[25] Meskipun penelitian yang ekstensif telah menunjukkan kebutuhan terhadap konstruksi kurikulum lokal yang bersifat partisipatoris, intervensi pembelajaran, pendidikan dan pelatihan selalu dirancang oleh para ahli yang berada di luar kelompok sasaran peserta didik seperti yang dikatakan Gouthro (2000):

Pertanyaan kunci yang harus dibahas dalam menentukan masa depan masyarakat sipil dalam dunia global adalah siapa yang mendefinisikan agenda pendidikan? Pada saat ini, hal itu ditentukan oleh dunia usaha dan perusahaan, dan pemikiran mengenai keuntungan dan investasi dilihat dari segi pelanggan perorangan dan bukan masa depan semua orang. (2000:70)

[26] Sebelas tahun yang lalu Karcher (1998) menyarankan bahwa, dengan pertumbuhan ekonomi informal di seluruh dunia, belahan dunia Utara dapat belajar dari belahan dunia Selatan, dan bahwa

konsep pengajaran dan pembelajaran yang relevan untuk sektor informal harus dipelajari secara lebih teliti agar pendidikan orang dewasa dapat memperhitungkan perubahan proses pekerjaan dan orang yang terlibat di dalamnya. Harus ditanyakan bagaimana suatu kehidupan bermartabat dapat terwujud di luar sektor pekerjaan formal dan strategi pendidikan baik informal maupun formal mana yang dapat mencapai tujuan ini. (Apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran akan terjadi?) (1998:88)

[27] Selanjutnya, ia berpendapat bahwa

Konsep pengajaran dan pembelajaran yang sesuai hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif dari kelompok yang bersangkutan, yaitu melalui partisipasi ekstensif. Karena kelompok itulah yang berada dalam posisi yang terbaik untuk memformulasikan kebutuhan mereka dan menentukan batas-batas hal yang bisa mereka capai. Oleh karena itu, pendekatan yang

tepat harus dirancang secara khusus sesuai situasi untuk setiap kelompok tertentu, khususnya untuk perempuan. (1998:89)

[28] Singh (2000) juga menyarankan bahwa penyediaan pendidikan dan pelatihan harus

memperhitungkan tradisi dan nilai-nilai dari sistem pembelajaran kejuruan dalam kehidupan kerja, memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, dan berdasarkan pada pemahaman tentang jenis kompetensi yang diinginkan, dibutuhkan, dan dimanfaatkan orang yang berada di sektor ekonomi informal, konteks sosial- ekonomi dan budaya di tempat mereka bekerja, dan bagaimana mereka mengatasi dan mempertahankan strategi penghidupan mereka (2000:599)

[29] Oleh karena itu, prioritas pertama penelitian adalah belajar secara lebih sistematis dari mereka yang hendak kita dukung. Ada baiknya kita tidak terburu-buru memberikan resep dan penawaran berdasarkan asumsi. Kita perlu memahami secara lebih dalam mengenai apa yang akan membuat suatu perubahan. Apa saja pengetahuan khusus dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan oleh sektor dan kelompok tertentu, dan bagaimana cara perolehan pengetahuan tersebut? Menjawab pertanyaan seperti itu juga membutuhkan metodologi penelitian yang inovatif. Sebagai contoh, pengalaman dalam proses kajian desa partisipatif menggambarkan bagaimana bergunanya untuk hidup dengan, misalnya, pedagang miskin untuk belajar bersama tentang politik ekonomi tertentu dari sektor mereka yang spesifik, dan tempat, dan waktu, serta faktor kondisional yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang terkonsentrasi. Menyimak, mengamati dan bekerja bersama dapat menghasilkan jenis pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk memastikan jenis pendidikan dan pelatihan yang akan membawa perubahan berarti dalam keamanan penghidupan mereka.

### **Lokal dan spesifik**

[30] Modul pelatihan yang bersifat generik jarang bermanfaat, seperti yang diamati oleh Chen et al. (2005)

Apa yang dibutuhkan adalah macam-macam intervensi yang sesuai konteks, yang dikembangkan dengan berkonsultasi dengan tenaga kerja miskin baik laki-laki maupun perempuan, dan berdasarkan pemahaman mengenai signifikansi tenaga kerja itu dalam angkatan kerja dan kontribusi mereka terhadap perekonomian. (2005:89)

[31] Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya orientasi lokal dan spesifik, dan berskala kecil harus menjadi titik awal. Hal ini tidak hanya terkait pada silabus yang akan dibuat, tetapi juga menyangkut proses dan metodologi. Setelah merancang substansi program, pengembangan keterampilan dan pengetahuan harus mempertimbangkan kemampuan dan tradisi lokal dan dinamika hubungan sosial berkaitan dengan transmisi atau produksi mereka. “Penerapan metode pelatihan dan kurikulum luar negeri bisa jadi kontra-produktif serta mahal jika tiada analisis menyeluruh tentang situasi lokal dan tidak adanya adaptasi kurikulum yang tepat”, Singh (1998:98) memperingatkan. Selain itu,

mengembangkan pendidikan untuk sektor informal dapat berhasil jika pendidikan itu mencerminkan inovasi, inisiatif dan pendekatan yang muncul dari sektor informal itu sendiri. Sektor informal adalah sektor yang menjadi teladan kemandirian, partisipasi masyarakat umum, transformatif, magang, pembelajaran secara otodidak dan antar generasi serta pembelajaran di luar konteks sekolah, misalnya pembelajaran melalui partisipasi dalam gerakan sosial. (Singh 2005: 5)

[32] Ini juga menunjukkan secara khusus bahwa terdapat dua faktor penting yang harus disertakan dalam pembahasan tentang pembelajaran dan pendidikan, yaitu: pekerjaan perawatan (tidak berbayar) yang dilakukan oleh orang, khususnya

perempuan, dan pengembangan jejaring dan organisasi yang meskipun memakan waktu dan energi, tetapi penting untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan.

[33] Tantangan lain adalah pertanyaan mengenai bagaimana menjembatani antara pembelajaran formal dan informal, dan bagaimana mengagungkan pembelajaran dan pendidikan informal dan non-formal, namun menghindari “kredensialisme” sangat khas dari dunia neoliberal. Gorz (1999) mengingatkan kita bahwa

tidak ada yang lebih memiskinkan bagi suatu budaya daripada melihat ikatan efektif yang paling spontan antar orang, yaitu simpati, empati, kasih sayang, perhatian, komunikasi, dan lain-lain, yang “merupakan tujuan pelatihan dan kualifikasi”, dan digunakan untuk memuaskan majikan atau mendapatkan klien, digunakan untuk “mengetahui bagaimana menjual diri” kepada atasan, atau bagaimana untuk menjual sesuatu klien. (1999:70)

[34] Ikatan yang efektif antar orang tidak bisa diajarkan atau diuraikan dalam kualifikasi. Apa yang mereka butuhkan adalah lebih dari sekedar penyampaian informasi. Bagaimana caranya menghindari pengaturan yang bersifat generik atau umum untuk menerapkan cara penilaian dan evaluasi yang telah disepakati terhadap pembelajaran berbasis praktik dan keadaan setempat?

[35] Oleh karena itu, prioritas penelitian yang kedua adalah pembelajaran mengenai bentuk-bentuk magang yang lokal, tradisional, dan spesifik dan bagaimana menggunakannya. Selain itu, prioritas lain adalah sosialisasi mengenai proses dan konteks pekerjaan dan pengajaran khusus. Pembelajaran yang terisolasi dari dinamika dan realitas kegiatan kehidupan sehari-hari dan jarang berkelanjutan. Lagipula, pengalihan dari “ruang kelas” ke lapangan jarang terjadi.

### **Fokus pada perempuan**

[36] Banyak yang telah dikatakan tentang perubahan dramatis dalam angkatan kerja, dalam kondisi kerja dan dalam bertambahnya ketidakpastian bagi orang miskin,

khususnya perempuan, yang disebabkan oleh globalisasi, peningkatan feminisasi baik angkatan kerja maupun kemiskinan, dan diskriminasi gender yang terus berlangsung (Kabeer 2007; Bush 2007). Laporan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) tahun 2006 menjabarkan kondisi perempuan terkait dengan kemiskinan dan pekerjaan:

Sekitar 520 juta orang tenaga kerja hidup dalam kemiskinan ekstrim (penghasilan kurang dari \$ 1 per hari), diperkirakan 60 persen di antaranya adalah perempuan. Perempuan lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan daripada laki-laki. Hal ini terjadi karena ketidaksetaraan gender dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga, akses terhadap pendidikan, pelatihan dan pekerjaan, serta dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Dibandingkan dengan laki-laki, jauh lebih sedikit perempuan yang memiliki pekerjaan rutin yang dibayar, dan perempuan lebih sering bekerja di sektor ekonomi informal. Lebih sedikit perempuan memiliki bisnis daripada laki-laki. Selain itu, di seluruh dunia, lebih dari 60 persen tenaga kerja tidak dibayar dalam perusahaan keluarga adalah perempuan. Perempuan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian baik melalui pekerjaan yang dibayar maupun tak dibayar di pasar tenaga kerja, di rumah dan di masyarakat. Namun, segregasi gender horisontal dan vertikal di pasar tenaga kerja maupun stereotip gender berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan di seluruh dunia. (ECOSOC 2006)

[37] Kabeer (2007) telah menunjukkan bagaimana kasualisasi<sup>3</sup>, fleksibilisasi, dan informalisasi tenaga kerja perempuan telah dibenarkan oleh ideologi lama yaitu laki-laki adalah “pencari nafkah utama”, yang membenarkan upah rendah bagi perempuan sebagai “pencari nafkah sekunder”. Akan tetapi, dengan meningkatnya

---

<sup>3</sup> *Kasualisasi* adalah istilah di bidang sumber daya manusia yang bermakna perubahan praktik kerja sehingga tenaga kerja yang sebelumnya sudah menjadi tenaga kerja regular dipekerjakan kembali dengan status tenaga kerja lepas



ketidakpastian upah buruh laki-laki, maka banyak perempuan terpaksa mengambil pekerjaan berbayar, yang terkadang menuntunnya untuk bermigrasi demi bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan rumah tangga yang makin meningkat. Dengan tidak meratanya kesempatan mengenyam pendidikan formal, kepemilikan tanah dan akses terhadap penggunaan lahan, dan tuntutan pada pekerjaan perawatan dan aktivitas lain yang sebelumnya dilakukan dalam ekonomi formal, perempuan memiliki lebih sedikit pilihan mengenai tempat bekerja dan apa yang dapat dikerjakan (Alsop & Healey 2008).

[38] Walaupun telah diketahui bahwa perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam pekerjaan secara keseluruhan, tetapi lebih sedikit waktu dalam pekerjaan berbayar, dan umumnya memiliki lebih sedikit waktu yang tersedia daripada laki-laki. Akan tetapi, kita tidak tahu bagaimana tekanan yang dialami perempuan berdampak pada kesempatan yang tersedia untuk berkonsentrasi pada pembelajaran. Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, terdapat prioritas penelitian mendesak yang bertujuan untuk lebih memahami perubahan posisi perempuan dalam pekerjaan. Lagipula, penelitian masih harus dilakukan untuk menyelidiki perpindahan perempuan miskin untuk mencari lapangan pekerjaan dalam bidang jasa di negara yang lebih makmur, dan bagaimana hal ini berdampak pada potensi mereka untuk “belajar agar mereka dapat melepaskan diri” dari hubungan eksploitatif tersebut.

[39] Sebagian dari fokus penelitian khusus seyogyanya ditujukan pada penelitian mengenai pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang sedang berlangsung dan mengalami perubahan dilihat dari segi waktu, tempat, dan khususnya nilai. Peningkatan peran perempuan sebagai pencari nafkah telah disorot. Akan tetapi, penolakan laki-laki untuk mengambil bagian yang adil dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan perawatan tak berbayar memerlukan wawasan yang lebih jauh. Hal ini telah memberikan kontribusi terhadap “peningkatan permintaan tenaga kerja perempuan berbayar dalam hal jasa yang sebelumnya diberikan secara gratis dalam hubungan perkawinan dan keluarga” (Kabeer 2007:49), atau pelayanan sosial yang disediakan dan dibayar oleh negara. Pengecualian dari tugas domestik tak

berbayar tampaknya menjadi salah satu hak istimewa yang paling dipertahankan dengan kuat oleh laki-laki, dan kontribusi terhadap pekerjaan tersebut sering ditutupi untuk menjaga citra maskulin. Apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan mitos lama bahwa “pekerjaan perempuan” hanya dapat dilakukan oleh perempuan? Apa yang dapat dilakukan agar pekerjaan perawatan dapat diakui sebagai pekerjaan yang diinginkan secara moral dan penting secara ekonomis? Menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin merupakan langkah pertama supaya laki-laki memandang pekerjaan rumah sebagai pekerjaan yang sah dan produktif. Hal ini juga merupakan tantangan bagi pendidikan.

### **Mengatasi risiko**

[40] Dalam ketergesaan untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan akses ekonomi dan kinerja, realitas dan kondisi kerja sehari-hari perempuan dan laki-laki miskin diabaikan, dan dianggap tidak penting. Kajian penghidupan membantu mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan pekerjaan orang miskin “serta risiko seperti kehilangan benda yang dimiliki, penyakit, cacat dan kematian” (Chen et al. 2005:90). Ikut tidaknya Siphon, Themba, dan Khumalo dalam pemelajaran terorganisir bukan sekedar masalah motivasi. Untuk mereka, memutuskan hal ini melibatkan proses pemikiran kompleks untuk menimbang biaya dan manfaat, risiko dan keuntungan. Secara proporsional, rumah tangga miskin lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk biaya makanan daripada rumah tangga kaya. Bagi keluarga yang miskin, menghadiri sesi belajar itu menghilangkan sebagian atau seluruh upah yang diperoleh dalam sehari. Selain itu, pengeluaran energi dan uang untuk biaya transportasi menghadiri sesi belajar seringkali di luar kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, menghadiri sesi belajar berisiko mengurangi pemenuhan kebutuhan makanan atau kesehatan.

[41] Kajian pekerjaan secara terperinci dapat membantu mengidentifikasi dan memahami secara betul sifat dari suatu keadaan yang berbahaya, dan dampaknya pada berbagai kerentanan. Misalnya, ancaman yang terkait dengan pekerjaan informal

PKL yang meliputi cuaca (suhu ekstrim), buruknya sanitasi dan akses pada air bersih, keracunan timbal dan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh asap kendaraan, dan pelecehan oleh masyarakat umum atau pejabat kota. Pedagang yang terkena tekanan ini tidak perlu belajar (dari orang luar) tentang risiko lagi, seperti juga mereka tidak membutuhkan pelajaran tentang kemiskinan. Akan tetapi, mereka membutuhkan berbagai cara untuk mengorganisir dan memobilisasi guna mendapatkan akses pada air dan tempat tinggal. Mereka juga perlu belajar untuk membuat perjanjian dan mendapatkan informasi hukum mengenai penggunaan ruang publik. Materi semacam itu dapat menjadi bahan dalam sesi belajar mengajar. Pelajaran seperti itu hanya dapat dipelajari secara kolektif, dan oleh karenanya, masalah tempat dan waktu harus disepakati.

[42] Contoh pelajaran relevan yang lain dapat berfokus pada bencana “alam”, yang menunjukkan bagaimana seringkali manusialah, bukan alam, yang menciptakan situasi krisis dan keadaan darurat. Misalnya, menyalahkan kemarau panjang sebagai penyebab kelaparan, menghilangkan sorotan terhadap politisi yang gagal membaca dan merespon sistem peringatan dini dalam rangka menciptakan mekanisme pencegahan atau pengurangan korban jiwa dan kerusakan (Von Kotze & Holloway 1996). Pendapat bahwa kelaparan disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang diperbaiki melalui “peningkatan kerja pemerintahan”, “peningkatan investasi” dan “pemotongan layanan sosial” adalah solusi neo-liberal yang mengaburkan penyebab kelaparan dalam kapitalisme global. Bush (2007:152) mengemukakan, "Karakteristik dominan dari krisis pangan telah menghalangi penjelasan yang menyerang struktur kekuasaan yang menciptakan dan meneruskan kerawanan pangan”.

### **Pentingnya makanan**

[43] Penelitian mengenai persepsi lokal tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kata dan ekspresi figuratif seputar kemiskinan seringkali berhubungan dengan kelaparan. Dari pengalaman orang banyak tahu mengenai “dapur tak berasap”, “seperti ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang”, atau “makan tanah”.

Krisis terbesar saat ini yang dihadapi dunia adalah makanan. Ini menjadi sangat nyata ketika ada keadaan darurat yang memengaruhi banyak orang, yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, dan banjir. Kondisi kekurangan gizi yang berkaitan dengan isolasi dan pengesampingan sosial dan ekonomi, status kesehatan yang buruk dan tekanan politik membuat masyarakat miskin rentan terhadap guncangan lebih lanjut. Namun sebagian besar pembahasan mengenai pekerjaan dan pembelajaran mengabaikan masalah ini. Kalau kita mengatur kembali pemikiran kita mengenai pembelajaran dan pendidikan, dan menempatkan nutrisi yang memadai dan mudah diakses pada prioritas pertama, perubahan seperti apa yang akan terjadi pada pemikiran kita mengenai pembelajaran dan pendidikan? Bagi sebagian orang, makanan dianggap sebagai komoditas dan pilihan gaya hidup. Akan tetapi, bagi orang lain, makanan tetap menjadi kebutuhan dasar yang seringkali tidak dapat dipenuhi.

[44] Semakin banyak tersedia data mengenai angka kenaikan harga makanan terkini dan dampaknya. Sebagai contoh, *Economic Commission for Latin America and the Caribbean* (ECLAC) menyatakan proyeksi kemiskinan tahun 2007 bagi negara-negara Amerika Latin adalah

peningkatan harga pangan sebanyak 15 persen menimbulkan peningkatan kemiskinan dari 12,7 persen menjadi 15,9 persen. Ini berarti bahwa kenaikan harga akan memasukkan 15,7 juta warga Amerika Latin ke dalam kemiskinan. Mengenai tingkat kemiskinan, kenaikan harga akan memiliki efek yang sama karena jumlah penduduk yang sama akan menjadi miskin. (Dikutip dalam Ballara 2007)

[45] Solusi yang disarankan adalah implementasi strategi untuk memasukkan belahan dunia Selatan ke dalam ekonomi dunia, termasuk pertumbuhan berbasis ekspor, peningkatan produksi tanaman yang menghasilkan uang, dan penciptaan pasar efisien. Respon pendidikan dan pelatihan umumnya adalah untuk “membangun kapasitas lokal” melalui penciptaan penyuluh paraprofessional di bidang pertanian,

gizi dan kesehatan. Sementara pelatihan penyuluh dan pemasukan finansial untuk perangkat keras dapat berdaya guna, mereka sering seiring sejalan dengan sistem pertanian yang berusaha untuk menggantikan sistem pertanian yang lama. Bagaimana masyarakat lokal memahami penggantian satu sistem pengetahuan dan serangkaian teknologi dengan yang lain akan menjadi subyek dari penyelidikan penelitian lebih lanjut.

[46] Para produsen utama pangan tetap perempuan, bukan hanya dalam hal persiapan untuk konsumsi, tetapi juga dalam hal menumbuhkan, menyimpan, dan melestarikan tanaman, dan menjual hasilnya. Seringkali perempuan merupakan pelestari dan guru pengetahuan tentang makanan sehingga mereka memegang peranan utama untuk hidup sehat dan kelangsungan hidup. Namun kebijakan dan praktik sosial ataupun ekonomi sering menganggap remeh kemampuan perempuan untuk mereproduksi dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka, karena kapitalisme tidak memberi nilai pada produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kapitalisme hanya memberi nilai pada produksi tanaman untuk dijual. Apa yang akan kita makan di masa depan jika perempuan meninggalkan tanah sebagai buruh migran dan kaum muda meninggalkan pedesaan untuk mencari gaya hidup lain? Ini tentunya merupakan tantangan bagi penelitian dan pendidikan.

### **Kesimpulan: Pendidik Orang Dewasa dalam Era Neo Liberal**

[47] Pendidikan dianggap sebagai solusi mujarab untuk semua ketidakadilan sosial. Akan tetapi, tantangan bagi praktisi pendidikan yang kritis adalah untuk bergabung dalam dan mendukung intervensi praktis yang membuka jalan bagi pendidikan: bantuan sosial, kredit tanpa agunan (seperti di Bangladesh melalui Bank Grameen), pembatalan utang, dan penyediaan pengasuhan anak, membuka jalan bagi orang yang terlibat dan berpartisipasi dalam pendidikan sebagai persiapan untuk membentuk dunia yang lebih adil dan setara. Gouthro (2000) menyarankan,

sebagai pendidik orang dewasa, kita harus menilai apakah peran kita hanya untuk mempertahankan dan mendukung arah pendidikan yang ditentukan

oleh pemerintah dan sektor perusahaan, atau apakah kita memiliki peranan kritis dalam menilai tujuan pendidikan orang dewasa. (2000:60).

[48] Jelas, saya menyarankan bahwa dalam konteks kapitalisme global, praktisi pendidikan yang mempunyai tujuan sosial memiliki peran krusial dalam mengajukan pertanyaan penting, mendorong agenda penelitian yang kontra hegemoni, dan berpihak kepada mereka yang tidak mendapatkan keadilan sosial, termasuk memajukan pendidikan dan pelatihan. Karena mereka jugalah manusia dan warga dunia, pendidik orang dewasa sangat terlibat dalam hidup dan kehidupan Shipo, Thembisa dan Khumalo. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari ketiga orang itu, dan penelitian mengenai pekerjaan dan pembelajaran harus dimulai dengan mendengarkan dan mengobservasi, mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi dalam dialog yang produktif. Aktivitas mendengarkan itu harus didasarkan pada dengan rasa hormat dan belas kasihan, atau apa Gorz (1999) sebutkan sebagai “kasih”. Dia menuntut bahwa tindakan pengajaran merupakan suatu tindakan mengasihi, ketika guru/pendidik adalah pribadi acuan yang membuat pemelajar “*merasa* layak mendapatkan *kasih tanpa syarat*, dan *percaya diri* akan kapasitas mereka untuk belajar, bertindak, melaksanakan proyek” (1999: 68; dicetak miring dalam teks asli). Hubungan pendidikan, pembelajaran dan pekerjaan harus lebih dari sekedar hubungan instrumental dan proses. Mari kita berpihak pada pembelajaran dan pekerjaan dalam kerangka keamanan penghidupan.

**BAB 4****TEKS SUMBER****1. Turning work and lifelong learning inside out: A Marxist—feminist attempt****Shahrzad Mojab****Introduction**

[1] Thinking through the two concepts of ‘work’ and ‘lifelong learning’ and the modes and methods through which they intersect, contradict or collude is not an easy task. It is even more daunting to attempt a Marxist—feminist approach, which has a special interest in both work and learning. There are at least two obstacles. First is the proliferation of literature on work and lifelong learning, which is theoretically and methodologically diverse, with much borrowing from disciplinary—based knowledges such as sociology and psychology, and from more interdisciplinary—based knowledges such as women’s studies and adult education. It is not possible to cover critically this vast body of knowledge in this chapter; rather, I will limit the scope by engaging in arguments that claim ‘critical’ as a theoretical positioning. The second barrier is the fierce intellectual animosity towards Marxist analysis, in particular Marxist—feminism, and the declaration of it as an irrelevant and outdated mode of analysis. The two situations are closely intertwined in the sense that the exclusion of radical, critical and revolutionary perspectives is disguised in the diversity of disciplinary and area—studies approaches to work and learning. It is in this complex context that I embark on a journey of self—inquiry on my own intellectual relationship with this topic, which has been uneasy and inconsistent, and even at times ambivalent and unsettling.

[2] In this chapter I ground the analysis of the relations between work and lifelong learning in a historical and materialist understanding of the current world order. From this perspective, capitalism, unevenly developed throughout the world, is the material logic of social life and shapes the ways in which people live, learn, work, relate and think. Labour and capital, major building blocks of the current world order, co-exist in unity and conflict. However, it is the contradiction between the two that have shaped political and ideological struggles in adult education.

[3] It is not difficult to see in daily news report that the ongoing structural transformations in capitalism — for instance, the current round of globalisation — have exacerbated rather than changed the nature of contradictions between labour and capital. This observation challenges the claim that with the emergence of communication technologies, or mobile, flexible, service-oriented labour, capitalist production practices and relations have fundamentally changed and radically transformed. However, the particularity of the current moment in capitalism — that is, globalisation-as-imperialism — cannot be ignored. In its advanced imperialist stage, capitalism today, as in the past, combines the need to cross national borders (for purposes of ‘free trade’) with the urge to maintain spheres of influence and even new forms of colonisation through war and occupation. While the borders may be loosened for the flow of commodities, they are tightened in order to exclude unwanted immigrant labour and refugees. Borders within the European Union have indeed fallen down in unprecedented ways, but the continent has emerged as ‘Fortress Europe’, closing its doors to ‘economic migrants’ and refugees from African and Asian countries. Similarly, Australia, Canada, the US and other Western states have tightened their borders. At the same time, surveillance of citizens, enhanced by new technologies, has taken unprecedented dimensions. Capitalist states identifying themselves as ‘liberal democracies’ have turned into ‘national security’ states. The gap between the rich and the poor has been growing worldwide, and new forms of slavery have emerged in Asia, Africa and Latin America (Bales 2005). The trafficking of women and children, war, poverty, ecocide and global warming pose



real threats to the welfare of human beings and all other species. In the midst of an apparent disorder in the world system, the US, as the largest economic power, is able to mount wars (in Afghanistan and Iraq) and shape policy in major international organs such as the G8, the World Bank, the International Monetary Fund, and UNESCO and other UN agencies. While the US may be seen as an imperialist power in decline, as Britain and France were by World War II, its hegemony may also be challenged by emerging imperialist rivals such as India, China and Russia.

[4] My goal in this chapter is to engage with a wide range of debates on work and lifelong learning in this specific historical moment. The location of this knowledge is within what is known as ‘Western democracies’ although similar critical thinking is available throughout the world. In order to organize my thoughts, I present ‘three observations’ and then propose ‘three theses’ as a way to push our thinking forward. I hope that through this process of Marxist—feminist self—inquiry and interrogation I will be able to initiate renewed radical/critical thinking on the connections/disconnections or resonances/dissonances between work and lifelong learning.

### **Three observations**

[5] *Observation 1: Lifelong learning is a contested concept.* In my reading of the existing literature, lifelong learning has been deployed in two ways. First, it is a central concept in the hegemonic claim that lack of skills causes unemployment; it supposes that constant retraining prepares workers to be ultimately adaptable and always ready to acquire new skills as the needs of capital dictate. Second, lifelong learning has been marshaled as an ideological concept in two ways: one, which is intrinsically related to the previous point, is that the concept has become an ideological distraction that shifts the burden of increasing adaptability to the worker, and the other is at the same time a ray of hope for a more democratic and engaged citizenry. It is the responsibility of individuals to make themselves better citizens by

participating fully in democracy. This ideological conception of lifelong learning is at the core of the neo-liberal articulation of the relations between education/learning/training/skilling and the project of liberal democracy.

[6] Despite the knowledge explosion on lifelong learning, I still find the most comprehensive critique of the concept in Frank Coffield's important article 'Breaking the consensus: Lifelong learning as social control' (Coffield 1999). Coffield notes that despite all the debates, there is a consensus that has developed over the last 30 years to the effect that lifelong learning, on its own, will solve a wide range of educational, social and political ills. He states that this consensus is naive, limited, deficient, dangerous and diversionary. Coffield asks: 'If the thesis is so poor why is it so popular?' (1999:479). He provides an answer by arguing: 'It legitimates increased expenditure on education'; 'It provides politicians with the pretext for action'; 'It deflects attention from the need for economic and social reform'; and 'It offers the comforting illusion that for every complex problem there is one simple solution' (1999:486). He calls this policy response to market demands 'compulsory emancipation' through lifelong learning (1999:489). Nonetheless, Coffield's alternative proposal is framed in notions of liberal democracy which avoid a deeper analysis of capitalist relations of power. It is important to note that a similar critique was provided by Ivar Berg two decades earlier (Breg 1970).

[7] The presence of contestation, as I have observed it, does not make 'lifelong learning' as a policy and practice, irrelevant. It is the circularity of the argument and the illusive nature of the concept that is not being sufficiently articulated in the literature; hence my second observation.

[8] *Observation 2: The literature provides a 'critique', without being 'critical', of the policy and practice of lifelong learning and its implications for work, training and adult education.* I am borrowing from Teresa Ebert (1996) the distinction between 'critique' as a descriptive process and 'critical' as an analysis for change. There is a sizeable body of literature in lifelong learning that provides a 'critique' of capitalism.

While this body of literature is important in understanding relationships between adult education and capitalist social relations, it does not provide the ‘critical’ tools to engage in a rigorous analysis of the ideological link between lifelong learning and the capitalist mode of labour exploitation. Adult educators have been interrogating the process of knowledge production and the conception of knowledge as an object with the same propositions used in the explanation of commodity. This engagement is best manifested in the critique of human capital theory. The main argument of human capital theory revolves around the positive and direct relations between knowledge and skill attainment and social status and mobility. The theory assumes that people with more years of schooling and training inevitably end up with higher – status jobs and higher wages; therefore, an expanding market economy needs not only the availability of economic capital but also human capital in the form of an educated, well-trained, flexible and skilled workforce. In human capital theory knowledge is an unchanging, unproblematic object or thing, unrelated to human beings, possessed by some and imparted to others.

[9] The ‘critique’ of human capital theory directs us to the oppositional discourse of adult education and learning, but this theoretical position obscures the relationship between capital and labour. Ebert argues that this type of analysis will make visible the effects of social phenomena (training/learning) and will ‘hollow out the materialist sense of class as relations of property and exploitation’ (Ebert & Zavarzadeh 2008: xiv). The diverse perspectives one finds in human capital theory all converge in their insistence on working within the system of capitalism to reform it.

[10] The reformist approach calls for the reorganization of adult education into a training and skilling enterprise fully responsive to the requirements of the market. Although visions about the goals and directions of adult education are diverse and difficult to synthesise, I will focus here on a significant divide among adult educators. This division appears to be over the relationship between education and economy or work and learning, but in essence the theoretical and practical struggle is about the position of human beings in this rapidly shifting and changing economy. Simply put,

it is about class position and struggle. In this economy, the workforce is expected to be adaptable, flexible and able to respond quickly to skill demands of the market under conditions of the unceasing movement of capital in search of more profitable opportunities. The workforce – that is, the majority of people, particularly in the South – is rendered disposable. It is not difficult to realize that capital always finds the cheap labour that it requires, and it is only where capital requires particular labour skills, and particular levels of education, that it might be interested in investing in upgrading, skilling and retraining of workers.

[11] *Observation 3: One outcome of the conceptual and theoretical messiness in researching work and lifelong learning has been the normalization of capitalism. I have argued so far that the descriptive ‘critique’ of lifelong learning and work renders capitalist relations invisible in lifelong learning and work. Lifelong learning in a ‘critical’ analysis will be interpreted as the logic of capital. In other words, it is the capitalist exploitation of labour that produces the need for lifelong learning. The policy attention to a skilled labour force and the need for training/retraining is a capitalist response to its own logic. Turning workers into ‘learning subjects’ or ‘learning citizens’ is consistent with the politics of citizenship in liberal democracies.*

[12] In Canada, there is an important site of scholarship on lifelong learning with a focus on immigrant women. I will use this work to illustrate the notion of ‘normalisation’ of capitalist relations in the literature on lifelong learning and work. Research on immigrant women and work has produced a credible body of knowledge crossing disciplinary boundaries and encompassing contending theoretical and methodological perspectives. This body of literature is consolidated around the following themes: access/accommodation, training/skilling and work ghettoisation – that is, the prevalence of immigrant women in service work, contingent work and home-based work. My argument is that we have exhausted this topic within the spectrum of divergent theoretical perspectives. I also claim that studying different work settings, diverse immigrant communities or a different region of the world will not significantly add to our knowledge in understanding what constitutes the

fundamental contradictions in exclusion, discrimination or marginalization of immigrant women in the market economy. The dominant discourse has been no more than a liberal–capitalist mystification of what is known in Marxist theory as exploitation of labour. Indeed, concepts such as ‘access’, ‘accommodation’, ‘marginalisation’, ‘discrimination’ or ‘exclusion’ only reframe exploitation into legal, administrative, managerial, moral or cultural preferences, and limit our understanding of the dynamics of exploitation within the capitalist social and economic formation. What about racialised, gendered, national divisions of labour that enhance the exploitability of sectors of the vulnerable labour force? Are these mere mystifications, or the modalities through which exploitation is achieved?

[13] In the context of Canada, the last two decades have been pivotal in creating a body of credible knowledge that crosses disciplinary boundaries in explaining, analysing, and proposing change in order to improve access, accommodation, inclusion, work conditions and work status of women of colour and immigrant women in workplaces and the labour market. Immigrant women’s work has been the focus of this flourishing knowledge production. In the past decade in my institution (the University of Toronto) alone, roughly 50 MA theses and PhD dissertations have taken immigrant women come to Canada, how they get jobs and what are the processes that determine which ones they get. We have examined the prior experience and learning competency of these women, as well as assessed what kind of skills they acquire. We have also examined the cultural processes that keep them in certain sectors of the labour market, and studied the learning needs imposed upon them by their social placement.

[14] The literature has also developed a set of terms that enables us to identify various trends, structure and social relations. For instance, marginalisation, access/accommodation, discrimination and exclusion, racism and sexism allow us to critically examine the conditions under which labour of a certain kind remains labour of a certain kind. Some of the scholarship has used a framework that assesses immigrant women, the professionals, and determines the former’s needs by proposing

how we can make them more like the latter group. I argue that issue of ‘professionalisation’ and ‘accreditation’, more than any other issues arising from this literature, have captured the imagination of policy-makers, politicians and those who advocate for and represent immigrant constituencies. The response has been the funding of organisations, sometimes ethnic-specific, or profession-focused service – oriented agencies.

[15] Tracing my own intellectual and epistemological trajectory in understanding this social phenomenon, I have noticed that so far I have been able, at best, to provide a partial explanation and reveal the appearance of a complex social phenomenon but not its essence. In recent decades, with the acceleration of the global neo-liberal agenda, comprising war, militarization, displacement, increasing population movements and new immigration policies, a series of important changes has taken place in the labour force. One such change is further hierarchisation of the labour force. This complex process is happening, first, through the creation of a highly specialized workforce to serve the demands of the ‘knowledge economy’; and second, through structuring a workforce that is contingent, flexible, expendable, disposable and replaceable, in order to engage in shifting and more precarious, scattered, mobile forms of production relations made possible by technological advances and the rapidity of electronic capital flows. To explain where immigrant women are located in this hierarchy, I contributed to the debate on ‘skilling’, ‘deskilling’ and ‘reskilling’ of immigrant women, where I have also noted the lifelong ‘learning’, as far as women of colour are concerned, becomes lifelong ‘training’ in its policy and practice formulation (Mojab 2000). I concluded, based on fieldwork among more than 80 immigrant women, that the waste of the skilled labour force is endemic to the dynamics of the capitalist economy.

[16] To sum up, the literature on lifelong learning and work often normalizes the capitalist mode of production and reproduction and therefore fails to analyse capital/labour contradictions, especially exploitation based on race and gender, as the

source or cause of capitalism rather than its effect. Based on these observations, I would like to propose the following three theses.

### **Three theses**

[17] *Thesis 1: Any adequate theory of work, learning and lifelong learning should give equal attention to the complex relations of production under capitalism.* Our understanding of work, especially women's work, continues to be obscured by conceptual and theoretical frameworks that present the capitalist organization of society as a natural order that can be perfected but never replaced. As argued above, the rather vast literature on the topic is filled with concepts that seem to provide radical insights into the dynamics of work. For instance, concepts such as marginalization, discrimination or exclusion give a critical direction to our understanding. However, these concepts veil rather unveil one crucial social relationship between capital and labour — that is, 'exploitation'. Concepts such as 'access', 'accommodation' and 'inclusion' provide a panacea to the more dehumanizing aspects of the relationship but fail to envision a systemic alternative to it.

[18] Social theory, especially since the proclamation of the 'end of history', shies away from system—changing concepts and ideas. For instance, it is now appropriate to conceptualise the relationship between labour and capital in any imaginable way except in terms of exploitation, alienation or conceptual frameworks that direct our thinking to the domain of alternatives to capitalism. We are led to believe that capitalist prosperity is created independent of labour. Dorothy Smith lays out a foundation for thinking through these complexities which is important to repeat at length here:

It is important to preserve a sense of capitalism as an essentially dynamic process continually transforming the 'ground' on which we stand so that we are always continually experiencing changing historical process. It is one of the problems of the strategy of the intellectual world that our categories and

concepts fix an actuality into seemingly unchanging forms and then we do our work in trying to find out how to present society in that way. This we must avoid. We must try to find out how to see our society as continually moving and to avoid introducing an artificial fixity into what we make of it. The society as we find it at any one moment is the product of an historical process. It is a process which is not 'complete' at any one time. The various 'impulses' generated by the essentially dynamic process of capitalism do not come to rest in their own completion or in the working out to the point of equilibrium of systematic interactions. The process of change is itself unceasing and at any moment we catch only an atemporal slice of a moving process. Hence to understand the properties, movement, 'structure' of the present, we must be able to disentwine the strands of development which determine the character and relations of the present in Western capitalism. (Smith 1985:7—8)

[19] This is a guideline for the analytical frame that I identify as Marxist—feminist . A framework that is feminist, historical—materialist, dialectical and critical leads us to ask these four central questions: Why does the concept of lifelong learning arise at this particular moment? How does work and learning relate to the capitalist mode of production? What are the contradictions within the concept of lifelong learning? How can we uncover the social relations of work and learning that are not visible on the surface? In other words, what, specifically, is it about the current relations of production that fosters a preoccupation with training and lifelong learning?

[20] *Thesis 2: A Marxist—feminist dialectical conception of work and lifelong learning is the most productive mode of analysis for analyzing immigrant women's work.* Employing Marxist—feminist dialectical conceptions of work and lifelong learning, we can see that it is not simply women of colour's class, race, sexuality or gender that is determined by the economic system, but also their whole subjectivity. Immigrant women are 'marginalised' by capital, and we can now see that their 'marginalisation' is not a product of contingent structures such as call centres, but is



constitutive and necessary to the capitalist relation. We study women and come to know what particular groups of marginalised women of colour experience or lack training, and we may even develop methods and programmes that facilitate the movement of particular women from peripheral work into professional work, but we cannot ameliorate or improve the precarious nature of their work.

[21] The current literature on immigrant women and work has described their position in the labour market in much detail. This body of research is incredibly useful in describing barriers that lock them into marginalised or contingent work, such as language problems, lack of recognised accreditation and a lack of access to professional jobs. Furthermore this literature, where it has been critical, deals with issues in globalisation, including offshore production, free-trade-zone processing and cheap labour, and has described how present immigration policies result from labour planning rooted in settler-colonialist ideologies. We can assert that the literature has developed a sufficiently deep understanding of the way in which race and gender construct the positions of these subjects and the labour market as a whole.

[22] What has been lacking, however, is an attempt to integrate an analysis of race, gender and class in a Marxist dialectical sense with lifelong learning, work and adult learning. Where the literature has invoked a critique of capitalist relations, it has done so superficially, by treating these relations as a thing that can be separately analysed, rather than as the context that produces not only the barriers and policies under examination, but also the subjects themselves, and our study of them. By leaving aside capital relations, or at best by treating them as a force among others, this literature has done little besides explaining the appearance of this force, we have oversimplified the problematic so that research presents a picture in which the amelioration of immigrant women's positions requires no more than the changing of labour, learning and work policies and funding allocations. However, immigrant women's lives are not abnormalities produced by inadequate policies; rather, these policies are adopted in order to reproduce conditions in which capital can thrive at the expense of labour.

[23] It is not surprising, therefore, that the body of academic literature in adult education has produced no perceptible changes either in state or corporate policy, or in the situations of immigrant women themselves. Instead, what we have created is a series of structures, organisations and policies that have revolved around the issue of ‘access’ to jobs, to education or to training, all of which not only act as an additional layer of bureaucratic control, but also allow further exploitation of immigrant women by charging fees and demanding their time, all the while producing no discernible results. With the kind of analysis I am proposing, one that centres itself on the concept of gender and race exploitation, we can see that these structures are no more coincidental than the forces whose effects they were developed to combat. Now, immigrant women are not only estranged from the products of their labour and their own knowledge, but are also alienated from the possibility (‘access’) provided by commodified, exchangeable labour power.

[24] *Thesis 3: If we relocate and reread the literature on work and lifelong learning in the context of war, occupation, militarism, poverty and patriarchy, new sets of contradictory relations will emerge between lifelong learning and work.* I began by stating the obvious: lifelong learning is a highly contested concept. Now I am proposing to muddy these already murky waters by dislocating its pedagogical, theoretical and policy frames to sites of war, occupation, displacement and dispossession. By doing so, we can see that the connecting thread here is the discovery of a universal ‘life in transition’ as a mode of being and learning. Women whose experience of the actualities of violence falls outside the boundaries of lifelong learning policy, pedagogy, practice and theorisation are women who are or who have been historically excluded as adult learners. But, in addition, learning is happening regardless of this exclusion. Helen Colley, drawing extensively on the results of my research and analysis on Kurdish women’s lives and struggles, concludes that ‘[o]ne lesson we have to learn from studies like that of the Kurdish women is that we may need to devote further attention to learning associated with collective consciousness,

resistance and struggle and to the life–course transition associated with that learning, if those power relations are to be challenged or overturned’ (Colley 2007: 440).

[25] The discussion here has so far largely avoided the classification of learning according to concepts derived from the institutional practice and study of lifelong learning. As I have noted elsewhere:

What is lacking... is an attempt to integrate an analysis of race, gender, class, and learning in a Marxist dialectical sense. An inquiry into ‘learning’, not in terms of its forms — that is formal, non–formal, and informal — but learning as class consciousness will require a merging of Marxist methodology and anti–oppression frameworks. While consciousness can be thought of in terms of the distance between subjective and objective interests, this does not mean that the goal is to move a group toward a static set of objective interests. (Mojab 2006: 167)

#### **Where to go from here?**

[26] In trying to understand what I have been doing so far, I raise two simple questions. First, what is lifelong learning for? Second, how do we understand and explain the relationship between work and lifelong learning? The more likely or more sincere response to both questions would be, ‘Lifelong learning is for the purpose of training skilled labour and delivering it to the capitalist market’, a response that reduces lifelong learning to the appendage of the market. I realize that most of us do not aim at reducing lifelong learning to the requirements of the market. Indeed, we have for a long time pursued lofty ideals in relation to what we are doing. In 1997, participants in CONFINTEA V in Hamburg reaffirmed ‘that only human–centred development and a participatory society based on the full respect of human rights will lead to sustainable and equitable development’. Even more, the participants insisted that

[a]dult education thus become more than a right; it is a key to the twenty-first century. It is both a consequence of active citizenship and a condition for full participation in society. It is a powerful concept for fostering ecologically sustainable development, for promoting democracy, justice, gender equity, and scientific, social and economic development, and for building a world in which violent conflict is replaced by dialogue and a culture of peace based on justice. Adult learning can shape identity and give meaning to life. Learning throughout life implies a rethinking of content to reflect such factors as age, gender equality, disability, language, culture and economic disparities.

[27] Twelve years after CONFINTEA V, I believe that even if we have taken one step forwards, we have taken many steps backwards. The very idea of citizenship and democracy is under attack. In many parts of the world, adult education is not a right; in fact, illiteracy is still a major obstacle to development. About one-fifth of the adult population of the world is illiterate, and 100 million street children do not attend primary school . By the mid 1990s there were about 100 million street children. The trafficking of women and children has taken unprecedented dimensions (Anti-slavery International 2001; US State Dept 2008).

[28] Is there any trace of ‘human-centred development or a participatory society’, which the Hamburg Declaration calls for? The neo-liberal regime that emerged in North America and Europe in the last two decades and has been imposed on the rest of the world is based on the supremacy of the market. The market is the arbitrator of relations not only among human beings but also among nations, cultures and countries. Under this economic order, poverty is on the rise while tiny groups get richer and richer.

[29] Capitalism, both liberal and neo-liberal, is the most productive system in history. It produces much more than the population of a country can consume. Yet it does so in part by generating poverty. Furthermore, in order to reproduce itself, it has to expand. This expansion happens both within the borders of a given nation and on a

world scale — unceasing globalisation. Capital cannot survive without colonial domination. War is inevitably tied to this economy. Capitalism has created a military–industrial complex that calls for wars even when the need for them cannot be justified; annual military spending is now more than a trillion dollars. Since the 1990s, 44 countries, or 25 per cent of the world’s states, have been at war, generating enormous human and ecological devastation. The capitalist ability to produce is at the same time the ability to destroy. It is now argued that neo–liberal capitalism thrives on disaster (Klein 2007). We may take a step further and suggest that capitalism itself has turned into disaster. If early commercial capitalism had thrived on slavery and colonialism, the globalised neo–liberal regime of late capitalism is also reviving slavery. There is slavery of the old style in parts of Asia, Africa and Latin America. Today, Western capitalism prospers on the cheap labour of two billion people in China and India, where workers and peasants are subjected to new forms of serfdom and slavery.

[30] Many of us in adult education have indeed been aware of this evolving disaster. Feminist theory helped us in understanding the ways in which women’s labour contributes to the reproduction of both capitalism and patriarchy. Advances in the study of race and colonialism allowed us to understand the racial component of learning, education, work and capitalism. Today, we have rather advanced theorisations of learning. For example, Allman (1999, 2001 and 2007), Colley (2004) and Rikowski (1999, 2001 and 2002) treat capital and labour not as things but as social relations. They see labour and capital as unity and conflict of opposites forming the capitalist socio–economic formation. However, even when we see labour/capital as social relations constitutive of the capitalist system, we do not think about its negation. We critique and often succeed in our critique of capitalism but we do not take the next step. We do not envision the future. And our failure is part of the success of capitalism in reproducing itself.

[31] To envision alternatives to capitalism is a process of understanding it. In other words, looking at capitalist social relations philosophically, it requires a process

of understanding necessity and how to negate it. The capitalist world order, as it exists, is given to us by past and present societies. Philosophically, this is the realm of necessity and we are subject to its rules, although it is possible to be free from its constraints if we are conscious of it and if we envision its negation as a condition of freedom. I am confirming here that freedom exists in unity and conflict with necessity (existing conditions, the status quo).

[32] Freedom consists in understanding and transforming necessity. And this is a process of conscious intervention in class interest, religious or ethnic belonging, and gender and racial hierarchy. As a final point, let me suggest a framework for understanding the dialectics of necessity and freedom as it applies to the relationship between work and lifelong learning. To do this I will draw on Davis Harvey's conception of 'accumulation by dispossession' (Harvey 2003) and name this process 'learning by dispossession', by which I mean that in the process of learning and work something other than 'learning' (which can be measured, evaluated or assessed on the basis of categorisation of 'formal', 'informal', and 'non-formal', or 'paid' and 'unpaid') is happening. Much like primitive capital accumulation, learning, too, has a dual characteristic — that is, it produces learning as well as something 'outside of itself' that is deeply entrenching self/mind/consciousness into a perpetual mode of capitalist social relations; to put it differently, learning produces new skills and knowledge as well as alienation and fragmentation of self/community, and confuses 'worker' with the idea of 'capitalism'. Harvey proposes that we take the dialectic of 'inside-outside' relations of capitalism seriously and that in fact 'this helps us better understand what the capitalistic form of imperialism is about' (2003:142). I also would like to propose that we expand our theoretical and methodological analysis of the relationship between work and lifelong learning to a qualitatively more sophisticated analysis of the materiality of capitalist social relations, one in which these relations are gendered, racialised and sexualized.

## **2. But what will we eat? Research question and priorities for work and learning**

**Astrid Von Kotze**

### **Introduction**

[1] Let me begin by introducing three people. Firstly, Siphso, a young boy in torn, dirty clothes standing at a traffic intersection with one hand clutching an old plastic juice bottle filled with cobbler's glue and the other stretched out in a gesture of begging. He is one of a group of street children working the first shift of the day. Secondly, Thembisa, a woman sitting under an umbrella with a baby on her lap and a toddler next to her. On the ground in front of them are small piles of vegetables for sale. Thirdly, Khumalo, who is pushing a home-made trolley heaped high with scrap metal collected over time and being delivered to a weighing station where he will sell it for a few rand.

[2] These three people could be just about anywhere in the global South. Street children are a growing phenomenon of poor countries and socially and economically deeply stratified societies. For women who have been excluded from formal education and who have no start-up capital to create an enterprise, selling basic goods is often their only option for generating an income while at the same time taking care of children and grandchildren. The modern 'hunter-gatherer' attempts to make cash from found objects, from junk and discards, from the scraps tossed out by those who have. With the spread of untreated HIV/AIDS, the impact of major disasters that create widespread homelessness and displacement, and the growing hunger of resource-poor households especially in urban areas, encounters with people such as three have become normal, raising little more than an eyebrow.

[3] Siphso, Thembisa and Khumalo are part of the more than 50 per cent of the world's people not employed in the formal economy. They and others like them work

hard trying to make a living, yet remain largely invisible in formal deliberations about learning, education and training. The report on the 1997 CONFINTEA V deliberations (UNESCO Committee 1998: 99–100) included some excellent conclusions and recommendations about education for and in the informal economy, such as the need to design interventions in a participatory way, building on existing capacities and skills within specific sectors both in terms of content and methodology; the importance of constructing bridges between non-formal and formal education; cooperation with existing networks and organizations; promoting practices of economic solidarity; and the need to consider households as economic unities.

[4] Yet, later documents seem to have ignored the studies and recommendations of the committee rather than building on their insights in order to identify appropriate research priorities (Von Kotze 2008). While recent UNESCO-UNEVOC documents (2003, 2006) emphasise the importance of work in the informal economy, planning largely excludes the radically changed structures and processes of workplaces in an increasingly neo-liberal world. This is not surprising given the diminishing role of the state in education and training interventions, the increasing commodification of learning, and the impossibility of designing one-size-fits-all curricula for radically different conditions. However, their omission is very worrying, particularly in the context of rising food prices, food shortages as crops are turned into biofuels, and looming deadlines for meeting Millennium Development Goals (MDGs).

[5] In this chapter I want to do two things: firstly, critique the persistent development thinking that informs education and work agendas, and suggest instead the ‘livelihoods perspective’ as an alternative way of approaching work, learning and education particularly with regard to the majority world; and secondly, outline research questions and priorities that derive from such a reorientation.



### **Accounting mentality**

[6] There is an incredible preoccupation in development thinking with what is measurable and quantifiable: the amount produced, the cash in the pocket, the number of people employed, etc. Along with the accounting mentality goes the production of models and systems that make it easier to reckon, calculate and tally 'outcomes'. Tick lists allow for easy stocktaking and hence appraisal of hours worked, barrels moved, containers filled, people trained. Assessment is based on the growth, increase and accumulation of whatever is being counted. Somehow, people like Sipho, Thembisa and Khumalo and their resourceful attempts to make a decent living and lead dignified lives disappear behind the statistics, inventories and measurables.

[7] In-depth studies of learning, education and training in the informal economy are hard to come by. Statistics indicate that the informal economy is growing, and in developing countries informal employment represents one-half to three-quarters of non-agricultural employment. The contribution of income from informal work to national income amounts to between 30 and 60 per cent in different countries (Chan et al. 2005, Shier 2006). Contrary to popular perceptions, the informal economy contributes between 7 and 12 per cent of gross domestic product (GDP) (Shier 2006). Yet the norm for what constitutes work remains employment in the formal economy, and the priority for education and training is human resource development or 'capacity building', accessible mainly to those who are already 'in the know' and in the system. Market conditions favour the provision of learning programmes that target individuals who want to 'invest' in themselves, hoping that in return for enrolling in life-skills and vocational training courses they will find employment. The belief that investment in personal development will generate quantifiable returns is so persistent that donors are not deterred even by a lack of reliable (or credible) figures on how the names on enrolment forms tally with 'bums on seats' and with newly employed or self-employed people.

### **Capacity building or personal development**

[8] Even in UNESCO-UNEVOC documents work is still predominantly defined as formal employment. By implication, the majority of people in the global South (including the three introduced at the beginning of the chapter) don't work. Not surprisingly, therefore, if you were to ask Khumalo about his work he would probably respond with 'I am not working'. Gathering and selling scraps, trading small quantities of products, housekeeping and care work – and indeed, the whole care economy – are not 'work'. While the care work undertaken by grandmothers, young unemployed women or community members may support and reproduce life and living, it is not valued and it is considered unproductive. The skills and knowledge of those engaged in such work are not formally recognized and accredited – and as 'unskilled workers' they become the target of training programmes.

[9] The argument most commonly advanced is that people are unemployed because they lack (a) skills and (b) self-esteem and self-confidence. Hence, they are offered 'life skills' to alter their behavior, and skills training to make them more employable. The resource pack produced by UNEVOC on behalf of UNESCO in 2006 is one example of this – except here the 'bottom line' seems to be that locals are unmotivated (and, by implication, lazy). Titled 'Learning and Working: Motivating for Skills Development', the pack is well presented: it comprises bright and colorful booklets with pictures and CDs and it offers exactly what everyone says we need – skills-training activities designed with youth in mind. The publishers explain what the pack is about:

The Campaign Package 'Learning and Working: Motivating for Skills Development' is a resource kit that provides information and tools for the preparation and implementation of awareness and motivation campaigns for marginalized groups in least developed countries. The package is relevant to all who are involved in the provision of capacity building and skills development for disadvantaged populations at the local level. The idea behind

this is to encourage people living in adverse economic conditions to enhance their social and economic perspectives by enrolling in technical and vocational education and training (TVET) to improve their occupational skills and/or by taking up self-employment activities.

[10] This introductory note reveals a number of assumptions: firstly, that ‘marginalized groups’ are excluded because they lack awareness and motivation; secondly, that ‘disadvantaged populations’ need capacity building and skills development; and thirdly, that ‘people living in adverse economic conditions’ will enhance their social and economic perspectives by improving their occupational skills through enrolling in TVET. ‘Marginalised groups’, ‘disadvantaged populations’, ‘people living in adverse economic conditions’ need to be brought into the (formal/dominant) economy. Training in personal and leadership development that leads to ‘empowerment’ is the way to do that – not, of course, effecting a shift in conditions or a change in economic policies that caused the exclusion in the first place.

[11] There is no doubt that positive mental attitudes, vision, goal setting and development of self-confidence are important attributes towards participation and assumption of leadership roles. However, motivational teaching packs often reinforce the perception that the failure to participate in decision-making is the result of personal deficiencies rather than structural constraints, and that powerful participation and leadership require individual transformation rather than broader social change, particularly with regard to patriarchal relations rooted in customs and traditional beliefs. Unless instructional strategies go hand in hand with, or supplement, structural ones, the outcome of training will be people who are more confident but still just as oppressed.

[12] In 2000, Singh published the results of a study that had revealed many of essential qualities and competencies that people demonstrate as a necessary for functioning in the informal economy: dispositions, personality traits and orientations

such as being able to compromise, to be patient, to tolerate contradictions; and a range of social communicative abilities based on the history within a community or location. None of these are likely outcomes of training courses, even though personal development-type programs claim to ‘teach’ these competencies, which are packaged as ‘communication skills’, ‘cooperation and team-building’ or ‘negotiation skills’. As Singh showed:

A small producer depends largely on his or her informal relationship with customers; advertising takes place through recommendations of friends and acquaintances; information regarding new machinery is transmitted through personal contacts. (2000:601)

[13] Thus, much of the ability to conduct business as a street vendor such as Thembisa, for example, is premised on connections and personality: who you know and how you can use that knowledge, and how to engage people in conversation, establish relations of trust, and call on or grant favours based on common friends or acquaintances.

[14] Singh’s study (2000) showed that in order to improve people’s economic position, individualizing them as targets of personal development was not as effective as linking them to networks in which they could learn about new technologies and new markets, enlarge their client base, pool knowledge and know-how, and improve their social security by establishing and strengthening social ties.

[15] The UNESCO document *Orienting Technical and Vocational Education and Training for Sustainable Development* (UNESCO-UNEVOC 2006:5) acknowledged that there cannot be a single development objective for the global South; instead, ‘appropriate strategies must be developed for both rich and poor nations’. Critical of ‘the global market economy’ in terms of its exploitation of the environment and exclusion of ‘roughly half of the world’s people’ (2006: 8), the document charged future TVET graduates with the task of ‘working at the interface between nature, technology, economy, and society’ and thus having to learn about ‘sustainable

concepts, practices and examples’ (2006:9). Consistent with this, sustainable development was defined as

a culturally-directed search for a dynamic balance in the relationship between social, economic and natural systems, a balance that seeks to promote equity between the present and the future, and the equity between the countries, races, social classes and genders. (2006: 5)

[16] Achieving a ‘balance’ suggests a number of radical shifts, the first of which would have to be the way we consider work, especially with regard to learning and education.

#### **A livelihood approach to work and learning**

[17] Maria Mies (1986) reminds us that ‘[t]he aim of all our work and human endeavour is not a never-ending expansion of wealth and commodities, but *human happiness* (as the early socialists had seen it), or the *production of life itself*’ (1986: 212; italics in original). Similarly, Andre Gorz (1999) pointed out that work has come to be understood only as a paid activity undertaken on behalf of a third party, to achieve goals set by someone other than ourselves and according to procedures and schedules laid down by the employer. If work is regarded as ‘livelihood activities’, it is taken out of pure commodity production and refocused to include the production of life. In its simplest sense a livelihood means to gaining a living (Chambers & Conway 1991). A livelihood perspective takes into account the social, economic, political, historical, geographic and demographic contexts that influence the options that people within those contexts have with regard to making a living. It considers available resources and assets and the access different people have to these, and the institutions that support the efforts of people. It also considers particular risk factors and the strategies employed by people to cope with and overcome these.

[18] Thus, a livelihood perspective takes seriously not just all those actions undertaken in order to make a living, but also includes those labours and

responsibilities associated with reproducing life (Mies 1986; Mies & Bennholdt-Thomsen 1999), and in this way provides the foundation for other kinds of work this includes housework and childcare, home gardening and fuel collection, as much as community organizing and the often small acts of reciprocity and solidarity that establish and contribute to social protection.

[19] Going beyond work as employment in the formal economy towards work as livelihood activities should not simply mean replacing one word with another. Rather, it means thinking more holistically about the actions people employ in order to do more than just survive physically, but to live a dignified, decent life. More holistic thinking is required if we want to consider sustainability, and especially establish less exploitative relationships to the environment and natural resources, and to people as our partners in systems of conviviality. If actions are to impact positively on the context of differential poverty and wealth ‘livelihood studies’ rather than ‘workplace learning’ studies will generate better understanding of how the complex daily struggles for food and the necessities of life are intertwined with care-giving, child rearing and community building, and about the kind of education and training strategies that would best support those struggles.

[20] Taking on a sustainable livelihoods perspective compels us to consider people’s lives and life chances in terms of high-risk environments. The impact of hazards such as disease/epidemics and weather phenomena on already vulnerable conditions and people renders them unable to cope. As informal workers they face additional threats: firstly, in terms of the conditions under which they live and work; and secondly, because they have low levels of income they are less likely to be able to save for emergencies or special occasions (Chen et al. 2005; Lund & Nicholson 2003). As a result, these workers are far more exposed to common contingencies such as illness, property loss, and death, without having access to the means to address these. Furthermore, as they face exclusion from the state, political institutions, and markets – that is, all those people and institutions who make the decisions that affects

them most directly – they have fewer rights or knowledge of their rights, and less access to information, infrastructure and services.

[21] To cope and to make their livelihoods sustainable requires the creation and maintenance of systems of support and a power base for wielding influence in order to effect policy changes. As the state assumes less and less responsibility for social security, people have to make their own arrangements for social protections. In the world of the rich and comfortable, this translates into insurance policies and the like; in the majority world, it means all those actions that people undertake in order to expand their capacities to cope and create safety nets for emergencies, rather than simply waiting for the delivery of commodities and services (Lund & Nicholson 2003). Primarily, this involves establishing relationships of mutuality, solidarity, and collective action. In rural areas – whether in subsistence production oriented towards food security, or cash-crop raising – there is a mutual assistance out of the recognition that economic activity is not an individualistic action but one that involves others. Workers in the informal economy organize themselves in a variety of forms, depending on issues of geography, culture, the nature and spatial/time conditions of their work, and the different types of work performed.

[22] A livelihood perspective would steer our focus towards the informal economy (and the interdependence of the formal and informal economies), making the invisible visible, and exposing poor working and living conditions and the absence of (formal) social protection. It would mean creating access to productive assets and other resources, to land, credit, marketing and technological assistance – and, hopefully, once those conditions have been created, access to and provision of education and training would follow

[23] Therefore, a livelihood perspective as the starting point for thinking about work, learning and education would mean a new, more inclusive definition of work – one that includes care work and all the unpaid, ‘free’ labour provided mainly by women. It would mean an orientation towards supporting and sustaining life rather

than the accumulation of commodities in the vain hope that ‘more’ and ‘bigger’ would also translate into ‘better’; an understanding of the diversification of livelihood activities, as opposed to ‘one job’, within a highly differentiated risk environment; a focus on the informal economy as the main employer of poorer people; and finally , a debunking of the claimed ‘inertia’ and passivity of people who require ‘motivation’.

### **Research priorities**

[24] What kind of research questions and priorities would arise from a livelihood approach? In the following sections I outline five of these

#### **Participatory curriculum design**

[25] Despite extensive research that has shown the need for participatory local curriculum construction, learning, education and training interventions are consistently designed by experts outside the target group of learners. As Gouthro (2000) put it:

A key question to be addressed in determining the future possibilities of civil society in the globalised world is who defines the educational agenda? Right now, it is determined by business and corporations, and profit thinking and investment into individual consumers rather than the future of all. (2000:70)

[26] Eleven years ago Karcher (1998) suggested that, with the growth of the informal economy all over the world, the North could learn lessons from the South and that

[t]he concepts of teaching and learning that have relevance for the informal sector must be subjected to closer scrutiny if adult education is to take account of the altered working processes and the people involved in them. It must ask itself how a dignified life can be made possible outside formal conditions of employment and which educational strategies both informal and formal are



conducive to this aim. (What, why, and how is learning to take place?) (1998:88)

[27] Further, he argued that

a[n] appropriate teaching and learning concept can only be achieved through active involvement of the concerned group, i.e. through extensive participation. For those groups are themselves best placed to formulate their needs and to define the limits of their possibilities. Appropriate approaches therefore have to be designed differently according to the situation and for each specific group – particularly for women. (1998:89)

[28] Similarly, Singh (2000) has suggested that provision of education and training needs to

take into account the traditions and values of the system of vocational learning in working life, cater to the requirements of local development and be based on an understanding of the kinds of competencies people in the informal economy want, need, and utilise, the socio-economic and cultural contexts within which they work, and how they cope and sustain their livelihood strategies. (2000:599)

[29] The first research priority, therefore, is to learn more systematically from those we wish to support. We need to better understand what would make a difference rather than rush in with prescriptions and offerings based on assumptions. What specific knowledge and know-how is required by particular sectors and groups, and how best are such knowledges acquired? Answering such questions also requires innovative research methodologies. For example, experiences in participatory rural appraisal processes illustrate how it is useful to live with, for example, poor traders in order to learn together about the particular political economies of their specific sectors and the place, time and conditional factors that would allow for concentrated learning activities. Listening, observing and working together may generate the kind

of questions that need to be asked in order to ascertain what education and training might make a real difference to their livelihood security.

### **Local and specific**

[30] Generic training modules are rarely helpful, as Chen et al. (2005) observe:

What is needed is a context-specific mix of interventions, developed in consultation with working-poor women and men and informed by an understanding of their significance in the labour force and their contribution to the economy. (2005:89)

[31] Therefore, recognizing the importance of a small-scale, local and specific orientation must be the starting point. This pertains not only to potential syllabi but also to processes and methodologies. Once the subject matter of programmes has been designed, the skills and knowledge development must take into consideration the local capabilities and traditions and dynamics of social relations with regard to their transmission or production. ‘Without a thorough analysis of local circumstances and adaptation as a necessary and appropriate, the super-imposition of foreign training methods and curricula is likely to be counter-productive as well as costly’, warned Singh (1998:98). Moreover,

developing education for the informal sector can only be successful to the extent that it reflects innovations, initiatives and approaches emerging from the informal sector itself. This is a sector the epitomizes self-help, civil society participations, transformative, on the job, autodidactic and intergenerational learning as well as learning out of school contexts – such as learning through participation in social movements. (Singh 2005: 5)

[32] This also suggests that, in particular, two important factors must be included in deliberations about learning and educations: the (unpaid) care work performed by people, particularly women; and the networking and organisation building that are time– and energy – consuming but crucial for survival and success.

[33] Another challenge is the question of how to build bridges between formal and informal learning and how to valorise informal and non-formal learning and education, and yet avoid the ‘credentialism’ so typical of the neo-liberal world. Gorz (1999) has reminded us that

nothing is more impoverishing for a culture than to see the most spontaneous effective bonds between people – sympathy, empathy, compassion, attention, communication, etc. – ‘objectified in training and qualifications’, and used to satisfy an employer or gain a client, used to ‘knowing how to sell oneself’ to the former, or how to sell things to the latter. (1999:70)

[34] Effective bonds between people cannot be taught or enshrined in qualifications. What they require is more than simply a delivery of information. How can generic outcomes-based provision be avoided in favour of negotiated ways of assessing and evaluating practice-based/site-specific learning equivalents?

[35] The second research priority, therefore, is learning about and using specific, local and traditional forms of apprenticeship, and socialisation into particular work and teaching processes and contexts. Learning that is isolated from the particular dynamics and realities of everyday livelihood activities is seldom sustained and transfer from the ‘classroom’ to the field rarely happens.

### **Focus on women**

[36] Much has been said about the dramatic changes in the labour force, in working conditions and in rising insecurity for poor people – and in particular women – due to globalisation, the increasing feminisation of both the labour force and poverty, and ongoing gender discrimination (Kabeer 2007; Bush 2007). The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) report of 2006 spells out the condition of women with regard to poverty and employment:

Of roughly 520 million working people living in extreme poverty (earning less than \$1 a day), an estimated 60 per cent are women. Women find it more

difficult than men to break out of poverty, owing to gender inequalities in the share of household responsibilities, access to education, training and employment, as well as in economic and political decision making. Women are less likely than men to hold paid and regular jobs and more often work in the informal economy; fewer women than men own businesses; and worldwide, over 60 per cent of unpaid workers in family enterprises are women. Women provide important contributions to the economy through both remunerated and unremunerated work in the labour market, at home and in the community. However, gender stereotypes, and horizontal and vertical sex segregation in the labour market contribute to gender inequality in employment worldwide. (ECOSOC 2006)

[37] Kabeer (2007) has shown how the casualisation, flexibilisation and informalisation of women's labour has been justified with the old ideology of men as the 'main breadwinners', thus warranting low pay for women as 'secondary earners'. However, with the increasing insecurity of men's paid labour many women have been forced to take up paid work – sometimes involving migration – to survive or meet the rising expectations of households. Given unequal formal educational opportunities, land ownership and access to land use, demands on care work and other activities previously carried out within the formal economy, women have less choice about where to work and what to do (Alsop & Healey 2008).

[38] While it is known that women spend more time in work overall but less time in paid work, and generally have less discretionary time than men, detailed accounts of how increasing pressures on their time and energy impact on available time for dedicated learning are lacking. If poverty is to be addressed effectively, there is therefore an urgent research priority aimed at better understanding women's changed position in terms of work. Furthermore, the migrancy of poor women in search of employment in the service economy in wealthier countries and how this affects their potential to 'learn their way out' of exploitative relations is yet to be investigated.

[39] Part of a specific research focus on women should be explorations of the ongoing and changing gender division of labour in terms of time, place and particularly value. The increase in women's breadwinning roles has already been highlighted; the refusal of men to do a fairer share of the unpaid household and care work, however, requires further insight, particularly as this has contributed to 'an increase in the demand for paid female labour in services hitherto provided through the unpaid relations of marriage and family' (Kabeer 2007:49), or social services provided and paid for by the state. Exemption from unpaid domestic chores appears to be one of the privileges most strongly defended by men, and contribution to such work is often glossed over in order to preserve the masculine image. What needs to happen so that we overcome the old myth that 'women's work' can only be done by women? How will care work come to be recognized as morally desirable and economically important? Answering such questions may constitute the first step towards men coming to embrace home-based work as legitimate and productive work. It also raises educational challenges.

#### **Addressing risk**

[40] In the hurry to provide training to improve economic access and performance, the everyday realities and conditions under which poor women and men work are overlooked and, by implication, rendered unimportant. Livelihood studies assist in identifying the risks and uncertainties associated with poor people's work 'as well as the common contingencies of property loss, illness, disability and death' (Chen et al. 2005:90). For Siphon, Thembe and Khumalo, deciding whether or not to participate in organized learning involves a complex process of weighing up costs and benefits, risks and advantages, rather than a lack of motivation. Poor households spend proportionately more resources on meeting food costs than do richer households, and the cost of forfeiting a daily income in part or wholly due to attending learning sessions is high. Similarly, the energy and cash expenditure for transport to learning sessions often exceeds a person's capacity or puts meeting food or health necessities at risk.

[41] Detailed work studies may assist in identifying and appreciating the exact nature of hazards and their impact on multiple vulnerabilities. For example, threats associated with the informal work of street vendors include exposure to weather (extreme temperatures), poor sanitation and access to clean water, lead poisoning and respiratory problems from vehicle fumes, and harassment from members of the public or municipal officials. Traders exposed to these pressures do not need to learn (from outsiders) about risk any more than they require lessons on poverty; however, different ways of organizing and mobilizing to address access to water and shelter, to forge agreements and information on by-laws about the use of public spaces and so on may well be the subject matter of teaching and learning sessions. Such lessons can only be learned collectively and therefore space and time issues must be negotiated

[42] Another example of relevant lessons may be a focus on ‘natural’ disasters, showing how it is often people, not nature, who create crisis situations and emergencies. For example, blaming famines on persistent drought removes the spotlight from politicians who fail to read and respond to advance warning systems in order to create mechanisms for averting or reducing loss of life and destruction (Von Kotze & Holloway 1996). Suggestions that hunger is caused by economic policies remedied through ‘improved governance’, ‘increased investments’ and ‘spending cuts on social services’ are neo-liberal solutions that obfuscate the cause of hunger in global capitalism. As Bush (2007:152) points out, ‘The dominant characterisation of food crisis has deterred explanations that involve any attack on the structures of power that create and perpetuate food insecurity’.

### **The importance of food**

[43] Research into local perceptions of poverty demonstrates that words and metaphors for poverty are most often related to hunger. This is because from experience people know about ‘a cat sleeping in the fireplace’, ‘eating wild food with sticks’ or ‘eating so little that it would fill a bird’s stomach’. The biggest crisis currently confronting the world is food – and this becomes especially visible when

there is an emergency triggered by hazards such as earthquakes, tsunamis, cyclones and floods and affecting huge numbers of people. Conditions of nutritional insufficiency related to social and economic isolation and exclusion, poor health status and political oppression render poor communities vulnerable to further shocks. Yet most of the deliberations on work and learning remain silent on these issues. How would our thinking about learning and education have to change if we were to rearrange our concerns and put accessible and sufficient nutrition for all at the top of our priority list? While food has come to be seen as a commodity and a lifestyle choice for some, for others it remains a basic necessity over which they often have no control.

[44] Increasingly, there are figures about the current rise in food prices and its impact. For example, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) states in its 2007 poverty projections for Latin America countries that

a 15 per cent increase in the food prices raises poverty incidence by almost three percentage points, from 12,7 per cent to 15,9 per cent. This means that the price increase will force 15,7 million of Latin Americans into indigence. Regarding poverty levels, prices increases will have similar effects because an equivalent number of residents will become poor. (Cited in Ballara 2007)

[45] The remedy suggested is the implementation of strategies to incorporate the global South into the world economy, including export-led growth, increased cash-crop production and the creation of 'efficient' markets. A common education and training response is to 'build local capacity' through the creation of paraprofessional extension workers in agriculture, nutrition and health. While extension-worker training and financial inputs for hardware may be useful, they often go hand in hand with agricultural systems that seek to replace the old (subsistence-based) ones. How local people make sense of the replacement of one knowledge system and set of technologies with another would be the subject of further research investigations.

[46] The main producers of food remain women, not just in terms of preparation for consumption, but also in terms of growing, storing and preserving crops and trading produce. Women most often are the preservers and teachers of knowledge about food and so they remain core to healthy living and survival. Yet social and economic policies and practices often undermine women's ability to reproduce and implement their knowledge and skills, as capitalism does not place value on food production for self-provisioning but only on cash crops for sale. What are we going to eat in the future if women leave the land as migrant labourers and youth leave the country side in search of other lifestyles? Surely there are also research and education challenges here!

**Conclusion: Adult educators in neo-liberal times**

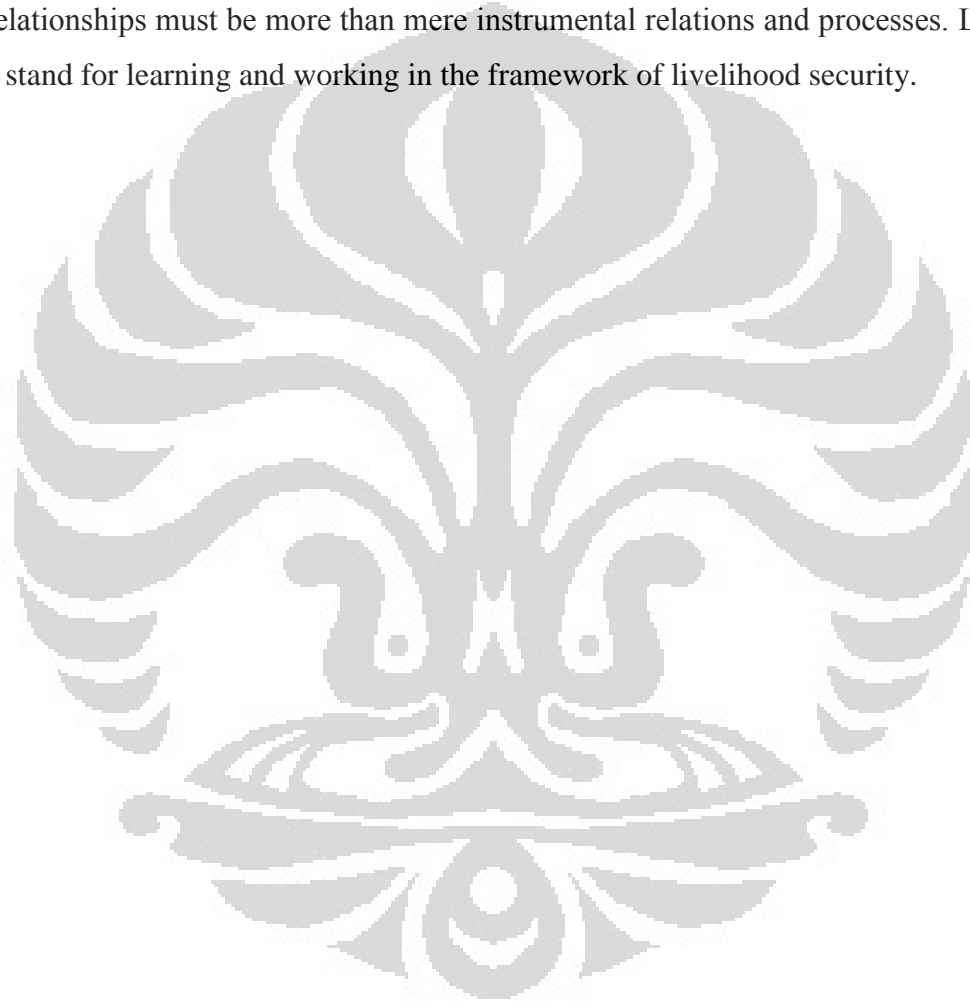
[47] Education is hailed as the panacea to all social injustices, yet the challenge for critical educators is to join the call for, and support, practical interventions that pave the way for education: social grants, loans without collaterals (as in Bangladesh through Grameen Banks), the cancellation of debts and childcare provision pave the way for people engaging and participating in education as a preparation to shape the world in a more just and equal way. Then, as Gouthro (2000) suggests,

as adult educators, we have to assess whether it is our role simply to sustain and support educational trends that are mandated by government and the corporate sector, or whether we have a critical role to play in assessing the ongoing purpose of adult education. (2000:60).

[48] Clearly, I am suggesting that in the context of globalising capitalism, educators with a social purpose have a crucial role to play in asking the important questions, pushing the counter-hegemonic research agendas, and taking a stand on the side of those who are excluded from social justice, including the promotion of education and training. By the mere fact of being co-humans and fellow world citizens, adult educators are deeply implicated in the life and living of Shipo, Thembisa and Khumalo. There is much to learn from them, and research into work



and learning should begin with listening and observation, asking questions and entering into productive dialogue. Such listening must be infused with respect and compassion, or what Gorz (1999) called 'love'. He demanded that the act of teaching be an act of loving, where the teacher/educator is a reference person who makes the learner '*feel* deserving of *unconditional* love, and *confident* of their capacity to learn, act, undertake projects' (1999: 68; italics in original). Education, learning and work relationships must be more than mere instrumental relations and processes. Let's take a stand for learning and working in the framework of livelihood security.



## BAB 5

### ANOTASI

Pada bab 1 telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan terjemahan beranotasi. Terjemahan beranotasi adalah suatu bentuk penelitian introspektif dan retrospektif yang dilakukan penerjemah dengan menerjemahkan teks dan menuliskan catatan proses penerjemahannya. Anotasi adalah catatan yang merupakan pertanggungjawaban penerjemah atas padanan yang dipilihnya. Dalam melakukan penerjemahan beranotasi, penerjemah mendeskripsikan proses mencapai kesepadanan melalui penelitian mendalam dan melihat kembali apakah padanan yang dipilih sudah tepat dengan memberikan alasan yang membenarkan pilihannya. Penemuan padanan istilah dan ungkapan dilakukan dengan menerapkan teori pada Bab 2 Kerangka Teori dan mencari referensi berupa dokumen pendukung dan narasumber. Dokumen pendukung dalam penerjemahan teks ini antara lain kamus, baik itu kamus bahasa Inggris—Inggris, Inggris—Indonesia, Indonesia—Inggris, dan kamus bahasa Indonesia, serta glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia untuk menemukan istilah resmi dalam bahasa Indonesia. Dalam bab ini ada 22 anotasi yang dikelompokkan ke dalam kata, frasa, istilah, idiom, dan akronim.

#### 5.1 Kata

Bolinger dan Sears (1968) dalam Baker (2011) mendefinisikan kata sebagai “*the smallest unit of language that can be used by itself*”. Baker (2011) mengemukakan beberapa permasalahan umum dalam mencapai kesepadanan dalam tataran kata antara lain: konsep dalam bahasa sumber tidak memiliki padanan leksikal dalam bahasa sasaran dan tidak adanya kata khusus dalam bahasa sasaran. Untuk mengatasi permasalahan itu, Baker (2011) menyarankan strategi antara lain penerjemahan dengan kata umum (*superordinate*), penerjemahan dengan kata yang lebih netral, penerjemahan dengan parafrasa, atau penghilangan kata.

### 5.1.1 Kata yang tidak memiliki padanan leksikal

#### Anotasi 1 *ecocide*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
1	<i>The trafficking of women and children, war, poverty, <b>ecocide</b> and global warming pose real threats to the welfare of human beings and all other species</i>	Perdagangan perempuan dan anak, perang, kemiskinan, <b>perusakan lingkungan</b> , dan pemanasan global menjadi ancaman nyata bagi kesejahteraan manusia dan semua spesies lain.	Mojab, paragraf 3

Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition* (2000), *ecocide* bermakna “*heedless or deliberate destruction of the natural environment, as by pollutants or an act of war*”. Definisi kamus itu selaras dengan definisi dari *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) yaitu “*total destruction of an area of the natural environment, esp by human agency*”. Definisi dari kedua kamus di atas terangkum dalam definisi singkat dari kamus lain yaitu *-Ologies & -Isms* (2008), yang mendefinisikan *ecocide* sebagai “*destruction of the environment*”. Permasalahan dalam penerjemahan kata ini adalah belum adanya padanan leksikal dalam bahasa Indonesia. Kata itu mungkin tidak terlalu umum dalam bahasa Inggris namun orang bisa mengerti maknanya karena terdiri dari dua kata umum yaitu *eco* yang berarti lingkungan dan *cide* yang berarti pembunuhan, seperti misalnya dalam kata *genocide* yang bermakna *pembunuhan masal*, dan *suicide* yang bermakna *bunuh diri*. Dalam konteks kata *ecocide*, *cide* bermakna *perusakan*. Meskipun demikian, kata tersebut tidak memiliki padanan

dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penerjemah mengalami masalah dalam mencapai kesepadanan untuk kata *ecocide* dalam bahasa Indonesia. Untuk mengatasi masalah dalam mencapai kesepadanan, saya menggunakan deskripsi. Dengan mempertimbangkan definisi dari beberapa kamus di atas, saya memadankan *ecocide* sebagai *perusakan lingkungan*. Prosedur yang diterapkan dalam penerjemahan ini adalah padanan deskriptif.

### Anotasi 2 *Mystification*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
2	<i>The dominant discourse has been no more than a liberal-capitalist <b>mystification</b> of what is known in Marxist theory as exploitation of labour.</i>	Wacana dominan itu tidak lebih daripada suatu <b>interpretasi</b> liberal-kapitalis yang dengan <b>sengaja dibuat membingungkan dan sukar dipahami</b> terhadap apa yang dalam teori marxis disebut eksploitasi tenaga kerja.	Mojab, paragraf 12
	<i>What about racialised, gendered, national divisions of labour that enhance the exploitability of sectors of the vulnerable labour force? Are these mere <b>mystifications</b>, or the modalities through which exploitation is achieved?</i>	Bagaimana dengan penggolongan tenaga kerja berdasarkan ras, jenis kelamin, dan negara, yang meningkatkan kemungkinan eksploitasi sektor tenaga kerja yang rentan? Apakah ini hanyalah usaha untuk	Mojab, paragraf 12

M		membuat keadaan lebih rumit dan membingungkan, atau modalitas yang dipakai untuk melakukan eksploitasi?	
---	--	---	--

Menurut the *American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition* (2000), *mystification* memiliki beberapa definisi yaitu (1) “*the act or an instance of mystifying*”, (2) “*the fact or condition of being mystified*”, (3) “*something intended to mystify*”. Kamus lain yaitu *beedictionary.com* (2010) mendefinisikan *mystification* sebagai (1) “*confusion resulting from failure to understand*”, (2) “*something designed to mystify or bewilder*”, (3) “*the activity of obscuring people's understanding, leaving them baffled or bewildered*”. Selain beberapa definisi di atas, terdapat definisi dari *Merriam-Webster Dictionary* (2012) yang mendefinisikan *mystification* sebagai “*an obscuring especially of capitalist or social dynamics (as by making them equivalent to natural laws) that is seen in Marxist thought as an impediment to critical consciousness*”.

Permasalahan dalam penerjemahan kata ini adalah belum adanya padanan leksikal dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya berusaha mencapai kesepadanan dengan menguraikan makna kata *mystification* dalam serangkaian kata. Dengan mempertimbangkan definisi dari beberapa kamus di atas, saya memadankan *mystification* sebagai *sesuatu yang dengan sengaja dibuat rumit dan sukar dipahami*. Prosedur yang diterapkan dalam penerjemahan ini adalah parafrasa.

### Anotasi 3 Inclusion

No	Tsu	Tsa	Paragraf
3	<p><i>In the context of Canada, the last two decades have been pivotal in creating a body of credible knowledge that crosses disciplinary boundaries in explaining, analysing, and proposing change in order to improve access, accommodation, <b>inclusion</b>, work conditions and work status of women of colour and immigrant women in workplaces and the labour market.</i></p>	<p>Dalam konteks Kanada, dua dekade terakhir merupakan saat penting dalam menciptakan kumpulan pengetahuan yang dapat dipercaya, yang melintasi batas disiplin ilmu dalam menjelaskan, menganalisis, dan mengusulkan perubahan dalam rangka meningkatkan akses, fasilitas, <b>inklusi</b>, kondisi kerja dan status kerja perempuan kulit berwarna dan imigran perempuan di tempat kerja dan pasar tenaga kerja.</p>	<p>Mojab, paragraph 13</p>
	<p><i>Concepts such as ‘access’, ‘accommodation’ and ‘<b>inclusion</b>’ provide a panacea to the more dehumanizing aspects of the relationship but fail to envision a systemic alternative to it.</i></p>	<p>Konsep seperti “akses”, “fasilitas” dan “<b>inklusi</b>” menyediakan obat mujarab bagi aspek hubungan modal dan tenaga kerja yang semakin tidak</p>	<p>Mojab, paragraph 17</p>

		manusiawi. Akan tetapi, konsep itu gagal mencari alternatif yang sistemik untuk hal itu.	
--	--	--	--

Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition* (2000), *inclusion* bermakna “*the act of including or the state of being included*”, “*something included.*” Definisi kamus itu sama persis dengan definisi dari *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003). Sama halnya dengan dua kamus di atas, *Miriam-Webster Dictionary* (1994) juga memberikan definisi yang sama untuk kata *inclusion* sebagai “*the act of including; the state of being included*”, “*something that is included*”.

Meskipun kata benda *inklusi* belum tercantum dalam KBBI, namun kata sifat *inklusif* sudah tercantum dalam KBBI. Berdasarkan KBBI (2008), *inklusif* bermakna “termasuk; terhitung”. Oleh karena itu, saya memberanikan diri membentuk kata baru. Saya yakin bahwa penggunaan kosa kata baru yang diadaptasikan dari kata bahasa sumber ini dapat dipahami pembaca bahasa sasaran. Kata *inclusion* bermakna pengikutsertaan; diperhitungkan. Mengingat konteks kata *inclusion* dipakai secara khusus untuk menjelaskan tindakan pengikutsertaan perempuan imigran kulit berwarna ke tempat kerja dan pasar tenaga kerja di Kanada, maka saya memilih mengadaptasi kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Penerjemah memadankan *inclusion* sebagai *inklusi*. Saya membuat kata baru yang diambil dari bunyi kata itu dalam bahasa sumber. Prosedur penerjemahan ini adalah naturalisasi atau penerjemahan fonologis. Hoed (2008) menjelaskan bahwa penerjemahan fonologis diterapkan dengan menyesuaikan bunyi kata dalam bahasa sumber ke dalam sistem bunyi dan ejaan bahasa sasaran.

#### Anotasi 4 *professionalisation*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
4	<i>I argue that issues of ‘professionalisation’ and ‘accreditation’, more than any other issues arising from this literature, have captured the imagination of policy—makers, politicians and those who advocate for and represent immigrant constituencies.</i>	Saya berargumentasi bahwa isu seputar “ <b>profesionalisasi</b> ” dan “akreditasi”, telah merebut imajinasi pengambil kebijakan, politisi, dan mereka yang mengadvokasi dan mewakili konstituen imigran, lebih daripada masalah lain yang muncul dari kepustakaan ini.	Mojab, paragraf 14

*Professionalisation (US)* atau *professionalization (UK)* memiliki makna yang sama dalam berbagai kamus. Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition (2000)*, *professionalization* adalah kata benda dari kata kerja *professionalize* yang artinya “*to make professional*”. Penjelasan ini sama dengan penjelasan dalam kamus lain yaitu *Collins English Dictionary Complete & Unabridged 10th Edition (2009)* yang menyatakan *professionalisation* atau *professionalization* sebagai kata benda dari kata kerja *professionalise* atau *professionalize* yang bermakna “*to impose a professional structure or status on (something)*”. Menurut *WordNet® 3.0 (2006)*, sebuah ensiklopedi kata dari *Princeton University*, *professionalization* bermakna “*the social process whereby people come to engage in an activity for pay or as a means of livelihood*”. *WordNet® 3.0*



memberikan contoh penggunaan kata *professionalization* dalam "*the professionalization of American sports*" dan "*the professionalization of warfare*".

Dalam bahasa Indonesia, kata *professional* sudah dikenal sebagai "bersangkutan dengan profesi"; "memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya"; "mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya" (KBBI, 2008). Selain itu, dalam KBBI (2008) terdapat kata *profesionalisme* yang bermakna "mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional" dan *profesionalitas* yang bermakna "perihal profesi; keprofesian" ; "kemampuan untuk bertindak secara profesional". Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia belum dikenal istilah khusus yang mengacu pada proses sosial untuk menjadikan suatu aktivitas sebagai aktivitas berbayar/ profesional.

Masalah dalam penerjemahan ini adalah konsep bahasa sumber belum memiliki padanan leksikal dalam bahasa sasaran (Baker, 2011). Oleh karena itu, saya memilih untuk membuat kata baru yang diambil dari bunyi kata itu dalam bahasa sumber. Kata *professionalization* dalam bahasa sumber diterjemahkan sebagai "*profesionalisasi*" dalam bahasa sasaran. Prosedur naturalisasi ini sangat membantu karena pembaca teks sasaran sudah familiar dengan kata *profesional*, *profesionalisme*, dan *profesionalitas* yang sudah terdapat dalam KBBI. Selain itu, pembaca sasaran telah terbiasa dengan akhiran *-isasi* sehingga dapat memahami makna kata *profesionalisasi* sebagai "proses sosial untuk menjadikan suatu aktivitas sebagai aktivitas profesional".

### 5.1.2 Tiadanya kata khusus dalam bahasa sasaran

#### Anotasi 5 *serfdom and slavery*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
5	<i>Today, Western capitalism prospers on the cheap labour of two billion people in China and India, where workers and peasants are subjected to new forms of serfdom and slavery.</i>	Dewasa ini, kapitalisme Barat semakin berkembang karena mendapatkan tenaga kerja murah dari dua miliar orang di Cina dan India, tempat pekerja dan petani menjadi sasaran bentuk <b>perbudakan yang baru.</b>	Mojab, paragraph 29

*Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (2008) mendefinisikan *serfdom* sebagai “*the state of being a serf or the system by which the serfs worked on the land*”. Sedangkan *serf* dalam kamus itu didefinisikan sebagai “*a member of a low social class in medieval times who worked on the land and was the property of the person who owned that land*”. *Serfdom* berasal dari kata *serf*, yang menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000) berasal dari kata latin *servus* yang bermakna “*budak*”. Kamus ini menjelaskan definisi *serf* sebagai “*a person in bondage or servitude*”. Selain itu, kamus ini memberikan definisi *serf* sebagai “*a member of the lowest feudal class, attached to the land owned by a lord and required to perform labor in return for certain legal or customary rights*”, “*an agricultural laborer under various similar systems, especially in 18th- and 19th-century Russia and eastern Europe*”. Kamus lain yaitu *Miriam-Webster Dictionary* juga sepakat bahwa *serf* berasal dari kata latin “*servus*” yang bermakna “*budak*”.

Menurut kamus ini, kata *serf* pertama kali digunakan pada tahun 1611, yang bermakna “*a member of a servile feudal class bound to the land and subject to the will of its owner*”. Definisi yang lain terdapat dalam *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) yang mendefinisikan *serf* sebagai “*an unfree person, esp one bound to the land. If his lord sold the land, the serf was passed on to the new landlord*”.

Kamus lain yaitu *Dictionary.com Unabridged* (2012) menjelaskan *serf* sebagai “*a person in a condition of servitude, required to render services to a lord, commonly attached to the lord's land and transferred with it from one owner to another*”, “*a slave*”. Sementara itu, kata *slave* menurut *the American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000) bermakna “*one bound in servitude as the property of a person or household*”; “*one who is abjectly subservient to a specified person or influence*”; “*one who works extremely hard*”. Menurut *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003), *slave* bermakna “*a person legally owned by another and having no freedom of action or right to property*”; “*a person who is forced to work for another against his will*”.

*The American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000) memberikan definisi *slavery* sebagai “*the state of one bound in servitude as the property of a slaveholder or household*”, “*the practice of owning slaves*”; “*a mode of production in which slaves constitute the principal work force*”; “*the condition of being subject or addicted to a specified influence*”; “*a condition of hard work and subjection: wage slavery*”. Definisi yang sama terdapat dalam kamus *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) yaitu “*the state or condition of being a slave*”; “*a civil relationship whereby one person has absolute power over another and controls his life, liberty, and fortune*”; “*the subjection of a person to another person, esp in being forced into work*”; “*the condition of being subject to some influence or habit*”; “*work done in harsh conditions for low pay*”.

Dari definisi beberapa kamus di atas, jelas bahwa baik *serfdom* maupun *slavery* mengacu pada praktik mempekerjakan orang sebagai hak milik sang majikan. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan nuansa makna *serfdom* dan *slavery*. Meager (2007) menjelaskan perbedaan *serfdom* dan *slavery* sebagai berikut

*“The main difference between serfdom and slavery was that serfdom was generally less binding. Serfs usually worked on the land, whereas a slave could be employed in almost any occupation. Serfs normally had more legal rights than slaves, were normally bound to the land, whereas a slave could be sold by his owner. Serfs normally owned their means of production (grain, livestock, equipment etc) and could be called upon to pay taxes, or be enlisted into the army or work on roads.”*

Penjelasan ini didukung *Britannica Concise Encyclopedia* (2012) sebagai berikut

*“Serfs differed from slaves in that slaves could be bought and sold without reference to land, whereas serfs changed lords only when the land they worked changed hands. From about the 2nd century, large privately owned estates in the Roman Empire that had been worked by slaves were broken up and given to peasant farmers. These farmers came to depend on larger landowners for protection in turbulent times, and swearing fealty to a proprietor became common practice. In 332 Constantine I established serfdom legally by requiring tenant farmers to pay labour services to their lords. As serfs, they could not marry, change occupations, or move without the permission of their lords, to whom they were required to give a major portion of their harvest”.*

Jadi, baik *serfdom* maupun *slavery* meniadakan hak asasi manusia untuk menikah, mencari pekerjaan layak, ataupun berpindah tempat tinggal supaya menjadi orang merdeka. Perbedaan dasarnya hanyalah *serfdom* terbatas pada mempekerjakan orang pada lahan pertanian, sedangkan *slavery* tidak membatasi jenis pekerjaan.

Selain itu, *slavery* memberikan ruang untuk jual-beli tenaga kerja, sedangkan dalam *serfdom* orang tidak diperjualbelikan melainkan terikat pada tanah tempat dia bekerja sehingga jika tanah berpindah kepemilikan maka beralih majikan. Jadi, dalam nuansa makna *serfdom*, orang dimiliki majikan baru hanya jika majikan lama menjual tanahnya kepada majikan baru. Dari penjelasan di atas, tampak bahwa makna *serfdom* dan *slavery* bertautan erat. Bahkan, beberapa kamus di atas mengungkapkan bahwa kata *serf* bermakna sama dengan *slave*. Dengan demikian, *serfdom* dan “*slavery*” memiliki nuansa makna yang mirip.

Dengan pengertian di atas, masalah yang dihadapi dalam penerjemahan *serfdom and slavery* adalah ketiadaan kata khusus dalam bahasa sasaran yang sepadan dengan nuansa makna khusus yang terkandung dalam kata *serfdom*. Dalam bahasa Indonesia, ada konsep buruh tani tetapi tidak ada konsep *serfdom*. Nuansa makna *serfdom and slavery* telah tercakup dalam satu kata umum yaitu *perbudakan*. *KBBI* (2008) memuat definisi *perbudakan* yaitu “*perihal budak (hamba); segala hal mengenai budak belian*”. Dalam penerjemahan ini, konsep khusus yang terkandung dalam kata *serfdom* telah tercakup maknanya dalam kata yang lebih umum (*superordinate*) yaitu *perbudakan* sehingga strategi penerjemahan dengan penghilangan kata dapat diterapkan dalam penerjemahan ini. Oleh karena itu, saya memadankan *serfdom and slavery* sebagai *perbudakan*. Penerjemahan kata *serfdom* dihilangkan karena maknanya telah tercakup dalam kata umum dalam bahasa sasaran, yaitu *perbudakan*. Dalam teks ini, penghilangan kata *serfdom* tidak mengubah atau mengurangi makna karena sudah termasuk ke dalam *perbudakan*. Kata *slavery* juga bermakna *perbudakan*. Jadi, dari dua kata bahasa sumber, hanya diambil satu padanan dalam bahasa sasaran. Prosedur penerjemahan padanan fungsional yang dikemukakan oleh Newmark (1988), atau yang disebut strategi penggunaan kata yang lebih netral oleh Baker (2011), digabungkan dengan strategi penghilangan kata, diterapkan untuk menerjemahkan *serfdom and slavery* sebagai *perbudakan*. Prosedur ini menetralkan kata yang tak memiliki padanan dalam bahasa sasaran meskipun terkadang menghilangkan komponen makna kata tertentu.

## 5.2 Frasa

Menurut *KBBI* (2008), frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Penerjemahan dalam tataran frasa mempunyai permasalahan tersendiri. Selain kesalahan interpretasi makna kolokasi bahasa sumber, ada pula permasalahan kesenjangan antara ketepatan dan kewajaran (Baker, 2011). Jika frasa dalam bahasa sumber diterjemahkan begitu saja maka hasilnya tidak akan dapat dimengerti oleh pembaca.

### Anotasi 6 *for a few rand*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
6	<i>Thirdly, Khumalo, who is pushing a home-made trolley heaped high with scrap metal collected over time and being delivered to a weighing station where he will sell it for a few rand.</i>	Ketiga, Khumalo, yang sedang mendorong gerobak berisikan tumpukan besi tua hasil memulung untuk dijual ke pengepul <b>dengan harga yang sangat murah.</b>	Kotze, paragraf 1

Menurut *Mirriam-Webster Dictionary* (1994), kata *rand* pertama kali digunakan di Afrika Selatan pada tahun 1961. Kamus ini menjelaskan *rand* sebagai “*a former monetary unit in Botswana, Lesotho, and Swaziland*”. Kamus lain yaitu *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) menjelaskan *rand* sebagai “*the standard monetary unit of the Republic of South Africa, divided into 100 cents*”. Penjelasan ini sama dengan penjelasan dalam kamus lain yaitu *Kernerman English Multilingual Dictionary* (2010), yang menyatakan *rand* sebagai “*the standard unit of South African currency*”. Definisi yang sama terdapat dalam *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary* (2008) yang mendefinisikan *rand* sebagai

*“the standard unit of money used in South Africa”*. Berdasarkan definisi dari beberapa kamus di atas, jelaslah bahwa penulis yang berkebangsaan Inggris itu menullis dalam konteks Afrika Selatan. Kata *rand* menunjukkan konteks tempat yang diacu dalam teks sumber. Kata itu mengacu pada mata uang di Afrika Selatan. Menurut salah satu situs pertukaran mata uang, 1 rand sama dengan Rp. 1.093,00 (situs pertukaran mata uang Zar, 2012). Dengan demikian, *for a few rand* dalam konteks tempat yang diacu dalam teks sumber bermakna jumlah uang yang sangat sedikit.

Permasalahan dalam penerjemahan kata ini menyangkut konteks tempat yang diacu oleh bahasa sumber, yang tidak terdapat dalam bahasa sasaran. Ada perbedaan budaya sehingga konseptualisasi *a few rand* sebagai jumlah uang yang teramat sedikit tidak terdapat dalam budaya Indonesia. Mengingat perbedaan itu, saya memilih menjabarkan kata itu secara lugas untuk menjelaskan konseptualisasi kata dalam bahasa sumber berdasarkan makna yang dipahami oleh masyarakat Afrika Selatan. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam kata itu dapat teralihkan dengan baik dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Prosedur parafrasa diterapkan untuk menerjemahkan *for a few rand* sebagai *dengan harga yang sangat murah*.

#### **Anotasi 7 connecting thread**

No	Tsu	Tsa	Paragraf
7	<i>By doing so, we can see that the <b>connecting thread</b> here is the discovery of a universal ‘life in transition’ as a mode of being and learning.</i>	Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa <b>benang merahnya</b> adalah penemuan “hidup dalam transisi” universal sebagai cara berada dan belajar.	Mojab, paragraf 24

Penerjemahan frasa *connecting thread* memberikan tantangan tersendiri untuk penerjemah. Saya memulai dengan makna kata *thread*. *The American Heritage® Dictionary of the English Language (2000)*, *thread* adalah “*fine cord of a fibrous material, such as cotton or flax, made of two or more filaments twisted together and used in needlework and the weaving of cloth*”. Sama halnya dengan *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged (2003)* yang mendefinisikan *thread* sebagai “*a fine strand, filament or fibre of some material*”; “*a fine cord of twisted filaments, esp of cotton, used in sewing, weaving, etc*”. Dengan demikian, jelas bahwa yang dimaksud dengan *thread* adalah *benang*. Sedangkan *connecting* menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language (2000)* bermakna “*to join or fasten together*”; “*to associate or consider as related*”; “*to become joined or united*”.

Menurut *Macmillan Dictionary (2012)*, *connecting thread* bermakna “*an idea or condition that exists in all the different parts of something and that connects them*”. Menurut kamus itu, *connecting thread* sama maknanya dengan “*common thread*”. Penggunaan frasa ini dicontohkan dalam kalimat “*there is a connecting thread running through all the problems.*” Tentu saja akan sangat tidak wajar apabila frasa ini diterjemahkan sebagai *benang penghubung*. Dalam hal ini, penerjemah harus mempertahankan ketepatan dan kewajaran. Oleh karena itu, istilah *the connecting thread* dalam teks sumber dipadankan dengan idiom “*benang merah*” dalam teks sasaran. Berdasarkan *KBBI (2008)*, *benang merah* adalah “*kiasan yang bermakna sesuatu yang menghubungkan beberapa hal (faktor) sehingga menjadi satu kesatuan*”. Prosedur yang digunakan adalah padanan budaya, yaitu memberikan padanan berupa unsur kebudayaan yang ada dalam Bsa.



### Anotasi 8 *lofty ideals*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
8	<i>I realize that most of us do not aim at reducing lifelong learning to the requirements of the market. Indeed, we have for a long time pursued <b>lofty ideals</b> in relation to what we are doing.</i>	Saya menyadari bahwa sebagian besar dari kita tidak bertujuan menurunkan nilai pemelajaran sepanjang hayat untuk mengikuti tuntutan pasar. Memang, kita telah lama mengejar <b>cita-cita luhur</b> dalam kaitannya dengan apa yang kita lakukan.	Mojab, paragraf 26

Menurut *Mirriam-webster Dictionary* (1994), kata *loftly* pertama kali digunakan pada abad ke XV. Kata itu mempunyai beberapa pengertian yaitu (1) “*elevated in character and spirit; noble*” (2) “*having a haughty overbearing manner; supercilious*”, (3) “*rising to a great height; impressively high*”, (4) “*having full-bodied, firm, and resilient textile fibers*”. Kamus itu juga menjelaskan bahwa frasa *lofty ideals* mengacu pada definisi pertama di atas, didefinisikan sebagai “*elevated in character and spirit*”; “*noble*”. Definisi yang sama terdapat dalam *English Collins Dictionary—English synonyms & Thesaurus* (2008), “*a lofty ideal or ambition is noble, important, and admirable*”. Kamus itu memberikan contoh penggunaan frasa *lofty ideals* dalam kalimat “*it was a bank that started out with grand ideas and lofty ideals*”. Selain dua definisi di atas, kamus lain yaitu *Longman Dictionary of Contemporary English* (2009) menjelaskan bahwa “*lofty ideas, beliefs, attitudes etc show high standards or high moral qualities - use this to show approval: lofty ideals of equality and social justice*”. Beberapa definisi di atas dikuatkan oleh definisi dari

*Macmillan Dictionary* (2012), yang menjelaskan *loftly ideals* sebagai “*lofty aims or principles deserve to be admired because they are based on high moral standards*”.

Mengacu pada beberapa definisi di atas, saya menyimpulkan bahwa *loftly ideals* mengandung nuansa makna tujuan mulia yang berdasarkan nilai moral dengan karakter luhur. Oleh karena itu, saya memadankan frasa *loftly ideals* sebagai *cita-cita luhur*. Menurut *KBBI* (2008), *cita-cita* bermakna “keinginan (kehendak) yang selalu ada dalam pikiran”, “tujuan yang sempurna, yang akan dicapai atau dilaksanakan”. Selain itu, menurut *KBBI* (2008) kata luhur bermakna “tinggi”, “mulia”. Dengan demikian, nuansa makna dalam frasa *loftly ideals* dapat teralihkan sepenuhnya ke dalam frasa *cita-cita luhur*. Dalam penerjemahan ini, saya menerapkan prosedur padanan budaya. Saya memadankan frasa bahasa sumber dengan frasa yang mengandung makna yang sama dalam bahasa sasaran.

#### **Anotasi 9 Bio Fuels**

No	Tsu	Tsa	Paragraf
9	<i>However, their omission is very worrying, particularly in the context of rising food prices, food shortages as crops are turned into biofuels, and looming deadlines for meeting Millennium Development Goals (MDGs).</i>	Namun, pengabaian itu sangatlah mengkhawatirkan, khususnya dalam konteks kenaikan harga kebutuhan pokok, kekurangan bahan pangan seiring dengan digunakannya tanaman sebagai <b>bahan bakar hayati</b> , dan tenggat waktu yang hampir habis untuk mencapai	Kotze, paragraf 5

		<i>Millenium Development Goals (MDGs).</i>	
--	--	--	--

*Biofuel* merupakan frasa Inggris yang bermakna “*fuel such as methane produced from renewable biological resources such as plant biomass and treated municipal and industrial waste*” (*The American Heritage® Dictionary of the English Language*, 2000). Selain itu, definisi yang lain adalah “*a gaseous, liquid, or solid substance of biological origin that is used as a fuel*” (*Collins English Dictionary – Complete and Unabridged*, 2003). Definisi yang lebih spesifik ada dalam *The American Heritage® Science Dictionary* (2005), *biofuel* adalah “*fuel produced from renewable resources, especially plant biomass, vegetable oils, and treated municipal and industrial wastes. Biofuels are considered neutral with respect to the emission of carbon dioxide because the carbon dioxide given off by burning them is balanced by the carbon dioxide absorbed by the plants that are grown to produce them. The use of biofuels as an additive to petroleum-based fuels can also result in cleaner burning with less emission of carbon monoxide and particulates*”

Permasalahan dalam penerjemahan ini adalah terdapatnya beberapa versi penerjemahan *biofuel* ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dalam diskusi antar penerjemah dalam forum yang terdapat pada situs penerjemahan *Proz.com* (2008). Regi, salah satu penerjemah yang aktif dalam situs penerjemahan *Proz.com*, mengemukakan istilah *bahan bakar nabati* sebagai padanan frasa *biofuel*. Alasannya karena kata *bio* mengacu pada *tumbuhan* sehingga tepat diterjemahkan sebagai *hayati*. Berbeda dengan Regi, penerjemah lain yaitu Sussi S Umsari memilih istilah *bahan bakar alternatif* sebagai padanan istilah *biofuel* dengan pertimbangan bahwa *biofuel* hanya digunakan oleh segelintir orang saja di Indonesia sehingga tepat dipadankan dengan istilah *bahan bakar alternatif*. Sedangkan Hikmat Gumilar yang juga seorang penerjemah yang aktif dalam forum itu memilih istilah *bahan bakar hayati* karena nuansa makna *biofuel* meliputi bahan bakar dari tumbuhan dan hewan

sehingga akan terwakili dalam kata *hayati*. Lain halnya dengan penerjemah lain yaitu Erich Ekoputra yang menerjemahkan istilah *biofuel* sebagai *bahan bakar bio* mengingat segi keberterimaan istilah di kalangan pembaca terjemahannya. Berbeda dengan penerjemah lain, Hipyen Nopri memilih istilah *bahan bakar organik* sebagai padanan *biofuel*. Menurutnya, pemilihan padanan itu mengikuti istilah yang digunakan secara umum di media masa.

Dalam penerjemahan ini, saya memilih menerjemahkan *biofuels* sebagai *bahan bakar hayati* berdasarkan istilah resmi yang telah digunakan oleh praktisi biologi. Salah satu narasumber, Slamet Haryono, seorang praktisi biologi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga menegaskan bahwa penggunaan istilah *bahan bakar hayati* sebagai istilah resmi disiplin ilmu biologi berasal dari penerjemahan kata *bio* menjadi *hayati* (komunikasi pribadi, 6 Maret 2012). Penerjemahan *biofuels* menjadi *bahan bakar hayati* juga diperkuat oleh pendapat Hikmat Gumilar (Proz.com, 2008) yang mengkaji nuansa makna *biofuel* meliputi *bahan bakar* dari tumbuhan dan hewan sehingga akan terwakili dalam kata *hayati*. Selain itu, berdasarkan glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia (2008), *biofuels* diterjemahkan secara resmi menjadi *bahan bakar hayati*. Oleh karena itu, prosedur penerjemahan ini adalah penerjemahan resmi.

### **5.3 Istilah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Dalam teks sumber, terdapat istilah khusus dalam bidang ilmu tertentu yaitu bidang ilmu pendidikan orang dewasa dan perubahan global, yang merupakan bidang ilmu interdisipliner dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, hubungan internasional, dan lain sebagainya.

**Anotasi 10 *the modern “hunter-gatherer”***

No	Tsu	Tsa	Paragraf
10	<i><b>The modern “hunter-gatherer”</b> attempts to make cash from found objects, from junk and discards, from the scraps tossed out by those who have.</i>	<b>“Pemburu-pengumpul”</b> <b>modern</b> berusaha mengubah apa saja yang mereka temukan menjadi uang, dari sampah dan barang bekas yang dibuang oleh orang kaya.	Kotze, paragraf 2

Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000), definisi *hunter-gatherer* adalah “a member of a people subsisting in the wild on food obtained by hunting and foraging” Selain itu, menurut *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003), *hunter-gatherer* bermakna “(1) surviving by hunting animals and gathering plants for subsistence (2) a member of such a society” Masalah dalam penerjemahan ungkapan ini muncul karena saya harus mencari padanan yang sesuai dengan konteks disipin ilmu sosiologi. Oleh karena itu, saya mencari istilah resmi yang telah diakui oleh Pusat Bahasa. Dalam glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia (2008), istilah *hunter-gatherer* merupakan istilah bidang sosiologi yang diterjemahkan sebagai “*pemburu-pengumpul*”.

Hal ini didukung oleh narasumber yaitu Elly Kudubun, dosen sosiologi UKSW, yang menjelaskan bahwa dalam disiplin ilmu sosiologi, *hunter-gatherer* diterjemahkan sebagai “pemburu-peramu” atau “pemburu-pengumpul”. Namun melihat konteks teks sumber, pemilihan kata “pemburu-pengumpul” lebih tepat digunakan karena kata pengumpul tidak selalu mengacu pada masyarakat sederhana melainkan dapat pula dipakai untuk makna yang lain, misalnya komunitas pemulung (komunikasi pribadi, 7 Maret 2012). Prosedur yang ditempuh dalam menerjemahkan

*the modern “hunter-gatherer”* sebagai “*pemburu-pengumpul*” *modern* adalah penerjemahan resmi/ *recognized translation*, dengan pengertian bahwa mereka mencari dan mengumpulkan sampah dan barang bekas. Saya mencari padanan yang telah diakui secara resmi oleh lembaga bahasa. Selain itu, padanan itu memang telah populer digunakan oleh para ahli.

#### Anotasi 11 *Disadvantaged Populations*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
11	<i>The package is relevant to all who are involved in the provision of capacity building and skills development for <b>disadvantaged populations</b> at the local level.</i>	Paket ini relevan untuk semua yang terlibat dalam penyediaan pengembangan kapasitas dan keterampilan untuk <b>masyarakat pra sejahtera</b> di aras lokal.	Kotze, paragraf 9
	<i>This introductory note reveals a number of assumptions: firstly, that ‘marginalized groups’ are excluded because they lack awareness and motivation; secondly, that ‘<b>disadvantaged populations</b>’ need capacity building and skills development</i>	Catatan pengantar ini mengungkapkan sejumlah asumsi: pertama, bahwa “kelompok yang terpinggirkan”, dikesampingkan karena mereka kurang memiliki kesadaran dan motivasi, kedua, “ <b>masyarakat pra sejahtera</b> ” membutuhkan pengembangan kapasitas	Kotze, paragraf 10

		dan keterampilan	
	<i>Marginalized groups’, ‘disadvantaged populations’, ‘people living in adverse economic conditions’ need to be brought into the (formal/dominant) economy.</i>	“Kelompok yang terpinggirkan”, “ <b>masyarakat pra sejahtera</b> ”, “orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan” perlu dibawa ke dalam sektor ekonomi (formal/dominan).	Kotze, paragraf 10

*The American Heritage® Science Dictionary (2005)* mendefinisikan *population* sebagai “a group of individuals of the same species occupying a particular geographic area”. Selain itu, *The American Heritage® Dictionary of the English Language (2000)* menjelaskan istilah *population* sebagai “all of the people inhabiting a specified area; the total number of such people”. *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged (2003)* memberikan definisi yang sama yaitu “all the persons inhabiting a country, city, or other specified place; the number of such inhabitants”. Kamus ini juga memasukkan definisi *population* yang mengacu pada kelompok tertentu: “all the people of a particular race or class in a specific area”, contohnya *the Chinese population of San Francisco*. Istilah *population* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah *populasi*.

Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language, (2000)*, *disadvantaged* bermakna:

1. “Deprived of some of the basic necessities or advantages of life, such as adequate housing, medical care, or educational facilities”.

2. “*Being at a disadvantage, especially with respect to competitive or opposing elements or forces*”. Contoh penggunaan kata *disadvantaged* dalam kalimat misalnya: “*We can't have disadvantaged conventional forces on one hand and strategic nuclear forces on the other*” (Bernard Rogers).

Sama halnya dengan definisi di atas, *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged (2003)* menyatakan *disadvantaged* sebagai “*socially or economically deprived or discriminated against*”. Jadi, pengertian *disadvantaged population* mengacu pada sekelompok masyarakat yang belum mencapai taraf hidup yang sejahtera. Istilah ini sepadan dengan *masyarakat pra sejahtera*. Menurut Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana (2011), *pra sejahtera* (sangat miskin) diartikan sebagai “*ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan*”. Istilah ini telah digunakan secara luas oleh baik instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Penerjemahan ini menggunakan prosedur modulasi, yaitu memberikan padanan yang berbeda sudut pandang namun sama maknanya.

**Anotasi 12 *participatory rural appraisal processes***

.No	Tsu	Tsa	Paragraf
12	<i>For example, experience, experiences in <b>participatory rural appraisal processes</b> illustrates how it is useful to live with, for example, poor traders in order to learn together about the particular political economies of their</i>	Sebagai contoh, pengalaman, pengalaman dalam <b>proses kajian desa partisipatif</b> menggambarkan bagaimana bergunanya untuk hidup dengan, misalnya, pedagang	Kotze, paragraf 30



	<p><i>specific sectors and the place, time and conditional factors that would allow for concentrated learning activities.</i></p>	<p>miskin untuk belajar bersama tentang politik ekonomi tertentu dari sektor mereka yang spesifik, tempat, dan waktu, dan faktor kondisional yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang terkonsentrasi.</p>	
--	---	--	--

Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language*, (2000), *rural* bermakna “*typical of the country as distinguished from the city. Rural applies to sparsely settled or agricultural country*”. Senada dengan definisi itu, *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) menegaskan bahwa *rural* mengacu pada “*relating to, or associated with farming*”. Dengan demikian, istilah *rural* dapat dipadankan dengan kata “*desa*”. Sementara itu, istilah *participatory* menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000) adalah “*marked by, requiring, or involving participation, especially affording the opportunity for individual participation*”. Oleh karena itu, istilah *participatory* dapat dipadankan dengan istilah “*partisipatif*” dalam bahasa Indonesia.

Permasalahan timbul ketika mencari padanan kata yang tepat untuk istilah *appraisal*. Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000), *appraisal* bermakna “*the act or an instance of appraising*”. Sama halnya dengan *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) yang mendefinisikan istilah *appraisal* sebagai “*an assessment or estimation of the worth, value, or quality of a person or thing*”. Dengan demikian, *appraisal* dapat bermakna *penilaian, kajian, atau pun evaluasi*. Untuk menentukan yang manakah padanan yang

tepat, diperlukan pendalaman materi sehingga padanan yang digunakan memiliki nuansa makna yang sama dengan istilah aslinya.

Istilah *participatory rural appraisal process* merupakan istilah khusus yang tidak dapat diterjemahkan lepas konteks. Menurut *SIL International* (1999), *participatory rural appraisal* adalah “one of the techniques used for gathering information on community resources and needs for use in literacy and community development programs. The techniques include the use of transect walks, maps, calendars, matrices, and diagrams using locally available materials”.

Jadi, istilah ini mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lain yang bertujuan memasukkan pengetahuan dan opini masyarakat pedesaan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek pemberantasan buta huruf maupun pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, selain melakukan penelitian dokumen untuk memahami makna *participatory rural appraisal*, saya juga mencari padanan yang secara resmi diakui dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia (2008), *participatory rural appraisal* diterjemahkan secara resmi menjadi “*kajian desa partisipatif*”. Prosedur yang dipakai dalam penerjemahan ini adalah penerjemahan resmi.

### Anotasi 13 *deskilling*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
13	<i>To explain where immigrant women are located in this hierarchy, I contributed to the debate on ‘skilling’, ‘deskilling’ and ‘reskilling’ of immigrant women, where I have also noted the lifelong</i>	Untuk menjelaskan posisi perempuan imigran dalam hierarki ini, saya memberikan kontribusi pada perdebatan tentang “pengasahan keterampilan”,	Mojab, paragraf 15

	<p><i>'learning', as far as women of colour are concerned, becomes lifelong 'training' in its policy and practice formulation (Mojab 2000).</i></p>	<p><b>“peniadaan keterampilan”</b> dan “pelatihan ulang keterampilan” bagi perempuan imigran. Saya juga melihat bagaimana “pemelajaran” sepanjang hayat yang terkait dengan perempuan kulit berwarna, menjadi “pelatihan” sepanjang hayat dalam perumusan kebijakan dan praktik (Mojab 2000)</p> <p><i>(catatan kaki: istilah “peniadaan keterampilan” dimungkinkan dengan memecah pekerjaan sedemikian rupa sehingga keterampilan yang dimiliki oleh pekerja itu menjadi sangat sempit dan dangkal sehingga jika pekerja itu dipindahkan ke konteks yang lain, keterampilan itu tidak</i></p>	
--	---	--	--

		<p><i>ada gunanya. Hal ini diperjelas dengan contoh dari About.com (2012), peniadaan keterampilan bermakna tiap pekerja berfokus pada tugas yang sangat sempit yang tidak membutuhkan pelatihan. Akibatnya, para pekerja dewasa ini sangat mudah digantikan).</i></p>	
--	--	---	--

Berdasarkan *Dictionary.com* (2012), istilah *deskilling* berasal dari penurunan dua kata yaitu *de* + *skill*, yang bermakna “*to remove any need of skill, judgment, or initiative*”. Istilah ini erat kaitannya dengan disiplin ilmu sosiologi dan ekonomi. Ditinjau dari sudut pandang ilmu sosiologi, situs sosiologi terkemuka, *About.com* (2012) memberikan definisi sebagai berikut: “*deskilling is the process of using technology and the fragmentation of work in order to lower the breadth and depth of skills possessed by workers*”. Definisi itu didukung dengan contoh:

*In the early stages of industrial capitalism, production workers were generally highly skilled in all areas of the production process. This gave them considerable leverage and power because it was difficult to replace them. As mass production technology grew, however, assembly lines were used to make production cheaper and to fragment the work process so that each worker focused on a narrower range of tasks requiring less training. As a result, workers today are more easily replaced (About.com, 2012).*

Sementara itu, pengertian istilah *deskilling* dari sudut pandang ilmu ekonomi ternyata mengacu pada makna yang sama. *Bussinessdictionary.com* (2012), sebuah situs kamus istilah bisnis terkemuka di dunia menjelaskan pengertian *deskilling* sebagai “*decrease in the quality and range of the practical knowledge of individuals, organizations, or societies due to attrition, automation, computerization, downsizing, lack of learning opportunities, or neglect*”.

Beberapa definisi di atas selaras pula dengan definisi *deskilling* dari *The American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000), yaitu “*to eliminate the need for skilled labor in (an industry), especially by the introduction of high technology; to downgrade (a job or occupation) from a skilled to a semiskilled or unskilled position*”. Definisi yang senada juga terdapat dalam *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) yang menjelaskan *deskilling* sebagai “*to mechanize or computerize (a job or process) to such an extent that little human skill is required to do it; to cause (skilled persons or a labour force) to work at a job that does not utilize their skills*”

Berdasarkan definisi dari beberapa kamus di atas, istilah *deskilling* bermakna “*meniadakan kebutuhan akan tenaga terampil dalam suatu pekerjaan atau proses di pabrik, misalnya dengan adanya mekanisasi atau komputerisasi*”. Berdasarkan glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia (2008), istilah *deskilling* dipadankan dengan istilah “*peniadaan keterampilan*”. Saya memilih menggunakan istilah resmi dari glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. Istilah itu memerlukan penjelasan tambahan supaya konsep maknanya dapat dipahami pembaca, Untuk memperjelas konsep yang terkandung dalam istilah *deskilling* sebagai “*peniadaan keterampilan*”, saya menambahkan catatan kaki sebagai berikut, “*istilah “peniadaan keterampilan” dimungkinkan dengan memecah pekerjaan sedemikian rupa sehingga keterampilan yang dimiliki oleh pekerja itu menjadi sangat sempit dan dangkal sehingga jika pekerja itu dipindahkan ke konteks yang lain, keterampilan itu tidak ada gunanya. Hal ini diperjelas dengan contoh dari About.com (2012), peniadaan keterampilan bermakna*

*tiap pekerja berfokus pada tugas yang sangat sempit yang tidak membutuhkan pelatihan. Akibatnya, para pekerja dewasa ini sangat mudah digantikan)*". Dalam penerjemahan ini, saya menggunakan prosedur penerjemahan resmi yang dilengkapi catatan kaki untuk membantu pembaca sasaran memahami konsep makna yang terkandung dalam istilah itu.

#### 5.4 Idiom

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya; bahasa atau dialek yang khas menandai suatu bangsa, suku, kelompok, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan definisi idiom dari *The American Heritage® Dictionary of the English Language* (2000) yaitu "*a speech form or an expression of a given language that is peculiar to itself grammatically or cannot be understood from the individual meanings of its elements*"; "*regional speech or dialect*". Kamus lain, *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged* (2003) memberikan definisi serupa yaitu "*a group of words whose meaning cannot be predicted from the meanings of the constituent words*"; "*linguistic usage that is grammatical and natural to native speakers of a language*".

Dengan demikian, idiom tidak dapat dipahami dengan menerjemahkan masing-masing kata yang membentuk idiom itu. Penerjemah harus jeli melihat apakah serangkaian kata itu memiliki makna harfiah (*literal meaning*) ataukah makna idiomatis (*idiomatic expression*). Untuk menerjemahkan idiom, seorang penerjemah harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai linguistik bahasa sumber dan bahasa sasaran. Akan tetapi, terkadang terdapat idiom bahasa sumber yang tidak dapat dipahami kecuali oleh penutur asli karena diperlukan pemahaman budaya yang mendalam untuk memaknai idiom sebagaimana penutur asli memahaminya. Baker (2011) menyatakan bahwa kebanyakan penerjemah tidak mempunyai sensitivitas yang sama dengan penutur asli dalam hal memahami idiom. Oleh karena itu,

berkonsultasi dengan nara sumber penutur asli sangat membantu dalam mencari padanan makna idiom yang sulit.

Menurut Baker (2011), permasalahan yang dihadapi dalam penerjemahan idiom yaitu (1) idiom itu tidak memiliki idiom yang sama dalam bahasa sasaran, (2) idiom itu memiliki idiom yang serupa dalam bahasa sasaran namun berbeda konteks penggunaan dan konotasinya (3) idiom dalam teks sumber memiliki baik makna literal maupun makna idiomatis (4) perbedaan konvensi penggunaan idiom dalam wacana tertulis antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran dalam hal konteks dan frekuensi penggunaannya. Baker (2011) mengemukakan beberapa strategi penerjemahan idiom antara lain menggunakan idiom yang sama bentuk dan maknanya, menggunakan idiom yang sama makna namun berbeda bentuk, meminjam idiom bahasa sumber, menerjemahkan dengan parafrasa, dan menghilangkan sebagian atau keseluruhan idiom.

**Anotasi 14 *raising little more than an eyebrow***

No	Tsu	Tsa	Paragraf
14	<i>With the spread of untreated HIV/AIDS, the impact of major disasters that create widespread homelessness and displacement, and the growing hunger of resource-poor households especially in urban areas, encounters with people such as these three have become normal, <b>raising little more than an</b></i>	Dengan semakin menyebarnya penyakit HIV/AIDS, dampak dari bencana besar yang mengakibatkan orang kehilangan tempat tinggal dan harus berpindah, dan semakin banyaknya kelaparan di antara masyarakat miskin khususnya di wilayah perkotaan, maka perjumpaan dengan orang	Kotze, Paragraf 2

	<i>eyebrow.</i>	seperti ketiga contoh yang disebutkan di atas telah dianggap normal, <b>tidak membuat orang kaget.</b>	
--	-----------------	--	--

Dalam penerjemahan kalimat di atas, tantangan yang dihadapi adalah menyederhanakan kalimat yang panjang dan kompleks sehingga dapat dipahami pembaca. Selain itu, hal yang menarik untuk dianalisis adalah idiom *raising little more than an eyebrow*. Dalam berbagai kamus, terdapat macam-macam pengertian. Menurut *Cambridge Idioms Dictionary* (2006), *raise (a few) eyebrows* bermakna “*to shock or surprise people*”. Kamus lain yaitu *Cambridge Dictionary of American Idioms* (2003) menyatakan *raise (some) eyebrows* dan *raise a few eyebrows* bermakna “*to cause disapproval or worry*”. Selain itu dua kamus itu, *McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs* (2011) menyatakan *raise some eyebrows* dan *raise a few eyebrows* bermakna “*to shock or surprise people mildly (by doing or saying something)*”. Kamus itu juga menjelaskan bahwa *raise (a few) eyebrows* juga bermakna “*to shock or surprise people*”. Selain itu, *raise some eyebrows* memiliki definisi yang sama dengan “*cause (some) eyebrows to raise and cause some raised eyebrows*”. Idiom itu bermakna “*to shock people; to surprise and dismay people*”.

Mengingat definisi di atas, idiom itu menyiratkan ketidakpedulian masyarakat, yang menganggap kasus seperti ini merupakan hal biasa. Dalam penerjemahan ini, tidak terdapat padanan idiom Indonesia untuk idiom itu. Prosedur dalam penerjemahan ini adalah parafrasa karena idiom Inggris tidak dipadankan dengan idiom Indonesia. Dalam penerjemahan ini, terjadi parafrasa dari *raising little more than an eyebrow* menjadi *tidak membuat orang kaget*.



Anotasi 15 '*bums on seat*'

No	Tsu	Tsa	Paragraf
15	<i>The belief that investment in personal development will generate quantifiable returns is so persistent that donors are not deterred even by a lack of reliable (or credible) figures on how the names on enrolment forms tally with 'bums on seat' and with newly employed or self-employed people</i>	Keyakinan bahwa investasi dalam pengembangan diri akan mendatangkan hasil yang besar sedemikian kuatnya sehingga donatur bahkan tidak tergoyahkan oleh tidak adanya bukti yang dapat dipercaya mengenai kecocokan antara nama yang tercantum dalam formulir pendaftaran dengan <b>jumlah orang yang akhirnya duduk dalam kelas itu</b> , dan dengan jumlah orang yang baru mendapatkan pekerjaan atau baru menciptakan pekerjaan sendiri.	Kotze, Paragraf 7

*Bums on seats* merupakan idiom dalam bahasa Inggris-Inggris dan Inggris-Australia yang berpadanan dengan idiom *fannies in the seats* dalam bahasa Inggris-Amerika (*Cambridge Idioms Dictionary*, 2006). Definisi idiom dalam kamus itu dijelaskan dalam kalimat “*if a public performance or a sports event puts bums on*

*seats, many people pay to go and see it*". Contoh penggunaan idiom itu terdapat dalam kalimat *This production needs a big name to put bums on seats*.

Senada dengan definisi di atas, *Phrases*, sebuah situs pembelajaran bahasa Inggris terkemuka di United Kingdom mendefinisikan *bums on seat* sebagai "*the paying audience at a venue with seating, usually a theatre or cinema*" (*Phrases*, 2011). Istilah yang berasal dari Inggris sekitar awal tahun 1980-an itu menyiratkan bahwa keberadaan peserta merupakan target penyelenggaraan suatu kegiatan, sebagai indikasi jumlah uang yang diperoleh dari larisnya tiket yang terjual. Idiom itu pertama kali digunakan dalam majalah *Guardian Weekly*, edisi Desember 1982, ketika majalah ini membahas keberhasilan E.T, sebuah film fiksi ilmiah yang berhasil menarik jumlah penonton yang menakjubkan

*"E.T. thus comes to a beleaguered industry like a gift from the gods. Not only does it get bums on seats but it encourages the kind of shared enjoyment that suggests the cinema still has something unique to offer."*

Dalam Tsu, *bums on seats* muncul dalam konteks pendidikan. Idiom itu dijelaskan oleh seorang penutur asli sebagai berikut:

*"Bums on seats" is an interesting term. As education is most commonly found in a classroom, the expression refers to numbers of students enrolled. In other words how many people are enrolled in a course and would be sitting on a chair in the classroom if there were a classroom. For example, our Masters course has about 76 'bums on seats'. (In the source text), they are not concerned if the number of enrolment forms with names on them does not match the number of students supposedly enrolled in the course. All they want are 'numbers' enrolled.*

(Yvonne Evans, komunikasi pribadi, 10 Desember 2011)

Penutur asli yang lain memaparkan hal itu sebagai berikut:

*I have to say from an Australian perspective, the meaning would be taken at face value, in that, it means to fill the room with people in order to earn the money needed to pay for the course.*

*Economics again rules, and numbers are everything.*

(Bernadette Mason, komunikasi pribadi, 9 Desember 2011)

Dengan demikian, jelaslah bahwa idiom *bums on seats* menunjuk pada jumlah orang yang memang duduk dalam kelas itu. Dengan pemahaman konteks itu, saya menerapkan prosedur parafrasa dalam memberikan padanan idiom *bums on seats* sebagai *jumlah orang yang akhirnya duduk dalam kelas itu*. Prosedur parafrasa ini mengeksplisitkan makna idiom Inggris tersebut.

**Anotasi 16** *go hand in hand*

No	Tsu	Tsa	Paragraf
16	<i>However, motivational teaching packs often reinforce the perception that the failure to participate in decision-making is the result of personal deficiencies rather than structural constraints, and that powerful participation and leadership require individual transformation rather than broader social change, particularly with regard to patriarchal relations rooted in</i>	Namun, paket materi pengajaran yang memotivasi sering memperkuat persepsi bahwa kegagalan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah hasil dari kelemahan pribadi dan bukan kendala struktural, dan bahwa partisipasi dan kepemimpinan yang kuat memerlukan transformasi individu daripada	Kotze, paragraf 12

	<p><i>customs and traditional beliefs. Unless instructional strategies go hand in hand with, or supplement, structural ones, the outcome of training will be people who are more confident but still just as oppressed.</i></p>	<p>perubahan sosial yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan hubungan patriarkal yang berakar pada adat dan kepercayaan tradisional. Jika strategi pengajaran tidak <b>seiring sejalan</b> dengan, atau melengkapi strategi struktural, maka orang yang telah menyelesaikan pelatihan akan menjadi orang yang lebih percaya diri tetapi masih saja tertindas.</p>	
	<p><i>While extension – worker training and financial inputs for hardware may be useful., they often go hand in hand with agricultural systems that seek to replace the old (subsistence – based) ones.</i></p>	<p>Sementara pelatihan penyuluh dan pemasukan finansial untuk perangkat keras dapat berdaya guna, mereka sering <b>seiring sejalan</b> dengan sistem pertanian yang berusaha untuk menggantikan sistem pertanian yang lama.</p>	

Menurut *The American Heritage® Dictionary of the English Language*, (2000), *hand in hand* adalah idiom yang bermakna “*in cooperation; jointly*”. Definisi ini selaras dengan definisi dari *learn-english-today.com* (2012), sebuah situs

pemelajaran bahasa Inggris terkemuka di dunia. Menurut situs ini, *hand in hand* termasuk ke dalam idiom yang penjelasannya sebagai berikut “*if two or more things go hand in hand, they are associated or often happen at the same time*”. Contoh penggunaan idiom ini tertera dalam kalimat “*In big cities poverty and violence often go hand in hand*”.

Situs bahasa Inggris lain mengemukakan definisi yang serupa. *Usingenglish.com* (2012) menyatakan bahwa *hand in hand* bermakna “*work together closely*”. Penjelasan yang lebih detail adalah sebagai berikut: “*When people in a group, say in an office or in a project, work together with mutual understanding to achieve the target, we say they work hand in hand. There is no lack of co-operation and each synchronises the activity with that of the other*”. Penjelasan yang sama juga terdapat dalam *Cambridge Dictionary of American Idioms* (2003), yang menjelaskan bahwa *go hand in hand* bermakna “*to be present together*”. Contoh penggunaan idiom ini dalam kalimat adalah sebagai berikut: “*I thought ability in math and music were supposed to go hand in hand, but Tyler's much better in music than math*”. Dengan penjelasan di atas, maka idiom *go hand in hand* dapat dipadankan dengan idiom yang bermakna sama dalam bahasa Indonesia, yaitu “*seiring sejalan*”. Penerjemahan ini menggunakan prosedur penerjemahan metafora karena memadankan idiom dalam bahasa sumber dengan idiom dalam bahasa sasaran. Penerjemah menggunakan idiom yang bermakna sama namun berbeda bentuk.

#### **Anotasi 17 *muddy these already murky waters***

No	Tsu	Tsa	Paragraf
17	<i>Now I am proposing to <b>muddy these already murky waters</b> by dislocating its pedagogical, theoretical and policy frames to sites of war, occupation,</i>	Sekarang saya mengusulkan untuk memperkeruh air yang sudah keruh ini dengan mendislokasikan	Mojab, paragraph 24

	<i>displacement, and dispossession.</i>	kerangka pedagogis, teoretis dan politis ke situs perang, pendudukan, pendesakan, dan pencabutan hak milik.	
--	---	---	--

Menurut *McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs* (2002), *muddy something up* bermakna idiomatis “to make something unclear”. Contoh penggunaannya ada dalam kalimat “*You have really muddied this issue up*”, “*I thought I understood it. You sure muddied up this issue*”. Sedangkan makna idiomatis *muddy the water* dalam kamus itu dijelaskan secara lebih spesifik yaitu “to make something less clear; to make matters confusing; to create difficulty where there was none before”. Contoh penggunaan idiom ini terdapat dalam kalimat “*things were going along quite smoothly until you came along and muddied the water*”, “*the events of the past month have muddied the water as far as our proposed joint venture is concerned*”.

Sama halnya dengan *McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs* (2002), kamus lain yaitu *Cambridge Dictionary of American Idioms* (2003) menjelaskan bahwa idiom itu bermakna “to make a situation more confusing”. Contoh penggunaan idiom itu dalam kalimat adalah “*He's just trying to muddy the waters so we won't notice all the bad things he's done*”. Kamus ini juga menjelaskan bahwa idiom itu terkadang dilengkapi dengan *modifier*: Contoh penggunaan idiom itu dengan *modifier* adalah “*The controversy has muddied the social waters of communities throughout this region*”. Pada edisi terkini, *Cambridge Idioms Dictionary, 2nd ed* (2006) menyatakan bahwa “*muddy the waters*” bermakna “to make a situation more confused and less easy to understand or deal with”. Kamus itu memberikan contoh penggunaan idiom ini dalam kalimat “*The statistics you quoted didn't prove anything, they simply muddied the waters*”.

Dengan demikian, dalam idiom *muddy these already murky waters*, terdapat idiom *muddy the waters* dengan menggunakan *murky* sebagai *modifier*. Menurut *Collins English Dictionary – Complete and Unabridged (2003)*, *murky* didefinisikan sebagai “gloomy or dark”; “cloudy or impenetrable as with smoke or fog”. *The American Heritage® Dictionary of the English Language (2000)*, *murky* bermakna “dark, dim, or gloomy”; “darkened or clouded with sediment”. Kamus itu memberikan contoh penggunaan kata sifat ini dalam *murky waters*.

Idiom ini tidak memiliki padanan idiom yang sama dalam bahasa Indonesia. Tetapi, dalam bahasa Indonesia dikenal peribahasa *memancing di air keruh* yang bermakna “mengambil keuntungan dalam kondisi yang sukar atau masalah yang sudah rumit”. Idiom itu sepadan dengan idiom bahasa Inggris yaitu *fishing in murky water*, yang bermakna “taking advantage of a murky/confusing situation”. Jadi, dalam bahasa Indonesia, pembaca telah memahami istilah *murky water* sebagai “air keruh”. Oleh karena itu, saya mengambil potongan idiom itu untuk mempertahankan kesepadanan makna dan keindahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa idiom *muddy these already murky waters* bermakna “memperkeruh air yang sudah keruh”. Prosedur penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan metafora. Penerjemah mempertahankan kiasan dalam bahasa sumber ke dalam kiasan dalam bahasa sasaran.

**Anotasi 18 ‘a cat sleeping in the fireplace’**

**Anotasi 19 ‘eating wild food with sticks’**

**Anotasi 20 ‘eating so little that it would fill a bird’s stomach’**

No	Tsu	Tsa	Paragraf
18,19,20	<i>Research into local perceptions of poverty demonstrates that words and metaphors for poverty are most often related to hunger. This is because from experience people know about ‘a cat sleeping in the fireplace’, ‘eating wild food with sticks’ or ‘eating so little that it would fill a bird’s stomach’.</i>	Penelitian mengenai persepsi lokal tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kata dan ekspresi figuratif terkait kemiskinan seringkali berhubungan dengan kelaparan. Dari pengalaman orang banyak tahu mengenai “dapur tak berasap”, “seperti ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang”, atau “makan tanah”.	Kotze, paragraf 44

Penulis teks menjelaskan bahwa ungkapan tentang kemiskinan seringkali berhubungan dengan kelaparan. Istilah *a cat sleeping in the fireplace* merupakan istilah yang digunakan penulis untuk melukiskan kondisi yang sangat miskin. Kondisi itu tercermin dalam perapian yang tidak menyala sehingga kucing dapat tidur di atas perapian itu. Perapian yang tidak menyala melukiskan lebih dalam tentang kemiskinan yang mengakibatkan tidak adanya bahan pangan untuk dimasak.



. Makna peribahasa ini dijelaskan oleh penutur asli asal Australia, Hellaine Costello

*I can only assume that this refers to the fact that if the cat is sleeping in the fireplace, then there is no fire and therefore no food being cooked*

(Hellaine Costello, komunikasi pribadi, 13 Maret 2012)

Dengan demikian, *a cat sleeping in the fireplace* bermakna suatu keadaan yang sangat miskin sehingga tidak dapat memasak makanan. Idiom ini sepadan dengan peribahasa *dapur tidak berasap*, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) bermakna “miskin sekali”. Selain itu, peribahasa *dapur tidak berasap*, juga mengeksplisitkan kondisi kelaparan, ditandai dengan tidak adanya kegiatan memasak sebagai akibat suatu kondisi yang sangat miskin. Prosedur penerjemahan metafora diterapkan untuk menerjemahkan idiom *a cat sleeping in the fireplace* menjadi “*dapur tidak berasap*”.

Berikutnya, idiom *eating wild food with sticks* mengacu pada kemiskinan yang parah. Hal ini dijelaskan oleh Hellaine Costello, seorang penutur asli berkebangsaan Australia berikut ini:

*This is referring to having to find food (wild) and having no utensils. It implements at being too poor to even have forks, a kitchen, etc*

(Hellaine Costello, komunikasi pribadi, 13 Maret 2012)

Dengan demikian, *eating wild food with sticks* bermakna tak dapat memenuhi kebutuhan sesuai standar penghidupan yang layak sehingga menggunakan peralatan yang tak layak pakai. Idiom ini sepadan dengan peribahasa BSA yaitu *seperti ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang* yang bermakna “sangat miskin, penghasilan hanya cukup untuk dimakan ketika itu” (Kamus Peribahasa, 2008). Penerjemahan peribahasa ini menggunakan prosedur penerjemahan metafora, yaitu memadankan idiom dengan peribahasa. Saya menggunakan ungkapan yang bermakna sama namun berbeda bentuk.

Selanjutnya idiom *eating so little that it would fill a bird's stomach* menjelaskan situasi kemiskinan yang teramat sangat sehingga untuk makan pun susah. Ini dijelaskan oleh Hellaine Costello, seorang penutur asli asal Australia.

*Birds have tiny stomachs so eating so little to fill a bird's stomach must mean having very little to eat*

(Hellaine Costello, komunikasi pribadi, 13 Maret 2012)

Penjelasan serupa dikemukakan oleh Kolya Schweppe, seorang penutur asli asal Kanada.

*It is pretty self-explanatory since poor people often go hungry and eat very little.*

(Kolya Schweppe, komunikasi pribadi, 6 April 2012)

Dengan demikian, idiom ini sepadan dengan idiom BSa yaitu *makan tanah*, yang bermakna “miskin sekali sehingga untuk makan pun susah” (Peribahasa, 2004). Prosedur penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan metafora, yaitu menerjemahkan idiom BSu dengan idiom BSa. Saya menggunakan idiom yang bermakna sama namun berbeda bentuk.

### 5.5 Akronim

Menurut *KBBI* (2008), akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Newmark (1988) menyatakan bahwa terdapat akronim yang tetap secara internasional namun bervariasi dalam berbagai bahasa. Sebagai contoh: UN dikenal secara internasional namun diterjemahkan sebagai PBB dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, penerjemahan akronim disesuaikan dengan konteks budaya bahasa sasaran.

## Anotasi 21 TVET

No	Tsu	Tsa	Paragraf
21	<p><i>The idea behind this is to encourage people living in adverse economic conditions to enhance their social and economic perspectives by enrolling in <b>technical and vocational education and training (TVET)</b> to improve their occupational skills and/or by taking up self-employment activities.</i></p>	<p>Gagasan di baliknya adalah untuk mendorong orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan untuk meningkatkan perspektif sosial dan ekonomi mereka dengan mendaftarkan diri pada <b>pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja</b> untuk meningkatkan keterampilan kerja dan/atau dengan membuka usaha mandiri.</p>	Kotze, paragraf 9
	<p><i>...thirdly, that ‘people living in adverse economic conditions’ will enhance their social and economic perspectives by improving their occupational skills through enrolling in <b>TVET</b>.</i></p>	<p>...ketiga, bahwa “orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan” akan meningkatkan perspektif sosial dan ekonomi mereka dengan meningkatkan keterampilan kerja dengan mendaftar pada <b>pendidikan kejuruan</b></p>	Kotze, paragraf 10

		<b>dan pelatihan kerja.</b>	
	<p><i>Critical of 'the global market economy' in terms of its exploitation of the environment and exclusion of 'roughly half of the world's people' (2006: 8), the document charged future TVET graduates with the task of 'working at the interface between nature, technology, economy, and society' and thus having to learn about 'sustainable concepts, practices and examples' (2006:9).</i></p>	<p>Bersikap kritis terhadap “ekonomi pasar global” dalam hal eksploitasinya terhadap lingkungan dan pengecualian “kira-kira setengah dari penduduk dunia” (2006:8), dokumen itu meletakkan tanggung jawab di pundak lulusan <b>pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja</b> di masa yang akan datang dengan tugas “bekerja pada bidang temu antara alam, teknologi, ekonomi, dan masyarakat” dan dengan demikian harus belajar tentang “konsep berkelanjutan, praktik dan contoh” (2006:9)</p>	<p>Kotze, paragraf 15</p>

*TVET* merupakan singkatan dari *Technical and Vocational Education and Training*, yaitu suatu sistem pendidikan kejuruan yang menyiapkan siswa dengan berbagai keterampilan sehingga siap terjun ke dunia kerja. UNESCO UNEVOC (2009) menjelaskan bahwa "*TVET refers to a range of learning experiences which are relevant to the world of work*". Selain itu, berdasarkan UNESCO UNEVOC

(2009), “*TVET also refers to "deliberate interventions to bring about learning which would make people more productive (or simply adequately productive) in designated areas of economic activity (e.g., economic sectors, occupations, specific work tasks)"*”.

Negara Uni Eropa dan Australia menggunakan istilah *TVET* untuk mengacu pada sistem pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja. Istilah ini telah secara resmi digunakan oleh UNESCO UNEVOC berdasarkan hasil kongres di Seoul pada tahun 1999. Para peserta kongres sepakat bahwa *TVET* merupakan istilah yang paling komprehensif sehingga merekomendasikan penggunaan istilah itu. Meskipun demikian, sistem *TVET* terdapat dalam berbagai negara dengan berbagai istilah lokalnya masing-masing. UNESCO UNEVOC (2009) memberikan contoh yaitu Amerika Serikat, yang menggunakan istilah *Vocational and Technical Education (VET)*, kemudian diubah menjadi *Career and Technical Education (CTE)*.

Sepanjang sejarah, ada berbagai istilah yang digunakan untuk mengacu pada sistem pendidikan kejuruan yang menyiapkan siswa dengan berbagai keterampilan sehingga siap terjun ke dunia kerja. UNESCO UNEVOC (2009) menjelaskan sebagai berikut

*“Throughout the course of history, various terms have been used to describe elements of the field that are now conceived as comprising TVET. These include: Apprenticeship Training, Vocational Education, Technical Education, Technical-Vocational Education (TVE), Occupational Education (OE), Vocational Education and Training (VET), Career and Technical Education (CTE), Workforce Education (WE), Workplace Education (WE) etc. Several of these terms are commonly used in specific geographic areas”*.

Jadi, ada beberapa negara yang masih menggunakan salah satu dari beberapa istilah di atas sebagai istilah umum yang mengacu pada sistem *TVET* di negaranya masing-masing. Selain itu, ada pula negara yang menerapkan *TVET* berdasarkan konteks sosial budaya masing-masing. Misalnya, UNESCO UNEVOC (2009)

mencontohkan Malaysia sebagai negara yang tidak memiliki istilah khusus yang mengacu pada *TVET*, namun negara itu menerapkan *Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)*, yaitu keterampilan untuk memperlengkapi lulusan sekolah menengah dengan keterampilan siap kerja. Selain itu, negara ini mulai merestrukturisasi sekolah menengah teknik menjadi sekolah menengah kejuruan, yang berfokus pada keterampilan kejuruan.

Permasalahan dalam penerjemahan ini timbul karena akronim *TVET* sangat asing bagi pembaca sasaran. Oleh karena itu, kata *TVET* dalam TSu harus dicarikan padanan budayanya yang terdapat dalam bahasa sasaran. UNESCO UNEVOC (2009) menjelaskan sistem *TVET* di Indonesia sebagai berikut

*Indonesia's TVET system is made up of two parts, namely the vocational education system (Sistem Pendidikan Kejuruan), which is a part of the National Education System (Sistem Pendidikan Nasional) governed by the Education Act (Law No. 20/2003) and the national training system for work (Sistem Pelatihan Kerja Nasional—Sislatkernas), governed by the Manpower Act (Law No. 13/2003).*

Setelah memahami penjelasan UNESCO UNEVOC (2009) di atas, maka saya menyimpulkan bahwa sistem *TVET* di Indonesia setara dengan sistem pendidikan kejuruan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Selanjutnya, pasal yang sama menjelaskan bahwa pendidikan menengah kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Dengan demikian, sistem *TVET* di Indonesia yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional sepadan dengan pendidikan kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Hal ini juga terlihat ketika pemerintah Indonesia

dan Thailand mengadakan kerjasama dalam bentuk acara *Technical and Vocational Education and Training (TVET) Camp 2011* bertajuk '*School Partnership Program: Indonesia-Thailand*', pada tanggal 9-15 Oktober 2010 di Hotel Galuh, Prambanan Klaten (Akurnews, 2011). Acara ini diikuti oleh 70 pelajar *Vocational Colleges* (setingkat SMK) dari Thailand dan 63 pelajar SMK Indonesia yang berasal dari DIY, Jateng, Jatim dan Bali.

Sedangkan sistem *TVET* di Indonesia yang ada di bawah Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah *Sislatkernas*, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa "*Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan*". Selanjutnya, pasal 13 butir 1 menyatakan bahwa "*Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta*".

*Sislatkernas* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa "*Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional*". Sementara itu, pasal 1 butir 3 menjelaskan tentang lembaga pelatihan kerja sebagai "*Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja*". Selanjutnya, jelas bahwa pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam Peraturan Pemerintah ini, pasal 12 menyatakan bahwa "*Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota*". Jadi, sistem *TVET* di Indonesia yang ada di bawah Kementrian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sislatkernas) terwujud dalam bentuk lembaga pelatihan kerja, baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan uraian di atas, saya menyimpulkan bahwa sistem *TVET* di Indonesia ada dua macam yaitu (1) sistem yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, disebut sistem pendidikan kejuruan, yang terwujud dalam bentuk sekolah kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), (2) sistem yang ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disebut Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas), yang terwujud dalam bentuk lembaga pelatihan kerja, baik negeri maupun swasta. Jadi, saya menerjemahkan *TVET* sebagai “pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja”. Saya menyesuaikan istilah dalam TSu dengan padanan yang berterima secara budaya dalam konteks lokal bahasa sasaran. Prosedur padanan budaya membantu pembaca dalam memahami secara cepat kata/istilah budaya dalam bahasa sasaran.

#### **Anotasi 22 MDGs**

No	Tsu	Tsa	Paragraf
22	<i>However, their omission is vary worrying, particularly in the context of rising food prices, food shortages as crops are turned into biofuels, and looming deadlines for meeting Millennium Development Goals (MDGs).</i>	Namun, pengabaian itu sangatlah mengkhawatirkan, khususnya dalam konteks kenaikan harga kebutuhan pokok, kekurangan bahan pangan seiring dengan digunakannya tanaman sebagai bahan bakar hayati, dan berpacu dengan tenggat waktu untuk mencapai	Kotze, paragraf 5



		<p><b><i>Millenium Development Goals (MDGs).</i></b></p> <p>(catatan kaki: Millennium Development Goals (MDGs) merupakan delapan tujuan pembangunan internasional yang disetujui oleh 192 negara anggota PBB dan paling tidak 23 organisasi internasional untuk dicapai sebelum tahun 2015, antara lain memberantas kemiskinan, menurunkan angka kematian anak, dan membangun kemitraan global bagi pembangunan)</p>	
--	--	--	--

*Millennium Development Goals (MDGs)* merupakan delapan tujuan pembangunan internasional yang disetujui oleh 192 negara anggota PBB dan paling tidak 23 organisasi internasional (UN, 2012). Permasalahan yang dihadapi dalam menerjemahkan akronim ini adalah belum adanya terjemahan resmi istilah itu dalam bahasa Indonesia. Bahkan, pemerintah Indonesia pun tetap menggunakan istilah *Millennium Development Goals (MDGs)* tanpa mengalihkannya ke dalam bahasa Indonesia (MDGs Indonesia, 2012). Sebagai contoh, istilah MDGs tetap

dipertahankan dalam nama salah satu bebadan pembantu pemerintah, yaitu Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk *Millennium Development Goals*. Selain itu, akronim *MDGs* sangat populer sehingga pembaca sasaran malah akan kebingungan apabila istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pembaca lebih memahami kata pinjaman dalam bahasa asli daripada kata terjemahan yang belum populer. Oleh karena itu, saya memilih mempertahankan istilah asli dalam teks sumber. Dalam penerjemahan ini, saya menggunakan prosedur transferensi, yaitu prosedur penerjemahan yang mempertahankan kata dalam TSu ke dalam Tsa sehingga "*Millennium Development Goals (MDGs)*" tetap dipertahankan sebagai "*Millennium Development Goals (MDGs)*" dalam teks sasaran. Akan tetapi, saya merasa perlu menambahkan catatan kaki. Meskipun akronim ini populer, ada pula pembaca yang memerlukan penjelasan tambahan mengenai pengertian *MDGs* dan apa saja tujuan pembangunan yang tercakup dalam *MDGs*.

Dari keseluruhan anotasi di atas, saya menerapkan berbagai prosedur yang sesuai untuk masalah penerjemahan yang dihadapi dalam teks ini. Substansi teks ini ternyata mencakup berbagai bidang selain pendidikan orang dewasa, antara lain pekerjaan dan pemelajaran, sosiologi, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, saya harus membaca berbagai sumber untuk menerjemahkan. Permasalahan dalam tataran kata meliputi ketiadaan padanan dalam bahasa sasaran dan ketiadaan kata khusus. Saya menggunakan prosedur padanan deskriptif, parafrasa, dan naturalisasi untuk mengatasi permasalahan ketiadaan padanan dalam bahasa sasaran. Prosedur padanan deskriptif saya terapkan pada penerjemahan kata *ecocide* sebagai *perusakan lingkungan*. Prosedur parafrasa saya terapkan untuk menerjemahkan kata *mystification* sebagai *keadaan yang dengan sengaja dibuat membingungkan dan sukar dipahami*. Sementara itu, prosedur naturalisasi saya terapkan untuk menerjemahkan kata *inclusion* sebagai *inklusi* dan *professionalisation* sebagai *profesionalisasi*. Selain itu, saya menggunakan kombinasi strategi penggunaan kata yang lebih netral dan penghilangan kata untuk mengatasi ketiadaan

kata khusus dalam bahasa sasaran dalam penerjemahan kata *serfdom and slavery* sebagai *perbudakan*.

Sementara itu, pada tataran frasa terdapat permasalahan antara lain konteks tempat yang diacu oleh bahasa sumber tidak terdapat dalam bahasa sasaran. Permasalahan ini terdapat dalam penerjemahan frasa. Untuk mengatasi permasalahan itu, saya menggunakan prosedur parafrasa untuk menerjemahkan *for a few rand* sebagai *dengan harga yang sangat murah*. Saya juga menggunakan beberapa prosedur lain untuk mempertahankan ketepatan dan kewajaran dalam penerjemahan frasa. Prosedur padanan budaya saya terapkan untuk menerjemahkan frasa *connecting thread* sebagai *benang merah* dan *lofty ideals* sebagai *cita-cita luhur*. Sementara itu, prosedur penerjemahan resmi diterapkan untuk menerjemahkan frasa *bio fuels* sebagai *bahan bakar hayati*.

Selain permasalahan pada tataran kata dan frasa, permasalahan lain adalah adanya istilah khusus lintas disipliner. Saya menggunakan beberapa prosedur antara lain prosedur modulasi untuk menerjemahkan *disadvantaged population* sebagai *masyarakat pra sejahtera*. Saya juga menggunakan prosedur penerjemahan resmi untuk menerjemahkan istilah, antara lain istilah *participatory rural appraisal* sebagai *kajian desa partisipatif* dan istilah modern “*hunter-gatherer*” sebagai “*pemburu-pengumpul*” *modern*. Istilah *deskilling* juga diterjemahkan dengan prosedur penerjemahan resmi sebagai *peniadaan keterampilan*. Selanjutnya, saya melengkapi dengan catatan kaki untuk memperjelas konsep yang terkandung dalam istilah itu. Jadi, istilah *deskilling* saya terjemahkan dengan couplet, yaitu menggabungkan dua prosedur penerjemahan, antara lain prosedur penerjemahan resmi dan catatan kaki.

Selain permasalahan kata, frasa, dan istilah, teks ini juga mengandung beberapa idiom. Saya menerapkan prosedur parafrasa untuk menerjemahkan idiom yang tidak memiliki padanan idiom dalam bahasa sasaran. Idiom itu antara lain *raising little more than an eyebrow* yang diterjemahkan sebagai *tidak membuat orang kaget* dan *bums on seat* sebagai *jumlah orang yang akhirnya duduk dalam kelas itu*.

Akan tetapi, penerjemahan idiom *muddy these already murky waters* berbeda dengan penerjemahan dua idiom itu. Meskipun tidak memiliki padanan idiom yang sama dalam bahasa Indonesia, saya dapat menerapkan metode penerjemahan metafora untuk idiom itu. Dalam bahasa Indonesia, dikenal peribahasa *memancing di air keruh* yang sepadan dengan idiom bahasa Inggris yaitu *fishing in murky water*. Jadi, dalam bahasa Indonesia, pembaca telah memahami istilah *murky water* sebagai *air keruh*. Oleh karena itu, saya mengambil potongan idiom itu untuk mempertahankan kesepadanan makna dan keindahan. Jadi, idiom *muddy these already murky waters* diterjemahkan sebagai *memperkeruh air yang sudah keruh*.

Prosedur penerjemahan metafora juga saya terapkan untuk menerjemahkan idiom bahasa sumber yang memiliki padanan idiom yang sama dalam bahasa sasaran. Idiom *go hand in hand* dipadankan dengan idiom yang bermakna sama dalam bahasa Indonesia, yaitu *seiring sejalan*. Saya juga menggunakan prosedur penerjemahan metafora untuk menerjemahkan idiom *a cat sleeping in the fireplace* sebagai *dapur tidak berasap*, *eating wild food with sticks* sebagai *seperti ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang*, dan *eating so little that it would fill a bird's stomach* sebagai *makan tanah*. Saya menggunakan idiom yang bermakna sama namun berbeda bentuk.

Permasalahan terakhir dalam teks ini adalah penerjemahan akronim. Untuk menemukan padanan yang berterima, saya menyesuaikan istilah dalam TSu dengan padanan yang berterima secara budaya dalam konteks lokal bahasa sasaran. Penerjemahan TVET sebagai *pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja* dalam teks ini menggunakan prosedur padanan budaya, yang membantu pembaca dalam memahami secara cepat kata/istilah budaya dalam bahasa sasaran. Akan tetapi, ada pula akronim yang tidak dapat diterjemahkan dengan prosedur padanan budaya, yaitu akronim yang telah populer, seperti *MDGs*. Saya memilih mempertahankan istilah asli dalam teks sumber dengan menggunakan prosedur transferensi. Meskipun akronim itu populer, prosedur transferensi ini saya kombinasikan dengan catatan kaki untuk memudahkan pembaca yang memerlukan penjelasan tambahan.

Saya mempertahankan genre teks, yaitu teks argumentasi. Untuk mempertahankan genre teks itu, saya menerapkan metode komunikatif. Metode ini sangat membantu saya dalam menerjemahkan teks argumentasi yang panjang dan rumit ini sehingga wacana teks sumber teralihkan sepenuhnya ke dalam teks sasaran. Selain metode komunikatif, saya juga menggunakan metode penerjemahan idiomatis dalam menerjemahkan ungkapan idiomatis dalam teks sumber ke dalam idiom dalam teks sasaran. Saya menggunakan metode penerjemahan idiomatis untuk mempertahankan gaya teks yang menggunakan bahasa figuratif. Jadi, dalam penerjemahan teks yang memiliki tingkat kebermarkahan yang tinggi ini, jelaslah bahwa selain menggunakan metode yang tidak kaku, penerjemah juga harus menerapkan prosedur yang tepat untuk setiap permasalahan penerjemahan, baik tataran kata dan frasa, maupun permasalahan penerjemahan istilah, idiom, dan akronim.

Penerjemah juga harus memahami konteks untuk menerjemahkan kata, frasa, dan idiom, serta menyederhanakan kalimat panjang dan kompleks sehingga dapat dipahami pembaca sasaran. Oleh karena itu, penerjemah harus membaca beberapa referensi dan berkonsultasi dengan nara sumber. Di samping itu, penerjemah harus tetap mempertahankan segi estetika khususnya dalam penerjemahan idiom. Pemilihan prosedur harus dilakukan dengan cermat, khususnya dalam penerjemahan istilah khusus dan akronim. Terdapat istilah yang meski sudah memiliki padanan resmi, namun tetap memerlukan penjelasan lebih dengan catatan kaki untuk memudahkan pembaca memahami teks. Penerjemah juga harus banyak membaca berbagai referensi dan berkonsultasi dengan nara sumber. Dengan demikian, penerjemahan teks ini menuntut penerjemah untuk mengikuti berita seputar bidang yang berhubungan dengan pendidikan orang dewasa dan perubahan global sehingga dapat menerjemahkan istilah yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu.

## BAB 6

### KESIMPULAN

Dengan melihat struktur teks, jelaslah bahwa teks ini adalah teks argumentatif. Teks ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena merupakan suatu tinjauan kritis terhadap pendidikan orang dewasa khususnya untuk masyarakat yang terpinggirkan, yang mendobrak tatanan kapitalis dan neo liberal yang sudah mapan. Tantangan yang saya hadapi adalah memahami makna wacana yang diangkat penulis teks. Konsep yang dikemukakan penulis teks sumber merupakan wacana baru yang tidak biasa. Karena penulis teks sumber mengemukakan ide yang belum umum, penerjemah harus membaca teks beberapa kali dengan teliti supaya benar-benar memahami alur berpikir dan gagasan yang dikemukakan penulis teks sumber. Dengan demikian, penerjemah menghindari misinterpretasi konsep baru yang dikemukakan baik oleh Mojab maupun Von Kotze.

Selain itu, teks argumentasi ini ditulis dengan kalimat yang panjang dan kompleks disertai penggunaan bahasa figuratif sehingga tantangan lain adalah memecah kalimat panjang dan kompleks menjadi kalimat yang lebih pendek dan sederhana sehingga dapat dipahami pembaca sasaran. Memang teks bergenre argumentasi seperti ini memiliki struktur teks lebih kompleks dan lebih sulit untuk dinegosiasikan (Hatim & Mason, 2007). Oleh karena itu, metode penerjemahan komunikatif sangat sesuai untuk menerjemahkan teks seperti ini. Penerjemah juga berusaha semaksimal mungkin untuk menerjemahkan bahasa figuratif dalam teks sumber dengan mempertahankan estetikanya dalam teks sasaran, dengan menggunakan metode penerjemahan idiomatis. Ada beberapa idiom bahasa sumber yang berhasil diterjemahkan ke dalam idiom bahasa sasaran. Akan tetapi, ada pula idiom yang tidak dapat dipadankan dengan idiom sehingga diterjemahkan dengan parafrasa.

Tantangan lain adalah substansi teks sumber yang menyangkut tinjauan kritis terhadap pendidikan orang dewasa bagi masyarakat yang terpinggirkan, yang ternyata mencakup berbagai disiplin ilmu, dengan berbagai istilah khusus masing-masing bidang, yang menuntut penerjemah untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan makna yang tepat. Ini dilakukan dengan membaca berbagai referensi maupun berkonsultasi dengan nara sumber. Penerjemahan teks ini membutuhkan pengetahuan di beberapa bidang, di antaranya pendidikan, pekerjaan dan pembelajaran, sosiologi, psikologi, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Untuk menerjemahkan teks seperti ini, seorang penerjemah tidak cukup berbekal pengetahuan yang menyangkut topik utama saja. Penerjemah harus memiliki wawasan luas dengan banyak membaca dan mengikuti perkembangan sekitar topik tersebut, serta disiplin ilmu terkait lain .

Dalam penerjemahan teks seperti ini, jelaslah bahwa penerjemah tidak hanya dituntut untuk menguasai teori dan metode penerjemahan. Penerjemahan teks ini membutuhkan kesabaran, kecermatan, dan ketelitian dalam mencerna wacana yang dikemukakan penulis teks sumber. Selain itu, penerjemahan teks seperti ini menuntut pemahaman konsep yang benar sehingga wacana dalam teks sumber dapat teralihkan sepenuhnya ke dalam teks sasaran. Penerjemah juga dituntut untuk memiliki wawasan luas dengan banyak membaca dan mengikuti berita seputar pendidikan orang dewasa dan perubahan global supaya dapat menemukan padanan yang tepat dan mempertahankan jenis teks, yaitu teks argumentasi. Dengan menerjemahkan teks ini, saya memperluas wawasan dalam berbagai disiplin ilmu itu untuk menghasilkan terjemahan yang berterima.

Teks seperti ini banyak mewarnai perkembangan berbagai disiplin ilmu. Jadi, perlu ada penerjemah yang bersedia menerjemahkan teks argumentasi dengan tingkat kesulitan yang tinggi seperti ini. Seorang penerjemah tidak perlu gentar menghadapi pekerjaan seperti ini sepanjang memperhatikan beberapa hasil pembelajaran yang diperoleh dari penerjemahan teks ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Adult learning and global change* (2010). Diunduh pada 26 Februari 2012 dari itslearning.com website: <https://www.itslearning.com/Main.aspx?CourseID=3444>.
- Badudu, J.S. (2008). *Kamus peribahasa: memahami arti dan kiasan peribahasa, pepatah, dan ungkapan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Baker, M. (2011). *In other words a course book on translation*. London: Routledge.
- Bussinessdictionary.com*. (2012). Diunduh pada 9 Mei 2012 dari <http://www.businessdictionary.com/definition>.
- Collins English dictionary & thesaurus* (edisi kedua). (2000). Britain: HarperCollins & Times Books.
- Collins thesaurus of the English language – complete and unabridged* (edisi kedua). (2002). Britain: HarperCollins Publishers.
- Cambridge idioms dictionary*. (2006). New York: Cambridge University Press.
- Cambridge advanced learner's dictionary* (edisi ketiga). (2008). New York: Cambridge University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Diunduh pada 7 April 2012 dari <http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%2003%20sisdiknas.pdf>.
- Dictionary.com* (2012) diunduh pada 1 Mei 2012 dari [www.dictionary.reference.com](http://www.dictionary.reference.com)
- Echols, John.M & Shadily, Hassan. (1998). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia.



- Echols, John.M & Shadily, Hassan. (2010). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Glosarium pusat bahasa departemen pendidikan nasional indonesia*. (2009). Diunduh pada 9 Januari 2012 dari Kemdiknas.go.id Website: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/glosarium/>.
- Hatim,B & Mason,I. (1997). *The translator as communicator*. London: Routledge.
- Heacock, Paul. (2003). *Cambridge dictionary of American idioms*. New York: Cambridge University Press.
- Hoed, B.H. (2006). *Penerjemahan dan kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kamus istilah kependudukan dan keluarga berencana* (2011). Jakarta: Direktorat teknologi informasi dan dokumentasi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Diunduh pada 12 Juni 2012 dari bkkbn.go.id website: <http://www.bkkbn.go.id/arsip/Documents/Perpustakaan/Kamus%20%20Istilah%20KB.pdf>.
- Kantor utusan khusus presiden republik Indonesia untuk MDGs*.(2012). Diunduh pada 5 April 2012 dari Mdgsindonesia.org website: <http://mdgsindonesia.org>.
- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Diunduh pada 9 April 2012 dari bpkp.go.id website: <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/40/258.bpkp>.
- Kernerman English multilingual dictionary*. Kernerman English Learner's Dictionary © 1986-2009 K Dictionaries Ltd and partners. Diunduh pada 6 Desember 2011, dari Thefreedictionary.com website: <http://www.thefreedictionary.com>.
- Kurther, Jeanette. (2003). *Collins English dictionary – complete and unabridged*. London: HarperCollins Publishers.

Larson, M.L. (1984). *Meaning-based translation. A guide to cross-language equivalent*. USA: University Press of America.

*Longman dictionary of contemporary English* (edisi kelima).(2009). Essex: Pearson Longman.

*Mac millan dictionary* © Macmillan Publishers Limited 2009–2012. Diunduh pada 11 Mei 2012, dari Macmillandictionary.com website:  
<http://www.macmillandictionary.com/>.

Meager, David (2007). *Slavery in europe from the end of the roman empire*. CrossWay Issue Winter 2007 No.103. Diunduh pada 12 Juni 2012 dari Churchsociety.org website:  
[http://www.churchsociety.org/crossway/documents/cway\\_103\\_slavery2.pdf](http://www.churchsociety.org/crossway/documents/cway_103_slavery2.pdf).

*Merriam-Webster's dictionary of English usage* (edisi kedua). (1994). Springfield, MA: Merriam Webster.

Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. New York: Prentice Hall.

Nida, E.A & Taber, C.R (1974). *The theory and practice of translation*. Leiden: E.J Brill.

*-Ologies & -Isms Dictionary*. -Ologies & -Isms. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. diunduh pada 6 Desember 2011, dari Thefreedictionary.com website:  
<http://www.thefreedictionary.com>.

*Oxford advanced learner's dictionary of current English*.(edisi kelima).(1995). New York: Oxford University Press.

Pamuntjak dkk.(2004). *Peribahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional*. (2006). Diunduh pada 9 April 2012 dari

portal.djmbp.esdm.go.id website:

[http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP\\_no\\_31\\_th\\_2006.pdf](http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP_no_31_th_2006.pdf).

Zar. Pertukaran mata uang. (2012). diunduh pada 6 Desember 2012 dari

<http://id.zar.cer24.com/idr/>

Setiawan, ehta. (2010). *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* (3<sup>rd</sup> ed). (versi 1.1)

[software computer]. Diunduh pada 2 Januari 2012 dari ebsoft.web.id website: <http://ebsoft.web.id>.

Spears, Richard A. (2005). *McGraw-hill dictionary of American idioms and phrasal verbs*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Steven, Alan & Schmidgall-Tellings, A. Ed. (2004). *A comprehensive Indonesian English dictionary*. Athens: Ohio University Press.

*The American heritage® science dictionary*. (2005). New York: Houghton Mifflin Company.

*The American heritage® dictionary of the English Language* (edisi keempat). (2000). New York: Houghton Mifflin Harcourt.

UN. (2012). *A gateway to the UN's system work on the MDGs*. Diunduh pada 4 Mei 2012 dari un.org website: <http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>.

UNESCO UNEVOC. (2009). *What is TVET?* Tvetipedia. Knowledge sharing platform. Diunduh pada 4 Mei 2012 dari unevoc.unesco.org website:

[http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.0.html?&tx\\_drwiki\\_pi1%5Bkeyword%5D=TVET](http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.0.html?&tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D=TVET).

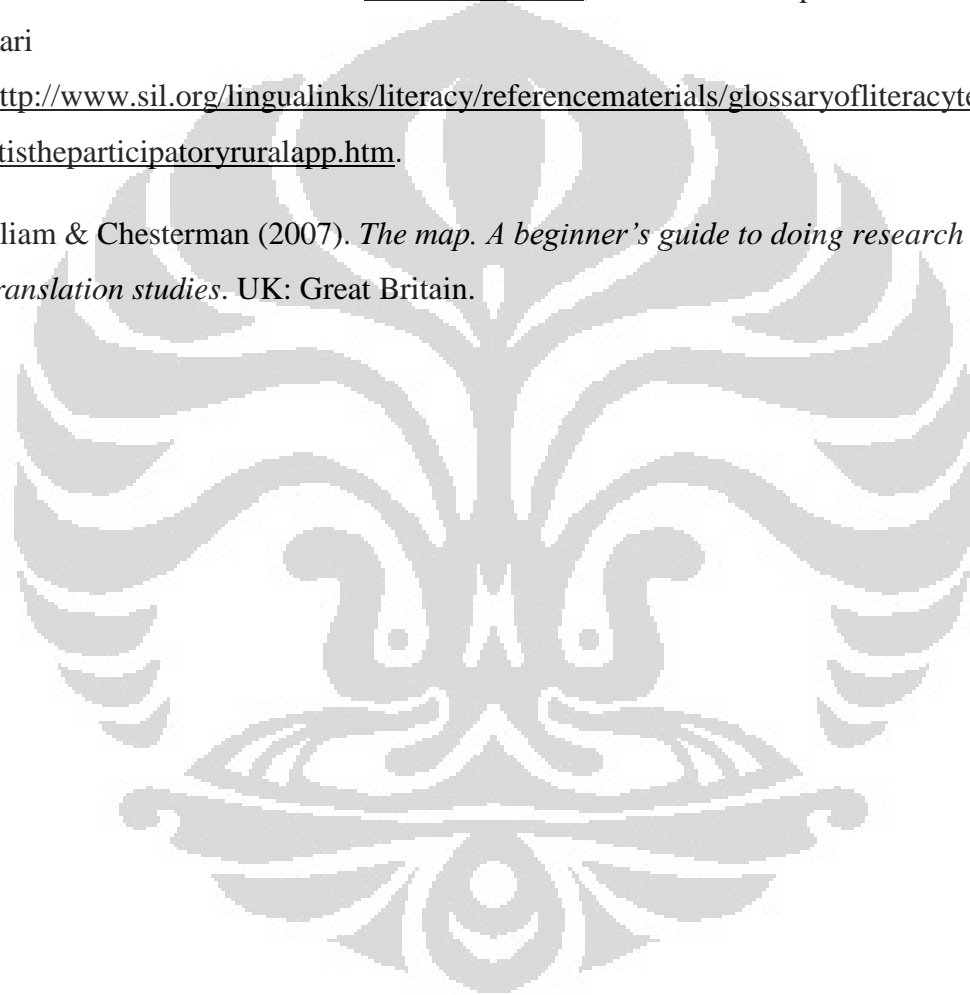
UNESCO UNEVOC. (2009). *What is TVET?* Wikipedia. Diunduh pada 4 Mei 2012 dari unevoc.unesco.org website:

[http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?tx\\_drwiki\\_pi1%5Bkeyword%5D=more%20about%20What%20is%20TVET](http://www.unevoc.unesco.org/wiki.0.html?tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D=more%20about%20What%20is%20TVET).

UNESCO UNEVOC. (2009). *TVET in Indonesia*. Diunduh pada 4 Mei 2012 dari [unevoc.unesco.org](http://www.unevoc.unesco.org) website:  
[http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.0.html?tx\\_drwiki\\_pi1%5Bkeyword%5D=Indonesia](http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.0.html?tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D=Indonesia).

*What is the participatory rural appraisal?* LinguaLinks Library, Versi 4.0, diterbitkan dalam bentuk CD-ROM oleh SIL International, 1999. Diunduh pada 5 Maret 2012 dari  
<http://www.sil.org/lingualinks/literacy/referencematerials/glossaryofliteracyterms/whatistheparticipatoryruralapp.htm>.

William & Chesterman (2007). *The map. A beginner's guide to doing research in translation studies*. UK: Great Britain.



## GLOSARIUM

<b>BSu</b>	<b>BSa</b>	<b>Acuan</b>
<i>Accommodation</i>	Fasilitas	<i>Oxford English Dictionary – Complete and Unabridged</i> . Diunduh pada 1 Mei 2012 dari Thefreedictionary.com website: <a href="http://www.thefreedictionary.com/accommodation">http://www.thefreedictionary.com/accommodation</a>
<i>Adverse</i>	Kurang menguntungkan	<i>Oxford English Dictionary – Complete and Unabridged</i> . Diunduh pada 10 Juni 2012 dari Thefreedictionary.com website: <a href="http://www.thefreedictionary.com/adverse">http://www.thefreedictionary.com/adverse</a>
<i>Capacity building</i>	Pengembangan kapasitas	Wawancara dengan Debora Suparni, Direktur Unit Pengembangan Masyarakat Yayasan Sion Salatiga, tanggal 6 Desember 2011
<i>Contingent work</i>	Pekerjaan tidak tetap	Businessdictionary diunduh pada 25 April 2012 dari Businessdictionary.com website <a href="http://www.businessdictionary.com/definition/contingent-work.html#ixzz22aIEFAvn">http://www.businessdictionary.com/definition/contingent-work.html#ixzz22aIEFAvn</a>
<i>Deskilling</i>	Peniadaan keterampilan	<i>Glosarium pusat bahasa departemen pendidikan nasional indonesia</i> . (2009). Diunduh pada 9 Januari 2012 dari Kemendiknas.go.id Website: <a href="http://bahasa.kemdiknas.go.id/glosarium/">http://bahasa.kemdiknas.go.id/glosarium/</a> business dictionary diunduh pada 1 Januari

		<p>2012 dari Bussinessdictionary.com website:  <a href="http://www.businessdictionary.com/definition/deskillling.html">http://www.businessdictionary.com/definition/deskillling.html</a></p> <p>about.com sociology diunduh pada 5 Maret 2012 dari about.com website:  <a href="http://sociology.about.com/od/Disadvantaged_Population/od/Deskillling.htm">http://sociology.about.com/od/Disadvantaged_Population/od/Deskillling.htm</a></p>
<i>Disadvantaged population</i>	Masyarakat pra sejahtera	<p>Kamus istilah kependudukan dan keluarga berencana (2011). Jakarta: Direktorat teknologi informasi dan dokumentasi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Diunduh pada 12 Juni 2012 dari bkkbn.go.id website:  <a href="http://www.bkkbn.go.id/arsip/Documents/Perpustakaan/Kamus%20Istilah%20KKB.pdf">http://www.bkkbn.go.id/arsip/Documents/Perpustakaan/Kamus%20Istilah%20KKB.pdf</a></p>
<i>Disorder</i>	Kekacauan	<p><i>The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition</i> diunduh pada 6 Juni 2012,  dari <a href="http://www.thefreedictionary.com">Thefreedictionary.com</a> website:  <a href="http://www.thefreedictionary.com/disorder">http://www.thefreedictionary.com/disorder</a></p>
<i>Dispossession</i>	Pencabutan hak milik	<p><i>The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition</i> diunduh pada 6 Juni 2012,  dari <a href="http://www.thefreedictionary.com">Thefreedictionary.com</a> website:  <a href="http://www.thefreedictionary.com/dispossession">http://www.thefreedictionary.com/dispossession</a></p>

		<u>esion</u>
<i>Learning</i>	Pemelajaran	<i>he American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition</i> diunduh pada 1 April 2012, dari <a href="http://www.thefreedictionary.com">Thefreedictionary.com</a> website: <a href="http://www.thefreedictionary.com/learning">http://www.thefreedictionary.com/learning</a>
<i>Lifelong learning</i>	Pemelajaran sepanjang hayat	<i>Collins thesaurus of the English language – Complete and Unabridged</i> (edisi kedua) diunduh pada 6 Juni 2012, dari <a href="http://www.thefreedictionary.com">Thefreedictionary.com</a> website: <a href="http://www.thefreedictionary.com/lifelong+learning">http://www.thefreedictionary.com/lifelong+learning</a>
<i>Livelihood</i>	Penghidupan	<i>he American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition</i> diunduh pada 2 April 2012, dari <a href="http://www.thefreedictionary.com">Thefreedictionary.com</a> website: <a href="http://www.thefreedictionary.com/livelihood">http://www.thefreedictionary.com/livelihood</a>
<i>Participatory rural appraisal</i>	Kajian desa partisipatif	<a href="http://www.sil.org">linguaLinks Library</a> , Versi 4.0, diterbitkan dalam bentuk CD-ROM oleh <a href="http://www.sil.org">SIL International</a> , 1999. Diunduh pada 5 Maret 2012 from <a href="http://www.sil.org/lingualinks/literacy/referencematerials/glossaryofliteracyterms/whatisstheparticipatoryruralapp.htm">http://www.sil.org/lingualinks/literacy/referencematerials/glossaryofliteracyterms/whatisstheparticipatoryruralapp.htm</a>
<i>Skilling</i>	Pengasahan keterampilan	<a href="http://www.businessdictionary.com">Bussinessdictionary</a> diunduh pada 25 April 2012 dari <a href="http://www.businessdictionary.com">Bussinessdictionary.com</a> website <a href="http://www.businessdictionary.com/definiti">http://www.businessdictionary.com/definiti</a>

		<a href="#">on/skill.html</a>
<i>Training</i>	Pelatihan	<i>Collins thesaurus of the English language – Complete and Unabridged</i> diunduh pada 14 Juni 2012, dari <a href="#">Thefreedictionary.com</a> website: <a href="http://www.thefreedictionary.com/trainin">http://www.thefreedictionary.com/trainin</a> <a href="#">g</a>
<i>Work ghettoisation</i>	Penggolongan pekerjaan	Dictionary reference diunduh pada 25 April 2012 dari <a href="#">Dictionaryreference.com</a> website <a href="http://dictionary.reference.com/browse/ghettoisation">http://dictionary.reference.com/browse/ghettoisation</a>
<i>Workforce</i>	Angkatan kerja	<i>the American Heritage® Dictionary of the English Language, edisi keempat</i> diunduh pada 4 April 2012, dari <a href="#">Thefreedictionary.com</a> website: <a href="http://www.thefreedictionary.com/workforce">http://www.thefreedictionary.com/workforce</a>
<i>World order</i>	Tatanan dunia	<i>Dictionary.com's 21st century lexicon.</i> Diunduh pada 10 Juni 2012 dari <a href="#">Dictionary.com</a> website <a href="http://dictionary.reference.com/browse/world_order">http://dictionary.reference.com/browse/world_order</a>